



**ESA HILANG
DUA TERBILANG**

RKPD 2024

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 57);
29. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 35);

31. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah khusus daerah dengan Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 yang dihitung sejak tahun 2023-2026.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2024 mengacu pada RPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis daerah, RKP, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan dengan menggunakan bahan dari Rancangan Renja SKPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. pedoman di dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD;

- b. sebagai bahan penyusunan RKA SKPD; dan
- c. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024.

Pasal 3

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. kepala SKPD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- b. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- c. kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan menyampaikannya per triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan tahunan; dan
- d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 4

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Tahun 2024 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD.

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD Tahun 2024, RKPD Provinsi, RKP serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD Tahun 2024 kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- (4) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Juli 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024



BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi merupakan tahapan akhir penyusunan RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi yang memuat rencana kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024, rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi serta rencana kerja dan pendanaan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2024.

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi merupakan lanjutan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi di Tahun Kedua berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Perangkat Daerah dan menjadi pedoman Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih





KATA PENGANTAR

Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan dan pertolongan-Nya maka dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi disusun sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 16 (1) b. Adapun materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi terdiri dari analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Renja perangkat daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan aspirasi masyarakat, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan dengan memperhatikan saran maupun masukan para pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik, Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini juga telah memperhatikan nomenklatur perencanaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ini merupakan pedoman sekaligus acuan ke dalam program dan kegiatan pada tahun 2024, diharapkan dengan adanya pedoman kerja bagi Perangkat Daerah, pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi dapat berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam menikmati hasil pembangunan yang akan dilaksanakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum dan Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-8
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-24
2.1.4 Aspek Daya Saing	II-52
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD serta Realisasi RPD	II-55
2.3 Penelaahan Pokok- Pokok Pikiran (pikir) DPRD	II-95
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-96
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara	III-2
3.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi.....	III-3
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-13
3.2.2 Pendapatan Daerah	III-13
3.2.3 Belanja Daerah	III-16
3.2.4 Pembiayaan Daerah....	III-18
3.3 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).....	III-21

BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-1
4.3	Telaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Tebing Tinggi	IV-19
4.4	Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.....	IV-36
4.5	Inovasi Daerah	IV-37
BAB V	RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi/CSR/Hibah.....	V-1
5.2	Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tebing Tinggi	V-2
5.3	Sinergitas Program/kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi	V-6
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
6.1	Indikator Makro Pembangunan	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-2
6.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI-4
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (miliar rupiah).....	II- 9
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHRB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (miliar rupiah).....	II- 10
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (persen).....	II- 11
Tabel 2.4	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi Tahun 2018- 2022 (persen)	II-12
Tabel 2.5	Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022	II-22
Tabel 2.6	Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi	II-23
Tabel 2.7	Jumlah Seni Budaya dan Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022	II-24
Tabel 2.8	Organisasi Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022.	II-24
Tabel 2.9	Banyaknya Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tebing Tinggi	II-24
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2018-2022 Kota Tebing Tinggi	II-25
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tebing Tinggi	II-26
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022.....	II-26
Tabel 2.13	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah (jiwa) Kota Tebing Tinggi	II-27
Tabel 2.14	Rasio Guru dan Murid Kota Tebing Tinggi	II-28
Tabel 2.15	Capaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan/ SPM Pendidikan	II-28
Tabel 2.16	Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi	II-30
Tabel 2.17	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi	II-34
Tabel 2.18	Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi	II-34
Tabel 2.19	Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.....	II-35
Tabel 2.20	Indikator Bencana Kebakaran Kota Tebing Tinggi	II-35
Tabel 2.21	Indikator Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi.....	II-36
Tabel 2.22	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi.....	II-37
Tabel 2.23	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tebing Tinggi.....	II-38
Tabel 2.24	Ketersediaan Pangan Kota Tebing Tinggi.....	II-39

Tabel 2.25	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi.....	II-39
Tabel 2.26	Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kota Tebing Tinggi.....	II-40
Tabel 2.27	Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi	II-41
Tabel 2.28	Capaian Indikator Perhubungan Kota Tebing Tinggi.....	II-42
Tabel 2.29	Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi.....	II-43
Tabel 2.30	Capaian Indikator Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi.....	II-44
Tabel 2.31	Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2021	II-44
Tabel 2.32	Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi.....	II-45
Tabel 2.33	Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Tebing Tinggi.....	II-46
Tabel 2.34	Indikator Kearsipan Kota Tebing Tinggi.....	II-46
Tabel 2.35	Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi.....	II-47
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi.....	II-48
Tabel 2.37	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB.....	II-48
Tabel 2.38	Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Tebing Tinggi	II-49
Tabel 2.39	Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi.....	II-49
Tabel 2.40	Indikator Keuangan Kota Tebing Tinggi.....	II-50
Tabel 2.41	Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi	II-51
Tabel 2.42	Opini BPK Tahun 2018-2022.....	II-52
Tabel 2.43	Indikator Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi.....	II-52
Tabel 2.44	Predikat SAKIP Tahun 2018-2022	II-53
Tabel 2.45	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022.....	II-53
Tabel 2.46	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi ...	II-54
Tabel 2.47	Pengeluaran per Kapita Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022	II-54
Tabel 2.48	Jumlah Kriminalitas Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022.	II-55
Tabel 2.49	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kota Tebing Tinggi.....	II-56
Tabel 2.50	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan I Kota Tebing Tinggi.....	II-58
Tabel 2.51	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Kota Tebing	

	Tinggi.....	II-65
Tabel 2.52	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi	II-67
Tabel 2.53	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tw I Kota Tebing Tinggi	II-79
Tabel 2.54	Rekap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berdasarkan kewenangan Kota Tebing Tinggi.....	II-97
Tabel 2.55	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II- 107
Tabel 3.1	Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional	III-2
Tabel 3.2.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022	III-3
Tabel 3.3	PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	III-5
Tabel 3.4	PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	III-8
Tabel 3.5	PDRB Target/proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi	III-11
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 s/d Tahun 2024	III-15
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 s/d Tahun 2024.....	III-17
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 s/d Tahun 2024	III-19
Tabel 4.1.	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara.....	IV-2
Tabel 4.2	Tujuan, sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi.....	IV-5
Tabel 4.3	Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dan Program Prioritas Tahun 2024	IV-6
Tabel 4.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..	IV-10
Tabel 4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Provsu dan Nasional. .	IV-12
Tabel 4.6	Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023	IV-20
Tabel 4.7	Inovasi Daerah	IV-38
Tabel 5.1	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi	V-2
Tabel 5.2	Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024	V-4
Tabel 5.3	Sinergitas program/kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi	V-7
Tabel 6.1.	Penetapan Indikator makro pembangunan.	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama	VI-3
Tabel 6.3	Keselarasan IKU, IKD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi	VI-4
Tabel 6.4.	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Alur Penyusunan RKPD	I- 3
Gambar 1.2	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I- 6
Gambar 1.3	Kedudukan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I- 7
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Tebing Tinggi.....	II- 1
Gambar 2.2	Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi.....	II- 3
Gambar 2.3	Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Tahun 2022 di Kota Tebing Tinggi	II- 4
Gambar 2.4	Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	II- 6
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi	II- 7
Gambar 2.6	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi	II- 7
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022	II- 8
Gambar 2.8	PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022 Kota Tebing Tinggi (Juta Rupiah).....	II-14
Gambar 2.9	Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi 2018-2022.....	II-15
Gambar 2.10	Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022	II-16
Gambar 2.11	Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022	II-17
Gambar 2.12	IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	II-18
Gambar 2.13	Rata-rata Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022.....	II-19
Gambar 2.14	Harapan Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022.....	II-20
Gambar 2.15	Angka Harapan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022	II-21
Gambar 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2022.....	II-23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional pemerintah. RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun sembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan akan menjadi pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2024.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2024 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2024, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, RPJPD Kota Tebing Tinggi, RPD Kota Tebing Tinggi, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan, dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan *Top Down - Bottom Up Planning*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politik

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan *Top down - Bottom Up Planning* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan dan sub kegiatan
2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)
3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah
4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

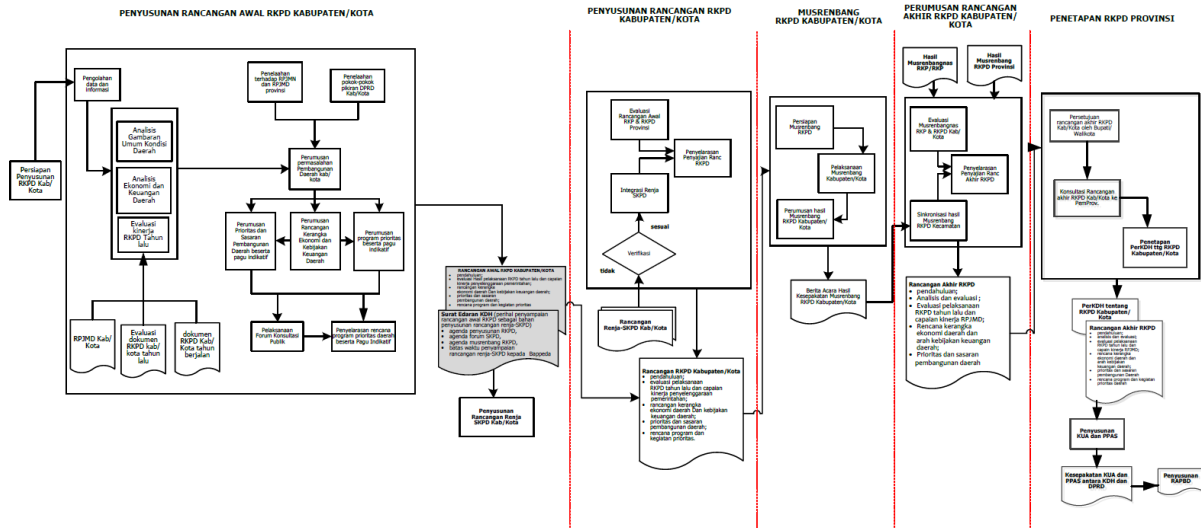
Proses penyusunan dokumen RKPD memerlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan berbasis pada *e-planning* dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Sebagaimana telah disebutkan di atas penyusunan tersebut dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi.

Tahap penyusunan RKPD mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- d. Penyusunan rancangan RKPD
- e. Pelaksanaan musrenbang RKPD
- f. Perumusan rancangan akhir RKPD
- g. Penetapan RKPD

Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.1
Skema Alur Penyusunan RKPD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor....);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
 20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
 21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
 22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
 23. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
 24. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 6);
 25. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 9);

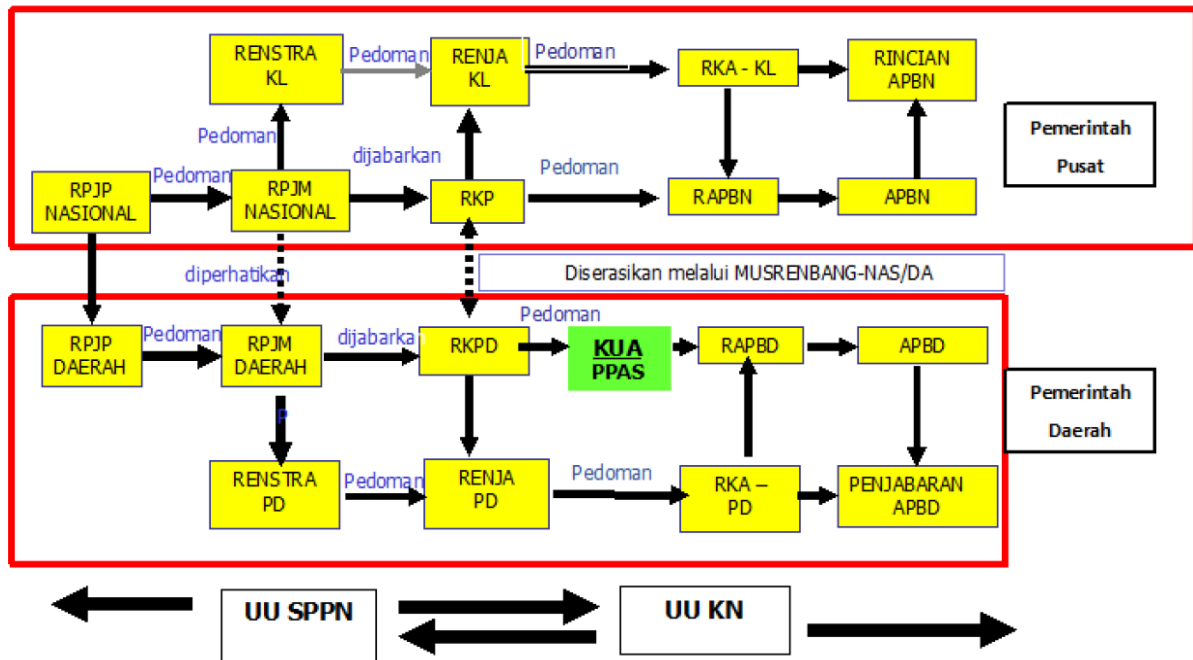
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD/RPD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi

dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.2
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

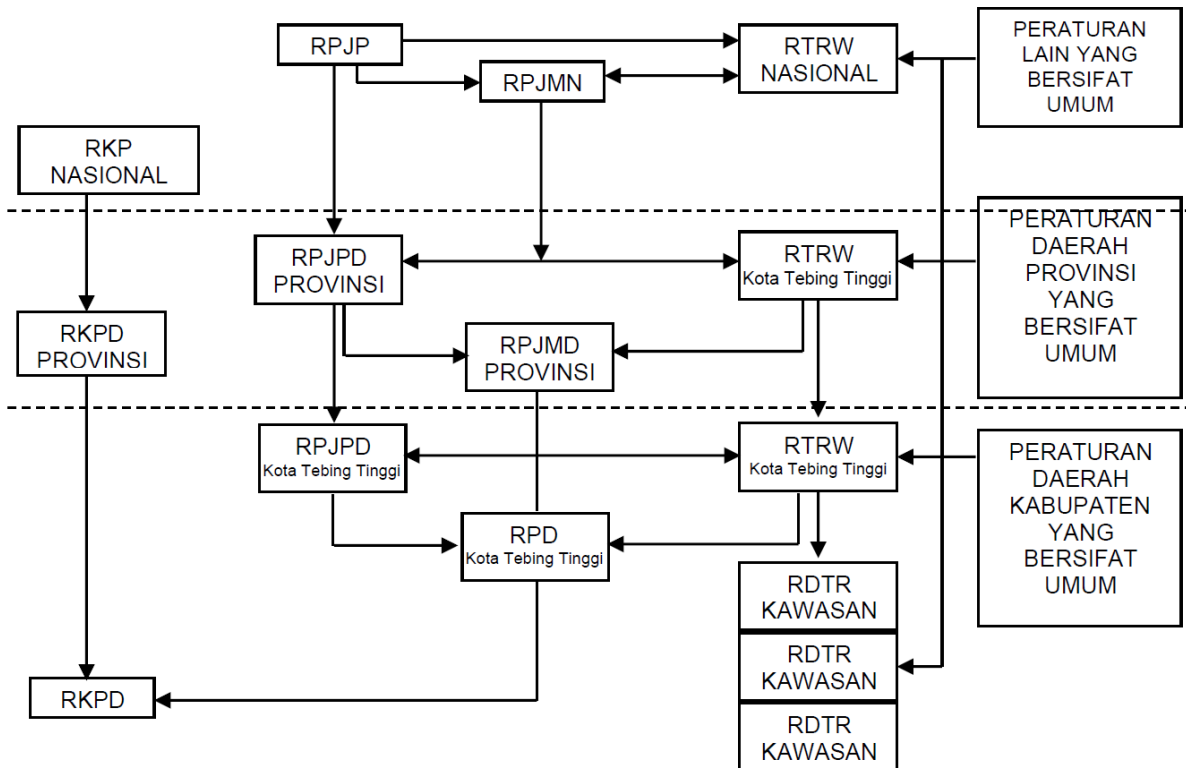
- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD/RPD yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RKP, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, dan RKPD provinsi. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan PPAS, serta menjadi pedoman dalam proses penyusunan Rancangan APBD. Dokumen RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan rancangan Renja PD untuk

tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Renja PD.

Selain itu kedudukan RKPD tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Kedudukan RKPD Kota Tebing Tinggi secara lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.3
Kedudukan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RKPD Tahun 2024 disusun untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kota Tebing Tinggi dan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Tebing Tinggi maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai :

1. Sebagai arah pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
2. Sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
3. Pedoman bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024 serta penyusunan RAPBD Tahun 2024

4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD/RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD/RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyusunan RKPD Kota Tebing Tinggi

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD/RPD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana .

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.3 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan menengah yang diambil dari dokumen RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi.

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) Tahun 2024.

Berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPD Provinsi Sumatera utara dan RPJMN.

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

5.1 Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2024



5.2 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota untuk Perencanaan Tahun 2024. Selanjutnya, Walikota memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud

5.3 Arah Pembangunan Kewilayahan

Berisi arahan pembangunan kewilayahan di Kota Tebing Tinggi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kota Tebing Tinggi

5.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

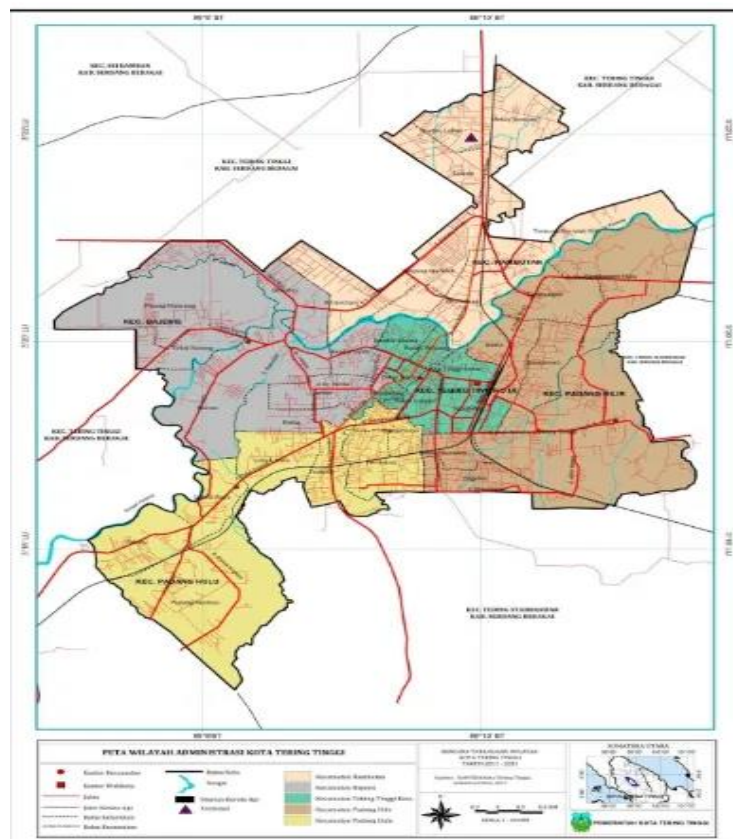
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tebing Tinggi salah satu dari tujuh kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang letaknya tidak jauh dari Ibukota Provinsi yaitu 78 kilometer dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi memiliki 35 Kelurahan dengan 179 Lingkungan, dimana Kecamatan Padang Hilir adalah kecamatan terluas dengan luas 11,441 Km² dan Kecamatan Bajenis merupakan Kecamatan yang ketinggiannya terendah yaitu 18 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi adalah 3.917 hektare (menurut Permendagri Nomor 128 Tahun 2022 tentang batas daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara).

Kota Tebing Tinggi berjarak sekitar 78 km dari Kota Medan Ibukota Provinsi Sumatera

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Tebing Tinggi



Sumber : RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2032

Utara serta terletak pada Jalur Lintas Utama Sumatera, yaitu yang menghubungkan Lintas

Timur dan Lintas Tengah Sumatera Utara melalui Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi-Sumatera Utara-Parapat-Balige-Siborong-borong. Batas wilayah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

- a. Wilayah Utara berbatasan dengan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Wilayah Selatan berbatasan dengan PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai
- c. Wilayah Timur berbatasan dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai
- d. Wilayah Barat berbatasan dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedagai

Secara administratif Kota Tebing Tinggi terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Kelurahan dan 179 Lingkungan yaitu :

1. **Kecamatan Padang Hulu** dengan luas wilayah 8,5110 km² atau 22,14% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 39 Lingkungan :
(1)Kelurahan Pabatu, (2)Kelurahan Lubuk Baru, (3)Kelurahan Persiakan, (4)Kelurahan Bandar Sono, (5)Kelurahan Tualang, (6)Kelurahan Lubuk Raya, (7)Kelurahan Padang Merbau.
2. **Kecamatan Rambutan** dengan luas wilayah 5,9350 km² atau 15,44% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 28 Lingkungan :
(1)Kelurahan Rantau Laban, (2)Kelurahan Sri Padang, (3)Kelurahan Karya Jaya, (4)Kelurahan Lalang, (5)Kelurahan Tanjung Marulak, (6)Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, (7)Mekar Sentoso.
3. **Kecamatan Padang Hilir** dengan luas wilayah 11,4410 km² atau 29,76% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 35 Lingkungan :
(1)Kelurahan Bagelen, (2)Kelurahan Tebing Tinggi, (3)Kelurahan Tambangan, (4)Kelurahan Satria, (5)Kelurahan Deblod Sundoro, (6)Kelurahan Damar Sari, (7)Kelurahan Tambangan Hulu.
4. **Kecamatan Tebing Tinggi Kota** dengan luas wilayah 3,4730 km² atau 9,04% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 43 Lingkungan :
(1)Kelurahan Mandailing, (2)Kelurahan Pasar Gambir, (3)Kelurahan Rambung, (4)Kelurahan Tebing Tinggi Lama, (5)Kelurahan Pasar Baru, (6)Kelurahan Badak Bejuang, (7)Kelurahan Bandar Utama.
5. **Kecamatan Bajenis** dengan luas wilayah 9,0780 km² atau 23,62% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 34 Lingkungan :
(1) Kelurahan Bulian, (2)Kelurahan Pelita, (3) Kelurahan Durian, (4) Kelurahan Bandar Sakti, (5) Kelurahan Teluk Karang, (6) Kelurahan Pinang Mancung, (7) Kelurahan Berohol.

B. Kondisi Geografis

Kota Tebing Tinggi secara geografis terletak diantara 3°19'00"- 3°21'00" Lintang Utara dan 98°11'-98°21' Bujur Timur dikelilingi oleh Kabupaten Serdang Bedagai terletak di jalan penghubung antara pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara.

C. Topografi

Kota Tebing Tinggi berada di dataran rendah Pulau Sumatera (18-34 m) diatas permukaan laut (dpl) dengan memiliki topografi mendatar dan bergelombang. Topografi mendatar memiliki kelas kemiringan lereng berkisar antara 0-2% sedangkan topografi bergelombang berkisar antara 2-15%. Kota Tebing Tinggi didominasi oleh topografi mendatar hampir 75% dari wilayah. Kemudian Topografi kemiringan lereng berkisar antara 8-15% hanya sedikit berada di wilayah Kota Tebing Tinggi sehingga menunjukkan sedikitnya potensi akan bencana longsor.

Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di Bajenis yaitu 18 meter diatas permukaan laut, sedangkan tertinggi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota yaitu 34 meter di atas permukaan laut. Tinggi wilayah kecamatan di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat sebagai berikut:

D. Geologi

Gambar 2.2
Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi

Kecamatan Subdistrict	Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l)
(1)	(2)
Padang Hulu	33
Tebing Tinggi Kota	34
Rambutan	30
Bejenis	18
Padang Hilir	33

Sumber : BPS- Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data dari Peta Geologi Lembar Tebing Tinggi, Sumatera menunjukkan bahwa kondisi geologi Kota Tebing Tinggi terbentuk dari dua jenis batuan, Batuan Sedimen dan Batuan Gunung Api. Keadaan tersebut menunjukkan kondisi struktur geologi Kota Tebing Tinggi sama dengan struktur geologi daerah sekitarnya (Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang). Kondisi geologi Kota Tebing Tinggi ini umumnya memiliki karakteristik tanah yang subur untuk pengembangan pertanian karena merupakan endapan lumpur aliran sungai.

E. Hidrologi

Kota Tebing Tinggi dilintasi oleh aliran 4 sungai yaitu Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kelembah, Sungai Sibarau. Sungai Padang merupakan sungai utama yang mempunyai panjang sekitar $\pm 16,22$ km dan lebar ± 65 m.

F. Klimatologi

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Tebing Tinggi beriklim tropis, dengan ketinggian 18-34 m di atas permukaan laut, maka temperature udara di kota ini cukup panas yaitu berkisar antara 25° - 27° C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi mempunyai musim kemarau dan musim penghujan.

Berdasarkan publikasi BPS dalam Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023, pada Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi mengalami hari hujan sebanyak 152 hari dengan curah hujan berkisar antara 31-429 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan curah hujan 429 mm. Hari hujan terbanyak bulan November yaitu selama 25 hari.

G. Penggunaan Lahan

Gambar 2.3

Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Tahun 2022 di Kota Tebing Tinggi

Bulan Month	Hari Hujan Rainfall	Curah Hujan Rainy Days
(1)	(3)	(4)
Januari/January	8	31
Februari/February	14	231
Maret/March	9	129
April/April	8	137
Mei/May	9	125
Juni/June	11	117
Juli/July	5	57
Agustus/August	10	133
September/September	10	135
Oktober/October	23	251
November/November	25	420
Desember/December	20	429
Rata-rata/Average	13	183

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Sesuai dengan Dokumen RTRW Tahun 2013-2033 yang memuat penggunaan lahan Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kota Tebing Tinggi didominasi Pemukiman (1.198,89 Ha), Perkebunan (933,86 Ha), Tanaman campuran (578,75 Ha), ladang (443,79 Ha) dan Sawah (277,52 Ha).

2.1.1.2 Potensi Kawasan Sumber Daya

Pengembangan Potensi Kota Tebing Tinggi meliputi:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) dan Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.

2. Kawasan *hinterland* untuk menopang celah fungsi kegiatan perkotaan bagi daerah-daerah sekitarnya untuk bidang jasa dan perdagangan.
3. Kawasan Strategis Ekonomi meliputi Kawasan strategis ekonomi Bajenis-Berohol di Kelurahan Pinang Mancung.
4. Kawasan Pusat Pelayanan Kota yaitu Terminal Bandar Kajum di Kelurahan Lalang, Kelurahan Rantau Laban dan Kelurahan Mekar Sentosa di Kecamatan Rambutan.
5. Kawasan Sosial Budaya berada di pusat kota.
6. Kawasan lingkungan dan pariwisata disepanjang Sungai Padang dan Sungai Bahilang.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kota Tebing Tinggi termasuk daerah rawan bencana banjir yang terjadi akibat luapan air sungai dan rawan bencana kebakaran.

- a. Permasalahan banjir di Kota Tebing Tinggi adalah Banjir Bandang yang biasa terjadi 3-4 kali dalam setahun. Banjir tersebut diakibatkan curah hujan yang tinggi di Hulu Sungai sehingga meluap air Sungai Bahilang dan Sungai Padang. Kawasan yang berpotensi rawan bencana banjir adalah sebagai berikut:
 1. Kecamatan Rambutan meliputi Kelurahan Sri Padang, Kelurahan Tanjung Marulak, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dan Kelurahan Karya Jaya.
 2. Kecamatan Padang Hilir meliputi Kelurahan Tebing Tinggi, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Tambangan Hulu.
 3. Kecamatan Bajenis meliputi Kelurahan Bulian, Kelurahan Bandar Sakti, Kelurahan Pinang Mancung dan Kelurahan Berohol.
 4. Kecamatan Padang Hulu meliputi Kelurahan Lubuk Raya, Kelurahan Bandarsono dan Kelurahan Persiakan
 5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota meliputi Kelurahan Mandailing, Kelurahan Badak Bejuang, Kelurahan Bandar Utama, Kelurahan pasar Baru dan Kelurahan Pasar Gambir.
- b. Bencana lain yang terjadi di Kota Tebing Tinggi adalah Bencana Kebakaran. Secara umum faktor utama penyebab kebakaran adalah listrik, kompor, rokok, obat nyamuk ataupun kelalaian lainnya yang tidak dapat diprediksikan. Tantangan penanggulangan kejadian kebakaran adalah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang masih relatif dan terbatas.

Gambar 2.4
Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
Skor Risiko Bencana
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

NO.	KABUPATEN	SKOR	KELAS RISIKO	NO.	KABUPATEN	SKOR	KELAS RISIKO
1	GUNUNGSITOLI	215.60	TINGGI	18	PADANGSIDIMPUAN	128.00	SEDANG
2	MANDAILING NATAL	214.80	TINGGI	19	DELI SERDANG	127.51	SEDANG
3	NIAS UTARA	214.00	TINGGI	20	HUMBANG HASUNDUTAN	127.33	SEDANG
4	NIAS	211.70	TINGGI	21	SERDANG BEDAGAI	124.92	SEDANG
5	NIAS BARAT	210.80	TINGGI	22	TAPANULI UTARA	118.00	SEDANG
6	NIAS SELATAN	191.83	TINGGI	23	SAMOSIR	114.00	SEDANG
7	TAPANULI TENGAH	191.20	TINGGI	24	TANJUNG BALAI	114.00	SEDANG
8	SIBOLGA	167.20	TINGGI	25	KARO	112.15	SEDANG
9	TAPANULI SELATAN	165.84	TINGGI	26	DAIRI	111.21	SEDANG
10	LABUHAN BATU UTARA	155.20	TINGGI	27	PAKPAK BHARAT	107.72	SEDANG
11	PADANG LAWAS	152.76	TINGGI	28	TOBA SAMOSIR	107.20	SEDANG
12	LABUHAN BATU	151.20	TINGGI	29	BINJAI	103.20	SEDANG
13	ASAHAN	146.85	TINGGI	30	TEBING TINGGI	94.77	SEDANG
14	BATU BARA	143.20	SEDANG	31	PEMATANG SIANTAR	91.20	SEDANG
15	LANGKAT	142.62	SEDANG	32	MEDAN	97.68	SEDANG
16	PADANG LAWAS UTARA	138.00	SEDANG	33	SIMALUNGUN	80.07	SEDANG
17	LABUHAN BATU SELATAN	131.20	SEDANG				

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
<13	1	RENDAH
13 - 144	2	SEDANG
> 144	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Tahun 2022

1. Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB :
 - a. Indeks Bahaya, 2012
 - b. Indeks Jiwa Terpapar, 2012
 - c. Indeks Kerugian (Rupiah), 2012
 - d. Indeks Kerusakan Lingkungan (Ha), 2012
 - e. Indeks Kapasitas Daerah, 2022
2. Peta Dasar, BIG
3. Batas Administrasi BIG Tahun 2021

Sumber : BNPB - IRBI Tahun 2022

Dilihat dari gambar diatas, Indeks Risiko Bencana Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 sebesar 94,77 kelas risiko sedang. Indeks Risiko Bencana Tahun 2022 mengalami penurunan dari Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 sebesar 100,04 kelas risiko sedang.

Melihat potensi bencana dan kejadian bencana yang sudah terjadi di Kota Tebing Tinggi, dipandang perlu dilakukan penguatan kapasitas baik kelembagaan di tingkat kabupaten maupun masyarakat di dalam upaya pengurangan risiko bencana, penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana guna meminimalkan kerentanan yang dimiliki, serta pemetaan terhadap segala ancaman yang mungkin dapat terjadi. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah penetapan kelurahan tangguh bencana. Tahun 2021 sejumlah 2 kelurahan yaitu Kelurahan Bandar Utama dan Kelurahan Bandar Sakti. Meningkat di tahun 2022 menjadi 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Bandar Utama, Kelurahan Bandar Sakti, Kelurahan Persiakan, Kelurahan Tualang, Kelurahan Tambangan Hulu dan Kelurahan Sri Padang.

2.1.1.4 Kondisi Demografis

Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 sebanyak 177.785 jiwa yang terdiri atas 88.549 jiwa penduduk laki-laki dan 89.236 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,23.

Gambar 2.5

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi

Tahun Year	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	8 938	8 544	17 482
5-9	7 729	7 168	14 897
10-14	7 407	6 967	14 374
15-19	6 894	6 654	13 548
20-24	7 262	7 077	14 339
25-29	7 517	7 272	14 789
30-34	7 129	6 888	14 017
35-39	6 867	6 677	13 544
40-44	6 085	6 144	12 229
45-49	5 438	5 754	11 192
50-54	4 627	5 382	10 009
54-59	4 380	4 731	9 111
60-64	3 527	3 865	7 392
65-69	2 465	2 760	5 225
70-74	1 333	1 673	3 006
75+	951	1 680	2 631
Jumlah/Total	88 549	89 236	177 785

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Kepadatan penduduk di Tebing Tinggi mencapai 4,62 ribu jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 5 orang. Kepadatan penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan kepadatan sebesar 6,93 ribu jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Padang Hilir sebesar 3,55 ribu jiwa/km².

Gambar 2.6

Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km
(1)	(7)	(8)
Padang Hulu	18,89	3 946,42
Tebing Tinggi Kota	13,54	6 931,76
Rambutan	22,21	6 654,42
Bajenis	22,46	4 399,32
Padang Hilir	22,89	3 556,68
Kota Tebing Tinggi	100,00	4 625,24

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

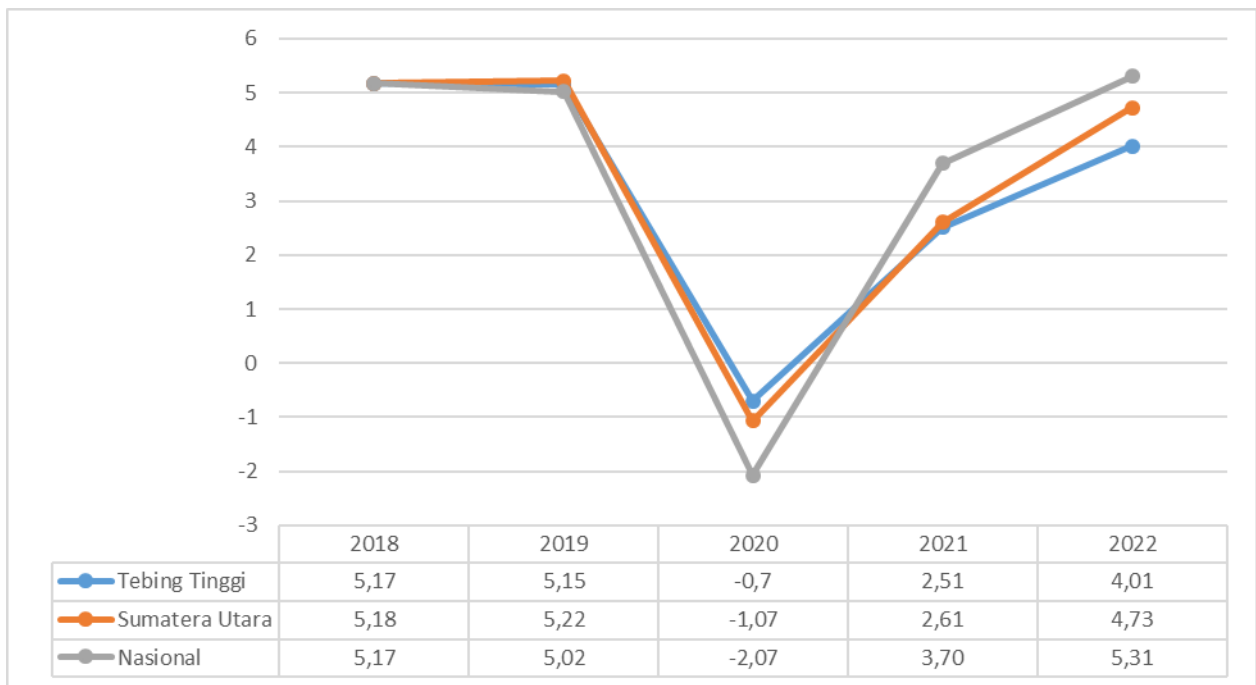
A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi khususnya pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen akibat dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi *Covid-19*. Seiring dengan mulai menurunnya *Covid-19*, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 mengalami *rebound* menjadi sebesar 2,51 persen. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 2,61 persen dan 3,70 persen.

Perbaikan ekonomi pasca pandemi menghasilkan tren yang positif pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,73 persen dan 5,31 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tidak lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022



Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 mencapai 4.186,31 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir PDRB Kota Tebing Tinggi berada pada tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19. PDRB menurut lapangan usaha pada di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53,70	55,52	56,81	57,13	59,33
B	Pertambangan dan Penggalian	6,27	6,41	6,65	6,89	7,14
C	Industri Pengolahan	484,84	493,54	492,19	500,45	506,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,11	7,50	7,88	8,18	8,55
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,07	9,38	9,34	9,40	9,72
F	Konstruksi	564,07	596,72	561,39	585,59	598,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	858,97	934,32	930,67	967,98	1.007,66
H	Transportasi dan Pergudangan	305,25	320,37	314,97	317,77	347,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	169,40	180,49	176,37	176,03	190,15
J	Informasi dan Komunikasi	98,16	104,04	111,61	118,94	130,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	179,44	182,40	187,70	198,61	206,88
L	Real Estate	307,57	316,51	322,81	323,90	339,06
M,N	Jasa Perusahaan	16,45	16,84	16,74	16,77	17,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	384,77	399,44	397,65	398,56	398,91
P	Jasa Pendidikan	230,48	241,99	245,91	250,91	263,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,25	48,65	48,17	47,40	51,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya	38,69	39,93	39,54	40,26	43,69
Produk Domestik Regional Bruto		3.760,50	3.954,03	3.926,39	4.024,78	4.186,31

Sumber : BPS- Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan dari 5.512,51 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi sebesar 6.930,27 miliar rupiah pada tahun 2022. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing

Tinggi. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor terkecil dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Secara umum seluruh sektor lapangan usaha mengalami peningkatan pada tahun 2022.

Tabel 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHRB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	70,58	74,27	78,16	79,22	86,86
B	Pertambangan dan Penggalian	7,84	8,10	8,52	8,96	9,66
C	Industri Pengolahan	706,29	726,29	724,73	776,01	850,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,72	8,30	8,72	9,12	9,71
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,30	13,77	13,79	13,99	14,61
F	Konstruksi	813,57	885,21	860,09	919,98	1.004,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.253,05	1.404,95	1.453,71	1.552,48	1.710,78
H	Transportasi dan Pergudangan	439,91	470,83	486,66	505,27	566,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,83	245,26	241,13	241,13	264,74
J	Informasi dan Komunikasi	104,01	113,32	122,43	133,88	150,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	285,76	293,24	300,38	331,40	371,30
L	Real Estat	459,40	491,46	515,02	530,97	561,72
M,N	Jasa Perusahaan	25,35	26,57	27,87	28,70	32,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	639,86	671,40	697,20	698,27	737,07
P	Jasa Pendidikan	343,91	369,61	386,58	395,68	418,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,22	68,66	70,51	69,93	78,87
R,S,T, U	Jasa Lainnya	50,91	52,97	53,65	54,97	61,69
Produk Domestik Regional Bruto		5.512,51	5.924,20	6.049,20	6.349,90	6.930,27

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Pemulihan ekonomi pasca pandemi terus membaik yang terlihat dari tumbuhnya ekonomi dari seluruh sektor lapangan usaha. Seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi dengan dua sektor mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan dan Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 9,35% (*y-o-y*). Selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan sektor Konstruksi sebesar 9,33%. Sementara itu lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menjadi sektor yang paling rendah pertumbuhannya, dengan hanya tumbuh sebesar 0,09%.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,38	2,32	0,57	3,85
B	Pertambangan dan Penggalian	3,40	2,24	3,84	3,60	3,60
C	Industri Pengolahan	2,06	5,40	5,11	3,76	4,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,95	3,36	-0,42	0,59	3,44
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,08	8,77	-0,39	4,01	4,10
F	Konstruksi	5,42	4,95	-1,69	0,89	9,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,76	6,55	-2,28	-0,19	8,02
H	Transportasi dan Pergudangan	4,95	6,00	7,27	6,58	9,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,24	1,64	2,91	5,81	4,16
J	Informasi dan Komunikasi	6,00	6,00	7,27	6,58	9,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,98	1,64	2,91	5,81	4,16
L	Real Estat	3,53	2,91	1,99	0,34	4,68
M,N	Jasa Perusahaan	1,54	2,34	-0,60	0,21	5,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,01	3,81	-0,45	0,23	0,09
P	Jasa Pendidikan	4,99	4,99	1,62	2,03	4,92

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,35	5,19	-0,99	-1,60	8,91
R,S, T,U	Jasa Lainnya	3,21	3,21	-0,99	1,83	8,51
Produk Domestik Regional Bruto		5,17	5,15	-0,70	2,51	4,01

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Sektor Lapangan Usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,68%. Kemudian sektor Konstruksi dan Industri Pengolahan menyumbang pembentukan PDRB masing-masing sebesar 14,49% dan 12,27%. Sementara itu lapangan usaha yang memiliki kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar 0,14%.

Tabel 2.4

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,28	1,25	1,29	1,25	1,25
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
C	Industri Pengolahan	12,81	12,26	11,98	12,22	12,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21
F	Konstruksi	14,76	14,94	14,22	14,49	14,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,73	23,72	24,03	24,45	24,68
H	Transportasi dan Pergudangan	7,98	7,95	8,05	7,96	8,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	4,14	3,99	3,80	3,83

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
J	Informasi dan Komunikasi	1,89	1,91	2,02	2,11	2,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,18	4,95	4,97	5,22	5,36
L	Real Estat	8,33	8,30	8,51	8,36	8,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	0,45	0,46	0,45	0,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11,61	11,33	11,53	11,00	10,63
P	Jasa Pendidikan	6,24	6,24	6,39	6,23	6,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,16	1,17	1,10	1,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,92	0,89	0,89	0,87	0,89
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

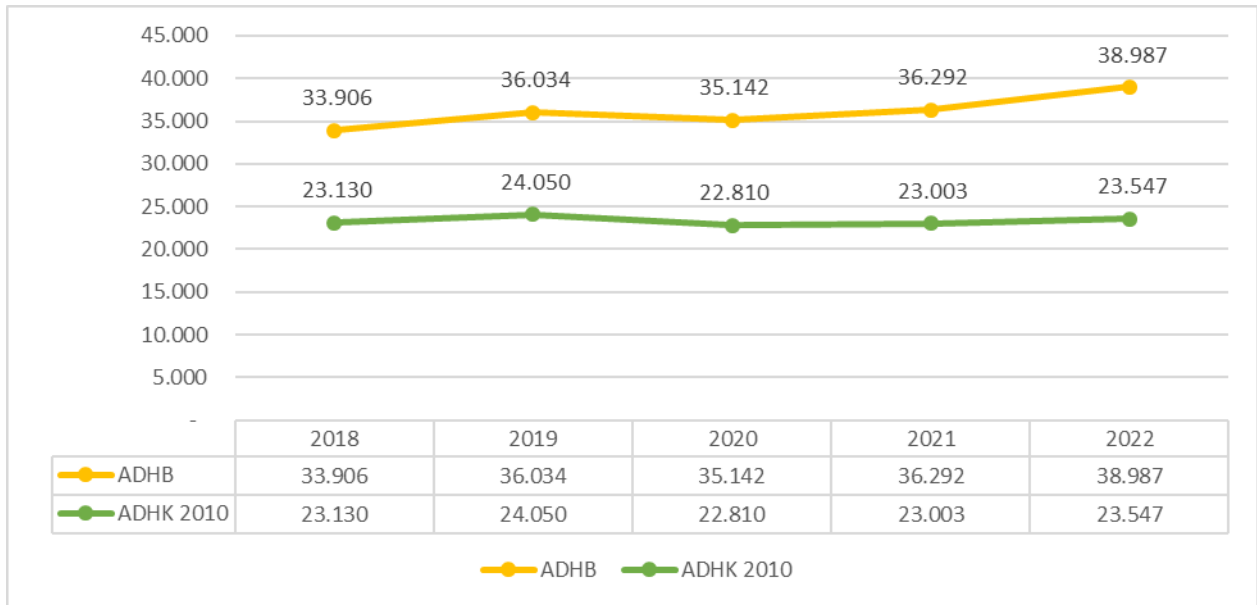
Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

B. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. PDRB Perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan dan tingkat pembangunan di suatu wilayah. Maka dari itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Gambar 2.8

PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022 Kota Tebing Tinggi (Juta Rupiah)



Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Dari data diatas diperoleh PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 sebesar Rp38.987 juta rupiah per jiwa. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp23.547 juta rupiah per jiwa per tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di Kota Tebing Tinggi lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2022. Secara umum dapat terlihat bahwa PDRB per kapita di Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2022 mengalami tren yang positif, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022.

C. Laju Inflasi

Salah satu faktor fundamental dalam Indikator Makro Ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Karena inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Untuk Kota Tebing Tinggi besaran inflasi daerah lebih dominan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti; tingginya konsumsi daerah yang tidak diimbangi oleh faktor produksi serta kondisi geografis sebagai salah satu daerah yang memiliki jarak yang cukup jauh dari ibukota provinsi serta akses jalan yang kurang baik sehingga distribusi barang menjadi terganggu.

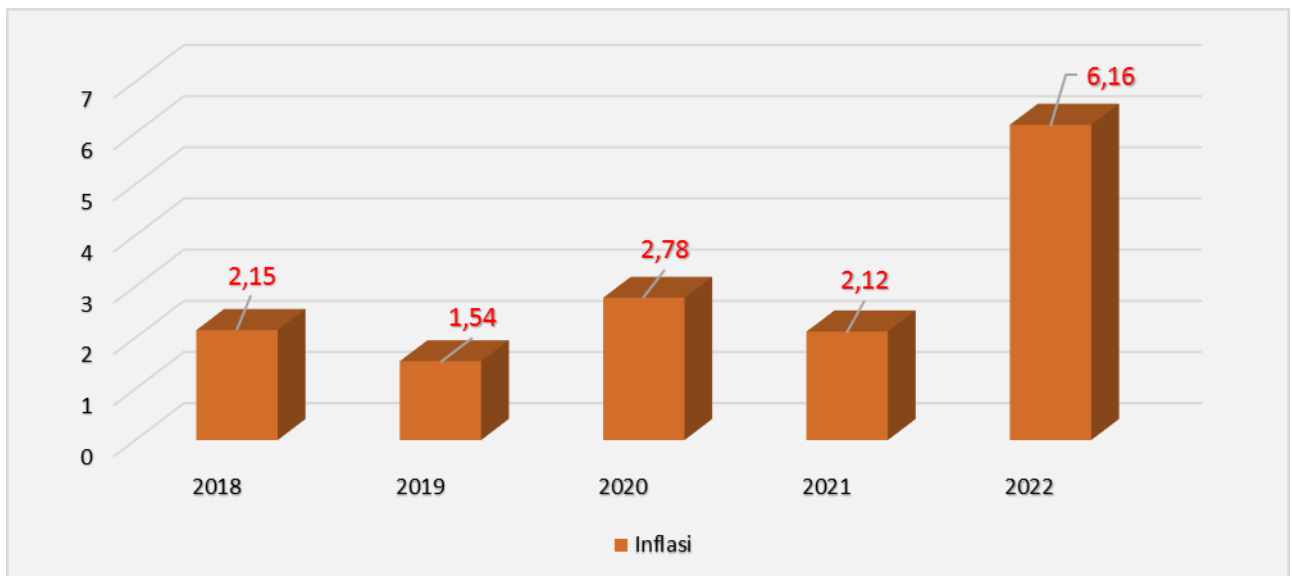
Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan faktor konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.

Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Untuk mengetahui besaran inflasi digunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat mengukur kenaikan harga-harga yang terlingkat meningkat dari tahun ke tahun. Angka inflasi Kota Tebing Tinggi menggunakan angka inflasi Kota Pematang Siantar yang merupakan *sister city* dari kota Tebing Tinggi. Angka inflasi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 6,16 persen. Diantara faktor yang menyebabkan tingginya angka inflasi tahun 2022 adalah gangguan rantai pasok dan kenaikan harga BBM.

Gambar 2.9

Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

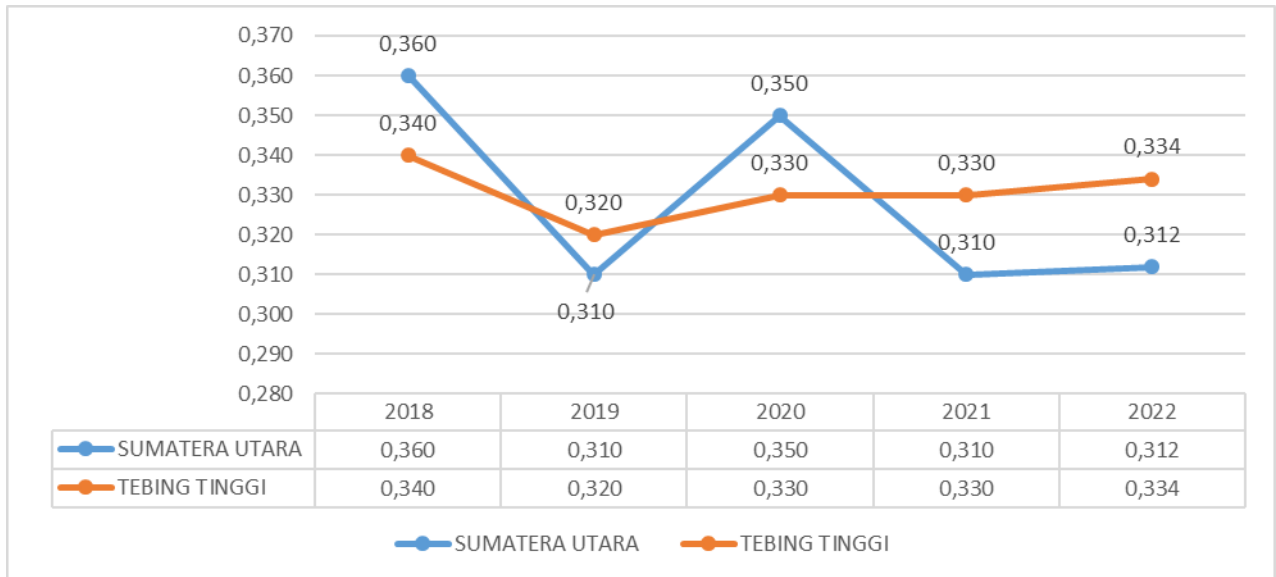
D. Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.. Sehingga teori ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pemerataan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Tebing Tinggi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- $0,00 < G < 0,35$ → Pemerataan tinggi/ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$ → Pemerataan/ketimpangan sedang
- $G > 0,50$ → Pemerataan rendah/ketimpangan tinggi

Gambar 2.10

Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2022 mencapai angka 0,334 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 meskipun masih tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

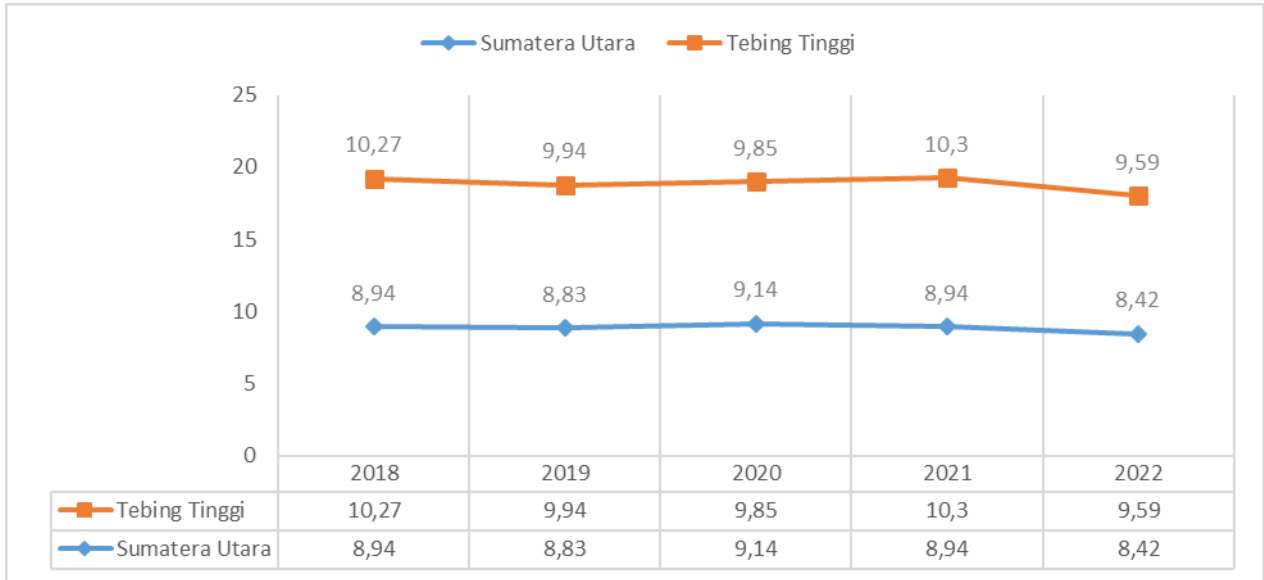
A. Angka Kemiskinan

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Jarak yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas, begitupula sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Tebing Tinggi tahun 2021 sebesar Rp 536.531 per kapita per bulan dan meningkat menjadi Rp 578.512 per kapita per bulan pada tahun 2022. Peningkatan garis kemiskinan terjadi karena adanya inflasi yang menyebabkan harga-harga kebutuhan dasar meningkat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 17.2370 jiwa menjadi 16.340 jiwa pada tahun 2022, yang mengakibatkan persentase penduduk miskin juga turun menjadi 9,59 persen. Hal ini diakibatkan karena mulai pulihnya kembali perekonomian pasca pandemi covid-19. Persentase penduduk miskin tersebut masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 8,42 persen.

Gambar 2.11

Angka Kemiskinan Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



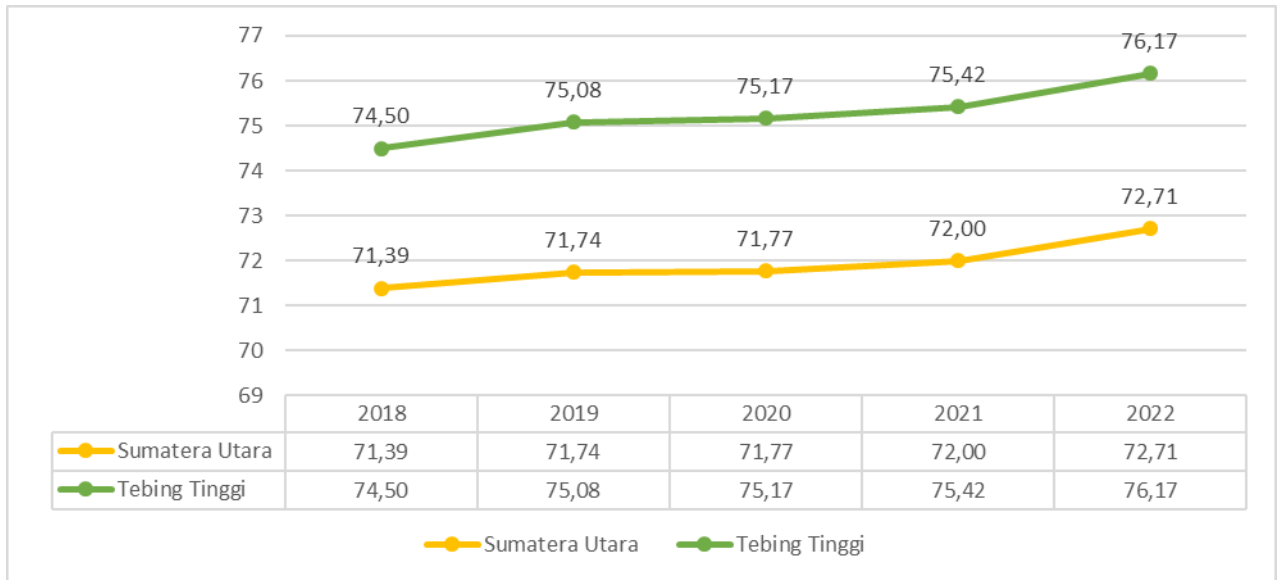
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak mampu meningkatkan kualitas manusia. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada tiga yang utama diantaranya komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar 2.15 dibawah ini.

Gambar 2.12

IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

IPM Kota Tebing Tinggi dari periode 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 IPM Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 76,17 poin sedangkan IPM Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 72,71 poin. IPM Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 0,75 poin atau 0,99 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 75,42 poin. Artinya nilai IPM Kota Tebing Tinggi termasuk dalam kategori tinggi dimana terdapat peningkatan dalam tiga indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.

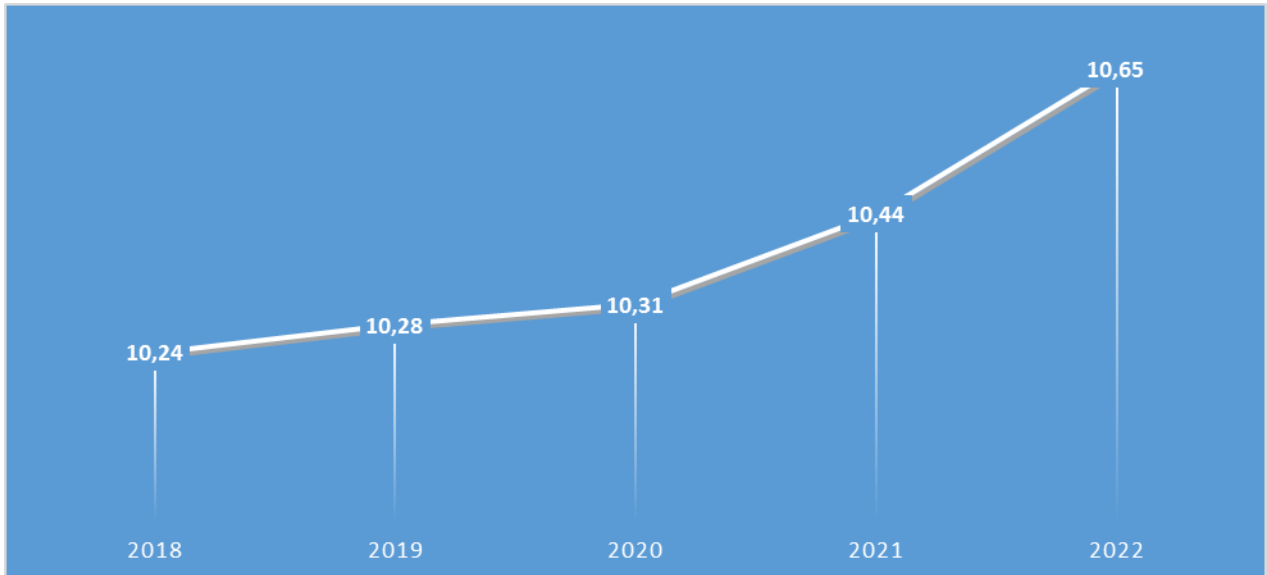
a. Rata Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk (usia 25 tahun ke atas) dalam menjalani pendidikan formal. Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata lama sekolah di Kota Tebing dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2022 rata-

rata lama sekolah di Kota Tebing Tinggi sebesar 10,65 tahun, naik 0,21 tahun dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2021, yaitu sebesar 10,44 tahun.

Gambar 2.13

Rata-rata Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022



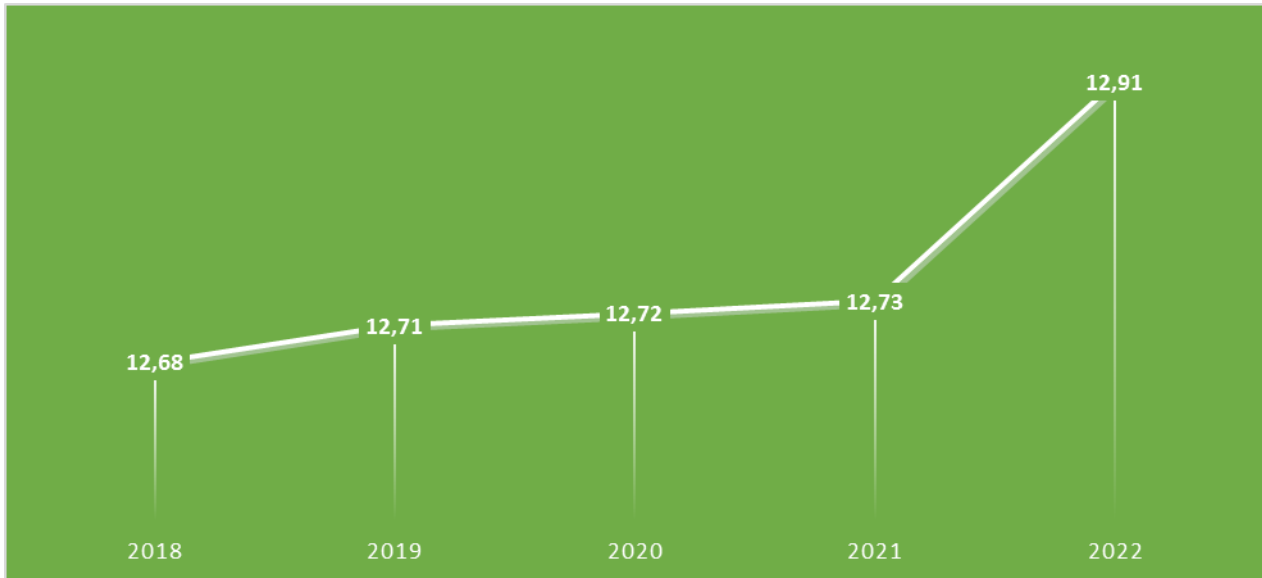
Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

b. Harapan Lama Sekolah

Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi selalu meningkat jika dilihat pada periode 2018-2022. Pada tahun 2018 harapan lama sekolah di Kota Tebing Tinggi tercatat 12,68 dan meningkat terus hingga pada tahun 2021 menjadi 12,91. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk berusia 7 tahun pada tahun 2022 memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan hingga 12,91 tahun artinya seorang anak diharapkan bisa merasakan lamanya sekolah selama hampir 13 tahun.

Gambar 2.14

Harapan Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

2. Kesehatan

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya, dimana salah satu dari tujuan pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat.

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

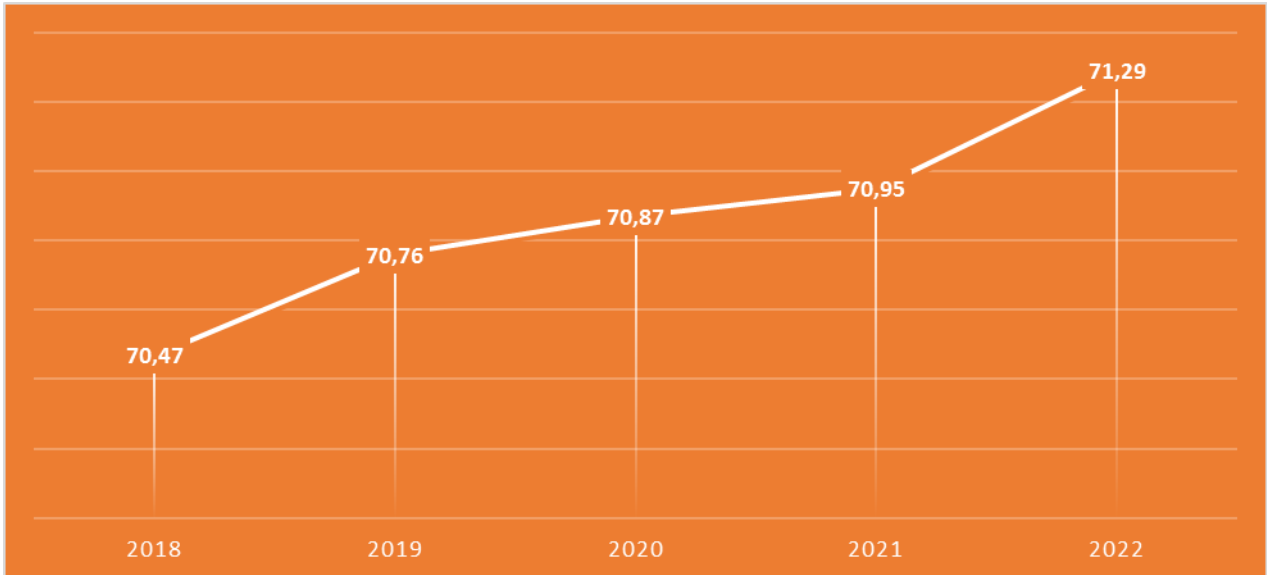
Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Secara umum, tingkat kesehatan penduduk satu wilayah juga dapat dinilai dari Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan..

Disamping itu, adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Angka harapan hidup penduduk Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2018 AHH Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 70,47 sedangkan pada tahun 2022 AHH Kota Tebing Tinggi meningkat menjadi 71,29. Peningkatan angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi

sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.15

Angka Harapan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita dengan gizi buruk pada Tahun 2018 mencapai 0,12% mengalami kenaikan menjadi 0,26% pada Tahun 2020, tetapi menurun bahkan sampai di titik 0% pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 persentase balita dengan gizi buruk tersebut telah mendorong Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk terus meningkatkan pelayanan bidang kesehatan sehingga angka dapat ditekan.

Pada Tahun 2022, prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 92,88% mengalami kenaikan drastis dibandingkan data pada Tahun 2021 sebesar 4,25%. Semakin meningkatnya prevalensi balita gizi kurang ini perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

Tabel 2.5

Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase balita gizi buruk	0,12	0,00	0,00	0,00	0,17
2	Prevalensi balita gizi Kurang (%)	2,13	2,37	6,62	3,29	6,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

c. Angka kematian ibu

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator kesehatan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus melakukan terobosan di bidang pelayanan kesehatan. Pada tahun 2021 dilaporkan 5 (lima) kematian ibu, tetapi pada tahun 2022 dilaporkan mengalami peningkatan jumlah kematian ibu menjadi 8 (lima) kematian ibu.

d. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi di Kota Tebing Tinggi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah kematian bayi adalah sebesar 16 kasus sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 20 kasus. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi.

e. Angka kesakitan

Angka kesakitan dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pada tahun 2018 angka kesakitan Di Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 9,52%, pada tahun 2019 sebesar 11,49%, pada tahun 2020 sebesar 8,99% dan pada tahun 2021 sebesar 14,78%.

3. Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja dan Pengangguran Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenaga kerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan dari sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.6

Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi

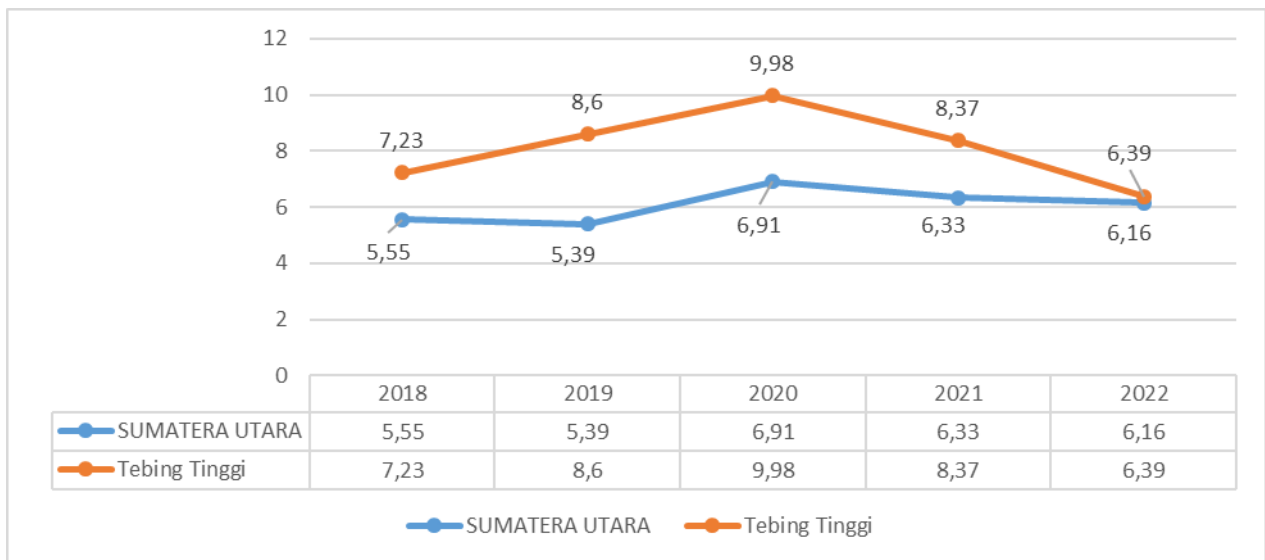
No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk usia kerja 15 Tahun ke atas (jiwa)	117.239	118.995	126.080	128.101	130.074
2	Angkatan kerja (jiwa)	80.439	79.388	87.334	86.065	100.49
3	Bekerja (jiwa)	74.624	72.557	78.615	78.861	94.072
4	Pengangguran (jiwa)	5.815	6.831	8.719	7.204	6.421
5	Bukan angkatan kerja (jiwa)	36.800	39.607	38.746	42.036	29.581
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	68,61	66,71	69,26	67,18	77,26

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,39 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.16

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

2.1.2.3 Seni Budaya Dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap beberapa indikator seni budaya, dan olahraga yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Kebudayaan

Berkaitan dengan perkembangan seni budaya di Kota Tebing Tinggi jumlah grup kesenian yang ada di Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2022, seperti yang tertera pada gambar berikut ini:

Tabel 2.7

Jumlah Seni Budaya dan Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gedung Olah Raga	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.8

Organisasi Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Organisasi Kepemudaan	24	24	24	24	24
2	Organisasi Olahraga	1	4	12	16	17

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.9

Banyaknya Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tebing Tinggi

No	Jenis Olah Raga	Keterangan
1	Sepak Bola	Lapangan Sepakbola Stadion Ramlan yatim
		Lapangan Sepakbola Stadion kampung durian
2	Bola Volley	Gedung Olahraga Asber Nasution
		Gedung Olahraga Marahalim
3	Badminton	Gedung Olahraga Marahalim
4	Bola Basket	Gedung Olahraga Asber Nasution
5	Tennis	Leuser tennis Court

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2018-2022 Kota Tebing Tinggi

NO	URAIAN	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Jenjang Pendidikan						
1	SD/MI						
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	Orang	21.013	20.637	20.245	19.799	19.187
1.2.	APK SD/MI	%	117,36	114,35	110,25	114,01	110,45
2	SMP/MTs						
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	11.797	12.094	11.996	12.096	11.101
2.2.	APK SMP/MTs	%	136,43	128,93	135,04	145,04	132,93

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel di atas APK jenjang SD/MI/Sederajat untuk tahun 2022 tercatat sebesar 110,45 persen, lebih besar kecil dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 114,01 persen. Untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat APK tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 tercatat 145,04 persen turun menjadi 132,93 persen pada tahun 2022.

2. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun

dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Pada umumnya pada tingkat pendidikan dasar tingkat partisipasi sekolah masih cukup tinggi, namun angka ini akan semakin turun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi

Partisipasi sekolah penduduk erat kaitannya antara lain terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Penyebab utama tidak/putus sekolah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada umumnya adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang mendukung, disamping karena faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan, sarana dan prasarana di daerah yang kurang mendukung dan faktor psikologis.

Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs, APS mengalami peningkatan.

Tabel 2.11

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tebing Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APS SD/MI	118,61	116,30	121,82	120,78	114,94
2	APS SMP/MTs	117,21	103,16	89,52	101,65	101,13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Pada tabel di atas menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Tebing Tinggi bersifat fluktuatif. Dimana pada usia 7-12 tahun turun dari 120,78 persen pada tahun 2022 menjadi 114,94 persen pada tahun 2022, pada kelompok umur 13-15 mengalami sedikit penurunan dari 101,65 persen pada tahun 2021 menjadi 101,13 persen pada tahun 2022.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Tabel 2.12

Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Jenjang Pendidikan						
1	SD/MI						

1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	Orang	21.131	21.131	20.822	20.387	19.187
1.2.	APM SD/MI	%	98,04	98,69	98,04	98,26	99,57
2	SMP/MTs						
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	11.374	11.374	11.835	12.215	11.101
2.2.	APM SMP/MTs	%	83,98	83,01	82,62	82,41	98,85

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI mengalami kenaikan dimana tahun 2021 tercatat 98,1 persen naik menjadi 99,57 persen pada tahun 2022. Sementara untuk Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 mengalami peningkatan dimana tahun 2021 tercatat sebesar 83,06 persen naik menjadi 98,85 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya peraturan yang mengatur untuk penerimaan siswa baru untuk tingkat SD harus berumur 7 tahun dan tidak menerima siswa baru dibawah umur 7 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP minimal sudah berumur 13 tahun.

4. Fasilitas Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Tabel 2.13

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah (jiwa) Kota Tebing Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio SD/MI	144	166	169	164	147
2	Rasio SMP/MTs	184	258	263	261	232

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kota Tebing Tinggi, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.14

Rasio Guru dan Murid Kota Tebing Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio SD/MI	18	18	18	19	19
2	Rasio SMP/MTs	18	18	17	17	17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja bidang pendidikan, program dan kegiatan yang mendukung kualitas dan aksesibilitas pendidikan semakin terus dioptimalkan. Kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menerima masukan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan terus dijalin.

5. Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan/ SPM Pendidikan

Adapun Indikator Kinerja Bidang Pendidikan/ SPM pendidikan untuk capaian tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 15

Indikator Kinerja Bidang Pendidikan/ SPM pendidikan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	68,92	76,70	100,00	100,00
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,14	99,98	100,00	100,00
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	2,87	7,56	100,00	100,00
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	51,09	53,58	56,26	58,94
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	37,21	39,87	41,46	43,06

6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	64,29	63,81	67,00	70,19
7	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	64,29	63,81	66,36	68,91
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	40,00	35,56	35,39	35,62
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	70,25	70,25	79,18	80,38
10	Indeks Iklim Keamanan SD	70,37	69,76	73,30	76,84
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	60,46	69,12	71,61	74,10
12	Indeks Inklusivitas SD	53,61	55,76	58,86	61,96
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	70,37	72,43	75,77	79,11
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	60,46	67,75	69,96	72,17
15	Indeks Inklusivitas SMP	53,61	55,58	58,68	61,78

Capaian Indeks SPM- Rapor Pendidikan Daerah Versi 2.0 Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2022

Nama Kab/Kota	Indeks SPM	Peningkatan Tertinggi	Capaian Terbaik	Capaian terendah
Kota Tebing Tinggi	63,82 (Tuntas Muda)	Kemampuan Numerasi (SD Umum)	Angka partisipasi sekolah (Umur 7-15)	Angka partisipasi Sekolah (Umur 5-6)

Untuk capaian indikator Bidang pendidikan Kota Tebing Tinggi sudah diatas 50 persen, dan menempati urutan nomor empat terbaik se Provinsi Sumatera Utara.

B. Kesehatan

Bidang kesehatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah. Ketersediaan tenaga kesehatan

serta didukung oleh sarana kesehatan yang memadai menjadi syarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Tabel 2.156

Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka kematian ibu	3	1	5	8	1
2	Angka kematian bayi	15	19	16	20	17
3	Angka kesakitan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,8	2	3,6	3,9	6,53
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	5,8	2,2	3,6	11	6,53
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	3,8	10,8	25,2	-	4,9
7	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	1,8	0,6	6,7	-	1
8	Rasio posyandu per satuan balita	0,83	0,8	0,73	0,8	77,08
9	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	5,4	5,4	5,2	5,2	4,023
10	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	4,2	4,2	3,47	4,2	29,5
11	Rasio dokter per satuan penduduk	77,5	79,2	86,6	88,4	3,766
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang	72,6	67,4	85,1	83	NA



NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	ditangani (%)					
13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	92,5	92,7	88,3	89	89
14	Cakupan desa/kelurahan (UCI)	100	100	48,57	100	62,9
15	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	1	17/17	0	0	100
16	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	71,6	71,3	78,6	82,4	88,9
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	17,5	23,2	18,1	17,4	100
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	08,5%	43,30%	40,7	43,5 %	55%
		100%	100%	100%	100%	100 %
19	Tingkat prevelensi tuberkulosis (Per 100.000 penduduk) tingkat kematian karena	1,4 %	2,1 %	2,7 %	3,7 %	0,42
20	Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) proporsi jumlah kasus	286	235	222	273	NA
21	Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS proporsi kasus	91,6	91,5	93,2	BLM DAPAT DIEVALUASI	77,5



NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam					
22	Program DOTS	-	-	-	-	-
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	298	515	42	87	100
24	Penderita diare yang ditangani	2025	1716	1293	1437	100
25	Prevalensi HIV /AIDS (Persen) dari total populasi (KASUS)	0,7 %	0,8 %	0,7%	1,2 %	0,0006%
		32 KASUS	31 KASUS	1 KASUS	51 KASUS	NA
26	Cakupan kunjungan bayi (%)	94,9	99,6	98,4	87	92
27	Cakupan puskesmas	9	9	9	9	9
28	Cakupan pembantu puskesmas	14	14	14	14	14
29	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	3163 Org	3065 Org	2991 Org	2601 Org	91%
30	Cakupan pelayanan nifas (%)	92,4	92,2	88,0	65,3	87,4
31	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	71,8	67,4	85,1	73	92
32	Cakupan pelayanan anak balita (%)	81,54	91,4	91,6	69	72
33	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga	199/199	268/268	422/422	362/351	3,81

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	miskin (%)					
34	Cakupan penjarangan kesehatan siswa sd dan tingkat (%)	94,6	20,04%	0	0	52,5 %
35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	79,45	79,80	77,13	80,26	100 %
36	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan juga dapat ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya: lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, faktor genetik dan perilaku hidup sehat. Di antara empat faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena pelayanan kesehatan lebih terkait dengan upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, dan edukatif.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah persentase panjang jaringan dalam kondisi baik di Kota Tebing Tinggi yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Drainase sebagai pendukung prasarana jalan di Kota Tebing Tinggi, hanya terdapat di beberapa ruas saja terutama di wilayah perkotaan yang tersedia. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri dan untuk mengantisipasi banjir.

Kota Tebing Tinggi yang memiliki sejumlah area persawahan, telah dilengkapi dengan jaringan irigasi, dan semua indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.167

Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,73%	82,5%	83,25%	84,31%	99,43%
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	60,79%	75,13%	79,02%	82,9%	89,50%
3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	76%	76%	83,04%	84,02%	84,21%
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air	2,13%	2,97%	4,98%	9,06%	8,82%
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	20,91%	21,9%	42,01%	55,47%	55,47%
6	Persentase titik genangan air	52,5%	47,5%	40%	40%	81,25%
7	Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	32,56%	33,08%	30,65%	20,15%	49,63%
8	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	96,99%	96,25%	93,16%	97%	55,47%
9	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	58,67%	58,67%	58,67%	58,67%	53,80%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk Sistem Pengoperasian TPA Sampah berfluktuasi dari tahun ke tahun sedangkan pada Jalan yang terpasang LPJU mencapai berfluktuasi.

Tabel 2.17

Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jalan yang terpasang LPJU (%)	79,88	75	80,05	85	87

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Tebing Tinggi

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan.

Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat. Selain dengan jumlah personel Polisi Pamong Praja.

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat.

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi bertugas untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat lingkungan, adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 100%, seluruh persoalan dapat diselesaikan secara efektif.

Tabel 2.189

Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Cakupan Penyelesaian Pelanggaran	80 %	80 %	85 %	80 %	90 %
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	100%	80%	85%	90%	90%

Sumber : Dinas Satpol PP Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.20

Indikator Bencana Kebakaran Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
----	-----------	------	------	------	------	------

1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Tebing Tinggi	75%	75%	76%	78%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen	75%	75%	76%	78%	75%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi

F. Sosial

Pelaksanaan bidang sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebesar 100%. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya adalah sebesar 38%.

Perkembangan indikator sosial ini dapat digunakan oleh perangkat daerah dalam rangka pembangunan sosial Kota Tebing Tinggi. Pembangunan bidang sosial ini cukup penting dimana manusia sebagai subjek pembangunan perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Tabel 2.191

Indikator Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi

N	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha	21 %	53%	38%	0	100 %
3	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	100 %	88%	82%	100 %	N/A
---	---	-------	-----	-----	-------	-----

Sumber : Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Angka sengketa pengusaha-pekerja tercatat sebanyak 10 kasus Sedangkan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tercatat 100%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 70%. Kondisi ini perlu dipertahankan demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di Kota Tebing Tinggi.

Tabel 2.202

Indikator Bidang Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (kasus)	10	10	4	0	4
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%)	70	100	100	0	0
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	47,46	80	50	90	85,09

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi

Angka sengketa pengusaha-pekerja tercatat 0 (nihil) kasus pada tahun 2021. Sedangkan di tahun 2022 sebesar 4 (empat) kasus yakni:

1. PT.BTPN Kota Tebing Tinggi

2. Indah Logistic Kargo
3. PT.ADEI
4. PT. Sri Pamela

Keempat kasus tersebut dapat diselesaikan dengan menempuh cara fasilitasi antara perusahaan dengan pekerja. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian tidak ada, karena nihilnya angka sengketa di tahun 2022. Di tahun 2022 besaran kasus yang diselesaikan sebesar 0 (nihil) %. Kondisi ini perlu dipertahankan demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di Kota Tebing Tinggi. Untuk besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek menurun menjadi 85,09%, data tersebut diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Tabel 2.213

Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kursi DPRD diduduki	3	1	1	1	1
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	4%	4%	4%	4%	4%
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus	27,10%	0%	0%	1,69%	90,5%
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	50,00%	48,00%	2,27%	56,25%	7,54%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tebing Tinggi

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 2.224

Ketersediaan Pangan Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Beras					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	177,2	222,7	245,5	220,3	221,5
2	Jagung					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	2,1	0,7	0,8	0,8	1,1
3	Kedele					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	14,7	11	22,6	10,8	11,5
4	Daging Sapi					
	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	6,3	5,5	5,6	5,4	7,5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

D. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut. Indeks lingkungan hidup pada RKPD 2024 Kota Tebing Tinggi ini memfokuskan pada indeks kualitas air di Kota Tebing Tinggi dan indeks kualitas udara.

Tabel 2.235

Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	70	96,33	100	54,45	63,33
2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara	83,57	77,6	78,16	84,67	81,51
3	Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan	47,28	47,28	47,28	25,39	22,54
4	Sistem Pengoperasian TPA Sampah (%)	-	-	-	73,03	Control landfill

5	Rasio RTH (%)	-	-	-	21,16	34,58
---	---------------	---	---	---	-------	-------

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

Dari indikator di atas dapat dilihat Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 63,33 artinya kualitas air bagus, sedangkan Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara pada tahun 2022 menjadi 81,51 berarti kondisi udara cukup bagus dan Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan menurun pada tahun 2022 menjadi 22,54, hal ini menunjukkan bahwa keadaan luas hutan di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan. Pada Tahun 2023 Sistem Pengoperasian TPA Sampah (jenis/bentuk) telah mengalami peningkatan dengan menggunakan metode Control landfill.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak azasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kematian. Layanan akta catatan sipil mengalami kenaikan, antara lain disebabkan adanya upaya peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan semua dokumen kependudukan sebagai syarat wajib administrasi pemerintahan.

Tabel 2.246

Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan kartu keluarga	96,05%	95,23%	96,28%	96,83%	85,07%
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	98,30%	99,11%	98,91%	99,55%	96,60%
3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	61,78%	62,86%	63,87%	64,82%	66,54%
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	5.362	6.601	7.745	9.551	10.958
5	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta nikah	62,90%	66,48%	69,56%	72,46%	76,31%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi

F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan

manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (*Total Fertility Rate/TFR*). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR. Seterusnya dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. Capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.257

Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,14%	2,14%	2,14%	2,28%	2,1%
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan	7	9	10	10	30
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2,09
4	Rasio Akseptor KB	76,36%	73,34%	78,34%	78%	50,7%
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di	0,52%	0,58%	0,56%	0,42%	0,43%
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet</i>)	17,59%	16,54%	16,28%	11,76%	31,34%
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28,2%	28,5%	30%	32,6%	32,10%
8	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian	76,36%	73,34%	78,3%	78%	50,7%
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80 %	83%	83%	84,5%	100%
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	78%	78%	80%	80,5%	59,02%
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	58%	58%	59%	59%	60,58%
12	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	75%	76%	78%	78%	396 Org

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%
14	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan elayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tebing Tinggi

G. Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan, hal yang menjadi kendala di Kota Tebing Tinggi adalah minimnya trayek yang mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu-lintas pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Jumlah arus penumpang di Kota Tebing Tinggi berkisar di angka 600 ribuan penumpang, dengan perubahan fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Kondisi jumlah penumpang, jumlah armada angkutan umum yang beroperasi, izin trayek dan jumlah KIR angkutan umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.268

Capaian Indikator Perhubungan Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	916.880	1.080.000	648.000	688.000	787.542
2	Rasio ijin trayek	90	1:7.068.739	1:4.009.805	1:4.689.805	1:3.187.862
3	Jumlah uji kir angkutan Umum	2323	163	200	99	115
4	Jumlah Terminal	Tipe 5	2	2	2	2

NO	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	bis	(sub)				
5	Persentase layanan angkutan darat	87,42	21,8	52,4	53,40	53,7
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	88	87,7	58,5	37	47,91
7	Pemasangan rambu-rambu	6	14	68	3	4
8	Jumlah orang melalui bandara/terminal per tahun	63.720	53.460	12.516	17.280	10.469

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

H. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wahana penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mendorong pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi ini. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan di Kota Tebing Tinggi mencapai 5 kelompok.

Tabel 2.279

Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan pengembangan & pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tk.	100%	100%	80%	80%	NA

Sumber : Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi

I. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan

pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Tabel 2.30

Capaian Indikator Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	-	10	24	40	45
	PMA (unit)	-	-	-	2	2
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (juta rupiah)	148,774.00	108,431.56	970,108.92	3,220,943.63	93,396.18
	PMA (US \$)	0	0	0	0	236,046,897.00
3	Rasio daya serap tenaga kerja	0	654	1.525	1,539	1,941

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi

J. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda.

Pada tahun 2022 Organisasi Kepemudaan di Kota Tebing Tinggi tidak ada perubahan dari tahun 2021 yang tercatat sebanyak 24 organisasi. Pada tahun 2022 kegiatan kepemudaan dilaksanakan 5 kali kegiatan sementara pada tahun 2020 tidak ada kegiatan kepemudaan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 begitu juga dengan kegiatan olahraga. Organisasi olahraga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 organisasi olahraga tercatat 16 kelompok naik menjadi 17 kelompok pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.281

Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2021

NO	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Organisasi Kepemudaan	24	24	24	24	24

2	Organisasi Olahraga	1	4	12	16	17
3	Gedung Olahraga	5	5	5	5	5

Sumber : Dispora Kota Tebing Tinggi

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kota Tebing Tinggi dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif.

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olahraga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Peningkatan prestasi diharapkan dapat mendorong kemajuan khususnya pembangunan pemuda secara lebih luas.

Tabel 2.292

Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	n/a	137	137	52	131,27
2	Persentase wirausaha muda (%)	n/a	0	0	0	8,51
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	n/a	0	0	0	0
4	Cakupan Pembinaan atlet muda (%)	n/a	0	0	0	0
5	Jumlah atlet berprestasi (Org)	n/a	146	69	20	66
6	Jumlah prestasi olahraga (Cabor Beregu)	n/a	4	3	3	11

Sumber : Dispora Kota Tebing Tinggi

K. Statistik

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain untuk perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi juga dibutuhkan oleh kalangan seluruh pemangku kepentingan untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi yang beragam, rinci, akurat dan mutakhir. Tuntutan kebutuhan data dan informasi tersebut belum terpenuhi seluruhnya, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam upaya pemenuhan data statistik daerah, pemerintah Kota Tebing Tinggi telah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi untuk membentuk suatu sistem data dan statistik yang terintegrasi.

L. Bidang Kebudayaan

Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya.

M. Bidang Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun di Kota Tebing Tinggi cenderung meningkat dari setiap Tahun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu terus melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat demi meningkatnya pengetahuan dan ilmu masyarakat serta melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.303

Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per Tahun	171.313	242.405	237.851	79.474	97.677
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Eksempler)	49.978	45.785	54.542	55.204	58.094
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	21.358	21.446	23.266	23.597	25.042

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi

N. Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan bidang kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Tabel 2.314

Indikator Kearsipan Kota Tebing Tinggi

		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

1	Jumlah Unit Kearsipan yang dibina penataan Arsi	7	9	12	7	12
---	---	---	---	----	---	----

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi

2.1.3.3 Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Kota Tebing Tinggi dalam hal ini diproyeksikan untuk menjadi kota jasa, produk pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) menjadi unggulan utama kawasan wisata ini. Pengembangan sektor pariwisata dapat diarahkan menjadi Tebing Tinggi MICE City. Selain itu, diperlukan pula terobosan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata agar kota Tebing Tinggi tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

B. Pertanian

Kota Tebing Tinggi merupakan daerah yang sebagian besar memiliki kenampakan berupa perkotaan. Sebagian daerah Kota Tebing Tinggi bukan merupakan daerah pertanian, namun masih terdapat beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Dewasa ini perubahan lahan pertanian menjadi lahan perumahan cukup masif terjadi seiring dengan terjadinya perkembangan dan penambahan konsentrasi penduduk di kota. Hal ini sejalan dengan data yang disajikan dibawah ini, bahwa kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi dari Tahun ke Tahun semakin menurun.

Tabel 2.325

Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi

Tahun	Pencapaian Kontribusi
2018	1,27 %
2019	1,28 %
2020	1,25 %
2021	1,29 %
2022	1,25 %

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Permasalahan untuk menyediakan ketersediaan pangan secara mandiri dan juga keberlanjutan lingkungan yang baik, maka diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk sementara ditanami tanaman produktif, intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai keamanan pangan dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Tebing Tinggi. Ini bisa menjadi inovasi dalam mendukung produksi pangan skala rumah tangga. Implementasi hal ini akan mendukung bagi terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang makin produktif, hijau dan nyaman.

C. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang potensial di Kota Tebing Tinggi, belakangan ini sektor perdagangan terus menunjukkan tren perkembangan yang cukup. Hal ini ditunjukkan dengan besaran kontribusi sektor ini terhadap PDRB yang mencapai 22,73% di Tahun 2018 dan kemudian kontribusinya meningkat menjadi 24,68% di Tahun 2022. Hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dapat menggenjot kembali sektor perdagangan guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Tabel 2.336

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi

Tahun	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2018	22,73
2019	23,72
2020	24,03
2021	24,45
2022	24,68

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Dalam rangka peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB maka haruslah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, pembinaan, penataan dan pengelolaan pasar serta adanya jaminan kebenaran pengukuran terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau UTTP dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan. Untuk menunjang sektor perdagangan di Kota Tebing Tinggi saat ini telah didukung dengan adanya UPTD. Pasar dan UPTD. Metrologi.

D. Perindustrian

Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan Kota Tebing Tinggi terhadap PDRB dari Tahun ke Tahun cenderung mengalami penurunan selama periode 2018 – 2022. Jika pada Tahun 2018 sektor industri bisa memberikan kontribusi sebesar 12,81 % terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi, di Tahun 2022 kontribusinya mengalami penurunan hanya menjadi sebesar 12,27 %. Hal ini secara langsung harus dapat dijawab oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan mengarahkan pembangunan dan menerapkan kebijakan yang tepat pada sektor perindustrian sehingga sektor ini dapat kembali menunjukkan perkembangan

Tabel 2.347

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Tahun	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
2018	12,81%
2019	12,26%

Tahun	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
2020	11,98%
2021	12,22%
2022	12,27%

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

E. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Persentase koperasi aktif di Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik koperasi itu sendiri, UMKM, usaha mikro dan usaha kecil.

Tabel 2.358

Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Tebing Tinggi

No.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahu				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	102	102	102	106	120
2	Jumlah Koperasi (unit)	228	231	228	230	246
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	45	46	44,74	46,09	48,78
4	Usaha Mikro (unit)	10.745	10.745	10.745	10.745	13.263
5	Jumlah UMKM (unit)	11.550	11.550	11.550	11.550	13.263
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	93	93	93,03	93,03	100

Sumber : Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi

2.1.3.4 Urusan Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan

Terkait urusan perencanaan pembangunan, terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Beberapa indikator tersebut antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, dan tersedianya dokumen perencanaan RKPPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.

Tabel 2.369

Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Perencanaan Pembangunan						

NO	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Tebing Tinggi

B. Keuangan

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki.

Tabel 2.40

Indikator Keuangan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Hasil Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Jumlah Program yang tidak dilaksanakan	0	0	1	4	1
3	Jumlah Kegiatan yang tidak dilaksanakan	16	5	11	47	9
4	Persentase belanja pendidikan (%)	28,18	28,74	23,32	86,39	27,98
5	Persentase belanja kesehatan (%)	18,90	20,70	34,57	66,86	19,77
6	Persentase belanja langsung (%)	59,11	61,98	70,84	71,37	56,08

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
7	Persentase belanja tidak langsung (%)	40,89	38,02	76,44	89,62	43,92

Sumber : BPKPD Kota Tebing Tinggi

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemko Tebing Tinggi telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin. ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah meningkat dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jumlah jabatan administrasi dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menurun.

Tabel 2.371

Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	15 JP	15 JP	16 JP	2 Bln	35 JP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	34,53%	29,19%	73,86%	2,26%	21,75%
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Structural	34,89%	39,38%	42,88%	45,71%	49,06%
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada	32	31	31	31	34
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	117	116	116	118	120
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1523	1426	1420	1337	1190

Sumber : BKPSDM Kota Tebing Tinggi

D. Pengawasan

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persentase penyelesaian tindak lanjut Inspektorat Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun mencapai 100% BPK RI melaksanakan pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Untuk Opini atas laporan keuangan Kota Tebing Tinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.382

Opini BPK Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kota Tebing Tinggi

2.1.3.5 Urusan Pendukung

A. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD.

Tabel 2.393

Indikator Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahu				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Hearing Dialog antara Pejabat Daerah/Tokoh Masyarakat dan Agama	2	4	4	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

B. Sekretariat Daerah

1. Predikat SAKIP

Dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022, predikat SAKIP di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.404

Predikat SAKIP Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Predikat SAKIP	CC	CC	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator atas kondisi pelayanan publik. Angka diperoleh dari penilaian oleh masyarakat atas tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diterima. Peningkatan yang dapat dilihat pada table dibawah ini merupakan bukti nyata terjadinya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan dan perlu untuk terus ditingkatkan.

Tabel 2.415

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022

		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,10	84,50	86,34	88,75	92,25

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi

2.1.4 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah merupakan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan pada Tahun 2022 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 68,33% terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Tebing Tinggi sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga

(atas dasar harga berlaku) di Kota Tebing Tinggi mencapai Rp4.735.946,63 yang meningkat sekitar 10,33 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.426

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi

Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.027.799,87	4.172.534,36	4.194.447,80	4.292.560,01	4.735.946,63
Produk Domestik Regional Bruto	5.512.517,21	5.924.199,35	6.049.163,10	6.349.945,28	6.931.266,73
Persentase Terhadap PDRB (%)	73,07	70,43	69,34	67,60	68,33

Sumber : BPS – Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Pengeluaran per kapita penduduk Kota Tebing Tinggi untuk makanan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 18.306 menjadi 639.758 di tahun 2022. Penurunan juga terjadi pada pengeluaran kelompok non makanan, yaitu sebesar 63.393 atau sebesar 9,44%. Pengeluaran untuk keperluan makanan merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Kota Tebing Tinggi tahun 2022 sebesar Rp1.247.833,00 terdiri atas pengeluaran untuk makanan Rp639.758,00 (51,27%) dan untuk bukan makanan Rp608.075,00 (48,73%). Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2021 sebesar Rp1.329.533,00 terdiri atas pengeluaran untuk makanan Rp658.064,00 (49,50%) dan untuk bukan makanan Rp671.468,00 (50,50%). Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Jika dilihat untuk tahun 2022 pengeluaran makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran non makanan sehingga dapat diasumsikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi tidak lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2021.

Tabel 2.437

Pengeluaran per Kapita Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Pendapatan per kapita				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Makanan	Rupiah	n/a	540.712	643.558	658.064	639.758

2	Bukan Makanan	Rupiah	n/a	561.810	601.371	671.468	608.075
Jumlah		Rupiah	n/a	1.110.522	1.244.930	1.329.533	1.247.833

Sumber : BPS – Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

2.1.4.2 Iklim Berinvestasi

Keamanan dan Ketertiban Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kota Tebing Tinggi. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.

A. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.448

Jumlah Kriminalitas Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kriminalitas di Kota Tebing Tinggi	kasus	801	779	544	433	369
Jumlah		kasus	801	779	544	433	369

Sumber : BPS – Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Tingkat kriminalitas di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan sejak tahun 2018 yaitu sebanyak 801 kasus dan di tahun 2022 ada 369 kasus. Penurunannya sebesar 53,4%.

B. Perizinan

Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tebing Tinggi.

2.1.4.3 Sumber Daya Manusia

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja

terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.459

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan
di Kota Tebing Tinggi

Kelompok Umur	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Muda (0-14 Tahun)	28,06%	27,61%	26,89%	26,59%	26,29%
Produktif (15-64)	67,03%	67,27%	67,61%	67,61%	67,59%
Lansia (65 Tahun)	4,91%	5,12%	5,5%	5,8%	6,11%
Rasio Beban etergantungan(%)	49,19%	48,66%	47,88%	47,90%	46,75%

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Di Kota Tebing Tinggi Pada tahun 2022 angka rasio ketergantungannya termasuk tinggi, dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Tebing Tinggi mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Kondisi ini harus dapat mendorong pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dapat membuka jendela kesempatan dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Disamping itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjelma menjadi faktor penghambat dalam pembangunan. Tingkat pendidikan yang tinggi berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah akan membuka peluang semakin majunya daerah tersebut. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 diketahui Jumlah Program-program dari masing-masing perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2023, berikut ini disajikan capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil evaluasi Triwulan I dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.50

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan I Kota Tebing Tinggi

No	Nama Perangkat daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1	12,50	20	5	25,00	121	6	4,95	192.528.024.194	20.057.438.738	10,42
2.	Dinas Kesehatan	6	3	50,00	18	5	12,77	54	5	9,25	110.358.940.687	13.229.906.252	11,99
3.	Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane	2	1	50,00	3	1	33,33	4	2	50,00	65.808.267.464	869.711.059	1,32
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	4	50,00	16	6	37,50	39	9	23,07	64.374.409.932	1.903.639.601	1,92
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	3	60,00	13	6	46,15	30	8	26,66	20.138.015.167	2.857.894.428	3,90
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	2	1	50,00	8	4	50,00	19	8	42,10	6.488.862.727	1.027.613.400	15,84



No	Nama Perangkat daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	1	50,00	6	4	66,66	12	7	58,33	4.804.617.144	936.270.423	19,49
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	1	50,00	10	2	20,00	17	3	17,64	6.351.012.890	420.332.811	6,62
9.	Dinas Sosial	6	2	33,33	14	7	50,00	28	9	32,14	5.129.572.146	515.692.193	10,05
10.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	4	2	50,00	7	3	42,85	14	4	28,57	4.081.321.794	587.276.689	14,39
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	100	12	10	83,33	35	20	57,14	7.480.048.800	666.098.205	8,90
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	9	4	44,44	20	8	40,00	37	17	45,94	5.555.995.018	664.759.869	11,96



No	Nama Perangkat daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	Pemberdayaan Masyarakat												
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	1	10,00	18	4	22,22	29	5	17,24	9.575.676.488	1.481.692.573	15,47
14.	Dinas Lingkungan Hidup	8	4	50,00	14	7	50,00	27	8	29,62	21.053.365.094	2.164.573.114	10,28
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	2	50,00	8	5	62,50	17	7	41,17	4.258.652.273	595.384.688	13,98
16.	Dinas Perhubungan	2	2	100	11	8	72,72	23	11	47,82	6.904.896.348	987.859.304	14,31
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	3	60,00	11	6	5,54	20	11	55,00	9.852.870.496	1.861.003.805	18,89
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan	10	4	40,00	21	5	23,80	33	6	18,18	7.177.968.639	790.857.580	11,02



No	Nama Perangkat daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	Menengah												
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	5	83,33	13	11	84,61	30	15	50,00	4.507.474.712	679.508.553	15,08
20.	Dinas Pemuda, Olahragadan Pariwisata	7	1	14,28	15	5	33,33	25	10	40,00	6.947.852.667	846.505.489	12,18
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3	2	66,66	12	4	33,33	24	7	29,16	4.357.378.864	676.412.600	15,52
22	Sekretariat DPRD	2	2	100	14	7	50,00	36	12	33,33	21.675.192.251	4.878.267.857	22,51
23	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	100	1	1	100	3	1	33,33	7.422.365.500	1.470.041.000	19,80
24	Bagian Umum	1	1	100	8	6	75	20	10	50,00	18.961.098.639	2.776.017.698	14,85
25	Bagian Pemerrintahan	1	1	100	2	2	100	5	3	60,00	940.417.680	69.869.579	7,43
26	Bagian	1	1	100	2	2	100	6	4	66,66	713.664.200	29.584.620	4,14



No	Nama Perangkat daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	Perekonomian Dan Sumber Daya Alam												
27	Bagian Adm. Pembangunan	1	1	100	1	1	100	3	3	100	497.585.000	42.267.120	8,49
28	Bagian Hukum	2	2	100	2	2	100	4	4	100	817.847.500	525.502.930	64,25
29	Bagian Organisasi	1	1	100	1	1	100	5	4	80,00	582.948.300	93.844.047	16,09
30	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1	1	100	1	1	100	3	3	100	540.025.200	109.895.300	20,35
31	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	1	1	100	1	1	100	3	3	100	1.274.222.300	450.893.694	35,38
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	3	75,00	13	8	61,53	41	16	39,02	6.459.614.200	1.111.626.192	17,21
33	BPKPD	4	4	100	13	9	69,23	56	11	19,64	45.090.206.341	1.616.603.743	3,59



No	Nama Perangkat daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
34	BKPSDM	2	2	100	10	3	30,00	22	3	13,63	5.923.044.090	589.712.691	9,96
35	Inspektorat	3	3	100	11	9	81,81	30	15	50,00	12.613.257.966	1.713.510.223	13,58
36	Kecamatan Bajenis	3	2	66,66	10	3	30,00	21	3	14,28	7.694.887.024	810.245.269	10,53
37	Kecamatan Padang Hilir	3	2	66,66	10	3	30,00	21	3	14,28	7.694.887.024	810.245.269	10,53
38	Kecamatan Padang Hulu	4	2	50	11	7	63,63	22	13	59,09	7.688.933.015	1.310.841.882	17,05
39	Kecamatan Rambutan	4	2	50	11	4	36,36	21	5	23,80	8.322.031.204	1.101.683.661	13,24
40	Kecamatan T.Tinggi Kota	4	2	50	10	6	60	19	7	36,84	8.059.591.176	1.078.671.530	13,38
41	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	3	50	11	6	55	27	7	26,00	10.951.719.585	575.483.952	5,25

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Triwulan I Tahun 2023 bahwa dari 41 (Empat Puluh Satu) Perangkat Daerah dengan predikat kinerja sangat tinggi adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan pelaksanaan Program sebesar 100 % (seratus) persen, Kegiatan sebesar 100 % (seratus) persen, Sub Kegiatan sebesar 100 % (seratus.) persen dan realisasi keuangan sebesar Rp. 525.502.930, - dari pagu anggaran sebesar Rp. 817.847.500,- atau sebesar 64,25 % (enam puluh empat koma dua puluh lima) persen.
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Daerah Kota Tebing Tinggi Triwulan I Tahun 2023 bahwa dari 41 (Empat Puluh Satu) Perangkat Daerah dengan predikat kinerja yang sangat rendah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pelaksanaan Program sebesar 12,50 (dua belas koma lima puluh) persen, Kegiatan sebesar 25,00 (dua puluh lima) persen, Sub Kegiatan sebesar 4,95 (empat koma sembilan puluhh persen dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.057.438.738,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 192.528.024.194,- atau sebesar 10,42 %.
3. Keberhasilan dari misi ditunjukkan oleh indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Kota Tebing Tinggi dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program, kegiatan sub kegiatan :
 - a. Pemahaman SKPD tentang Pengendalian dan evaluasi Renja yang tidak sama dan berimbang terutama tentang perbedaan kinerja penyerapan APBD dan Kinerja Realisasi RKPD sehingga berimplikasi terhadap pengisian format laporan evaluasi.
 - b. Faktor penyebab terpenuhi target kinerja adalah kegiatan sudah direncanakan dengan baik, waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik, kerjasama dengan banyak pihak dalam pelaksanaannya dan konsistensi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta banyaknya dukungan dari berbagai pihak

2.2.2 Evaluasi Capaian Indikator RKPD Tahun 2023

2.2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Tebing Tinggi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 belum terealisasinya seluruhnya hal ini disebabkan realisasinya diukur dalam satu tahun.

Tabel 2.461

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Satuan	2023		Status
			Target	Realisasi	
1	Prevalensi Stunting	Persen	15	2,2%	Belum Tercapai
2	Angka Kesakitan		13,78	1,37	Angka ini diperoleh dari jumlah penduduk yang mengalami masalah Kesehatan dan terganggunya aktivitas dibagi dengan jumlah penduduk
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,87	-	untuk indicator Angka Harapan Hidup realisasinya diukur dalam satu tahun melihat sumber data dari BPS
4	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	10,65	Melebihi
5	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	65	-	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2023 diputuskan oleh BKN Kanreg VI rencananya di akhir TW II (Juni)
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100%	100%	Capaian TW I berdasarkan: 1. Bantuan kepada penghuni panti 100% 2. Bantuan PKH, Bantuan Sembako dan PBI (BPJS)
7	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Persen	70,35	-	Data perhitungan dari BPS (dihitung selama setahun)
8	Pengeluaran rill per kapita (Ribu/kapita)	(Ribu/kapita)	12.927	-	Realisasinya diukur dalam satu tahun
9	Nilai Investasi	Milyar	169	729	Melebihi
10	Indeks Rasa Aman	Poin	72,20	-	Pertahun
11	Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	Persen	70,25%	69,17%	Belum
12	Persentase cakupan Sanitasi yang Layak	Persen	86,15%	85,05%	Belum
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,42	-	Perhitungan IKLH di Triwulan IV
14	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Persen	80%	-	-



No	Indikator	Satuan	2023		Status
			Target	Realisasi	
15	Nilai SAKIP	Nilai	B	-	Penilaian SAKIP Tahunan oleh KemenpanRB
16	Indeks Pelayanan Publik		Sangat Baik	-	Penilaian Indeks Pelayanan Publik Tahunan oleh KemenpanRB
17	Indeks SPBE	Poin	2,6	-	-
18	Nilai reformasi Birokrasi	Nilai	B	-	Penilaian RB Tahunan oleh KemenpanRB -
19	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	-	-

2.2.2.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ IKU OPD

Evaluasi Kinerja penyelenggaraan bidang urusan berdasarkan RPJMD akhir periode tahun 2022 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan I Kota Tebing Tinggi RPD Tahun 2023-2026 ditunjukkan oleh capaian IKU perangkat daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan bidang urusan pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dan 2023 Triwulan I disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.52
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
1	Pendidikan dan tenaga yang menerima beasiswa untuk peningkatan Pendidikan formal dan non formal	Orang	3	100	Tercapai
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan yang Berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Orang	319	100	Tercapai
3	Tambahan penghasilan Pendidik dan tenaga Pendidikan	Persen	20	100	Tercapai
4	Prestasi Pendidik dan siswa yang diperoleh pada tingkat internasional, nasional dan regional	Orang	4	100	Tercapai
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	-2	100	Tercapai
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Paket A	Persen	-2	100	Tercapai
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Paket A	Persen	0.50	100	Tercapai
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan Paket B	Persen	-2	100	Tercapai
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan Paket B	Persen	1.00	100	Tercapai
10	Penerima Beasiswa bagi Siswa yang di kategorikan Mampu/Miskin	Orang	14456	100	Tercapai
11	Alat Praktik dan Media Pembelajaran	Jenis	7	100	Tercapai
12	Meubiler ruang kelas dan ruang penunjang lainnya	Persen	7	100	Tercapai
13	Gedung dan Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	Persen	6	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
14	Ketersediaan Ruang Penunjang (Perpustakaan, Laboratorium, Ruang Guru, Ruang UKS, Jamban, RTH, dll) di setiap satuan Pendidikan	Persen	8	100	Tercapai
15	Data Pokok Pendidik	Persen	4	100	Tercapai
16	Data Pokok Pendidikan	Persen	100	100	Tercapai
17	Kemampuan TIK bagi Pendidik dan Kependidikan	Persen	55	100	Tercapai
18	Sekolah yang Memiliki Website	Skhl	10	100	Tercapai
19	Penerapan E-Pembelajaran	Persen	6	100	Tercapai
20	Kurikulum Muatan Lokal	Jenis	2	100	Tercapai
21	Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter.	Skhl	20	100	Tercapai
22	Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas	Persen	0,0003	100	Tercapai
23	Pelatihan Kecakapan Hidup bagi Masyarakat	Kgt	1	100	Tercapai
24	Lulusan SMA/MA, dan SMK yang mendapat beasiswa yang di terima di PTN	Tahun	1	100	Tercapai
25	Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi	Orang	100	100	Tercapai
26	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung pada Laboratorium Terpadu Kota Tebing Tinggi	Persen	6	100	Tercapai
27	Ketersediaan Perlengkapan dan Alat Praktek pada Laboratorium Terpadu Kota Tebing Tinggi	Mapel	1	100	Tercapai
28	Pendirian Politeknik Negeri	Kampus	1	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
29	Cagar Budaya, Benda Bersejarah, dan Kesenian Daerah yang dilindungi	Jenis	-	-	
30	Sanggar Seni dan Budaya	Unit	1	100	Tercapai
31	Pakaian Tari	Set	1	100	Tercapai
32	Alat Seni Musik	Set	1	100	Tercapai
33	Pagelaran Seni dan Budaya	Pegelaran	1	100	Tercapai
34	Festival Seni dan Budaya	Festival	1	100	Tercapai
35	Jumlah Kematian Ibu	Orang	2	100	Tercapai
36	Angka kematian Bayi	kh	4.8/1000	100	Tercapai
37	Persentase Puskesmas terakreditasi.	Persen	100	100	Tercapai
38	Persentase pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persen	100	100	Tercapai
39	Persentase kepesertaan BPJS	Persen	90	100	Tercapai
40	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	Tercapai
41	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persen	100	100	Tercapai
42	Persentase penyakit yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	Persen	100	100	Tercapai
43	Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,05	100	Tercapai
44	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	Persen	100	100	Tercapai
45	Peningkatan status rumah sakit pemerintah	Pendidikan	B Pendidikan	100	Tercapai
46	Peningkatan status akreditasi rumah sakit	Dasar	Paripurna	100	Tercapai
47	Persentase kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan operasional	Persen	80	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
	secara mandiri dengan pola PPK- BLUD Rumah sakit Pemerintah				
48	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	1	100	Tercapai
49	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persen	7.10	100	Tercapai
50	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	10	100	Tercapai
51	Luas irigasi dalam kondisi baik	Persen	4	100	Tercapai
52	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	
53	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	100	Tercapai
54	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	Tercapai
55	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	Tercapai
56	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	90	100	Tercapai
57	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi baik/layak	Persen	75	100	Tercapai
58	Persentasi Tersedianya luasan RTH publik.	Persen	25	100	Tercapai
59	Rasio tempat pemakaman umum/satuan penduduk	Jiwa/Unit	2018	3240	Tercapai
60	Pengembangan kota hijau di 5 kecamatan.	Lokasi	2	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
61	Cakupan layanan Rumah layak huni yang terjangkau	Persen	50	46,87	Tercapai
62	Rasio permukiman layak huni	ha	0,84 ha	100	Tercapai
63	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Unit	49622	37448	Tercapai
64	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum	Persen	74	64,74	Tercapai
65	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Unit	35	100	Tercapai
66	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	20	100	Tercapai
67	Tersedianya sistem pengangkutan sampah perkotaan	Persen	69	100	Tercapai
68	Tersedianya Sistem Pengoperasian TPA Sampah	Persen	69	100	Tercapai
69	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	97	100	Tercapai
70	Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran	Persen	94	100	Tercapai
71	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	n/a	16	100	Tercapai
72	Persentase pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan yang menerima pelayanan kesejahteraan social	n/a	100	100	Tercapai
73	Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	100	100	Tercapai
74	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap	Persen	2	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
	kebijaksanaan pemerintah daerah				
75	Tersedianya Database dan Pemasaran produk Usaha Mikro berbasis aplikasi	Ada	ada	100	Tercapai
76	Terbentuknya Dewan Perekonomian Daerah	Ada	ada	100	Tercapai
77	Tersedianya data harga bahan pokok dan bahan sinergis lainnya pada aplikasi Siharapanku	Ada	ada	100	Tercapai
78	Tersedianya Sistem Informasi Perdagangan dan Pusat Pengaduan (Trade Centre dan Command Centre)	Ada	ada	100	Tercapai
79	Persentasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah bertanda terasah yang berlaku	Persen	20	100	Tercapai
80	Tersedianya dana bergulir bagi pelaku usaha mikro dan koperasi	Ada	ada	100	Tercapai
81	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	23,14	100	Tercapai
82	Persentasi Koperasi Aktif	Persen	45	100	Tercapai
83	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	Persen	100	0	Tercapai
84	Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi	Titik	7	62	Tercapai
85	Persentase organisasi pemuda yang aktif	n/a	100	100	Tercapai
86	Persentase wirausaha	n/a	50	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
	pemuda				
87	Jumlah atlet berprestasi	Orang	12	100	Tercapai
88	Jumlah prestasi olahraga	Cabor beregu	5	100	Tercapai
89	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	n/a	80	100	Tercapai
90	Cakupan pembinaan olahraga	n/a	80	100	Tercapai
91	PAD sektor Pariwisata terhadap total PAD	n/a	10	100	Tercapai
92	Kunjungan wisata	n/a	10000	100	Tercapai
93	Lapangan Olahraga	unit	1	100	Tercapai
94	Unjuk Rasa	kasus	16	100	Tercapai
95	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	100	Tercapai
96	Peningkatan Target pendapatan pajak daerah	Miliar	35	100	Tercapai
97	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	3,25	100	Tercapai
98	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi	Persen	80	100	Tercapai
99	1. Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura yang meningkat				
	- Padi (GKP) (kw/ha)	(kw/ha)	69	100	Tercapai
	- Jagung (kw/ha)	(kw/ha)	55	100	Tercapai
	- Kacang Tanah (kw/ha)	(kw/ha)	16	100	Tercapai
	- Kacang Hijau (kw/ha)	(kw/ha)	12	100	Tercapai
	- Ubi Kayu (kw/ha)	(kw/ha)	600	100	Tercapai
	- Ubi Jalar (kw/ha)	(kw/ha)	120	100	Tercapai
	- Bawang merah (kw/ha)	(kw/ha)	60	100	Tercapai
	- Cabe merah (kw/ha)	(kw/ha)	75	100	Tercapai
	- Sawi (kw/ha)	(kw/ha)	36	100	Tercapai
	- Kangkung (kw/ha)	(kw/ha)	38	100	Tercapai
	- Bayam (kw/ha)	(kw/ha)	46	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
	2. Nilai Tukar Petani	(kw/ha)	1,3	100	Tercapai
	1. Peningkatan populasi ternak di Kota Tebing Tinggi				
	- Sapi Perah	Ekor	87	100	Tercapai
	- Kambing	Ekor	9419	100	Tercapai
	- Domba	Ekor	6300	100	Tercapai
	3. Peningkatan SDM Pengolah dan Pembudidaya Ikan dan Perbenihan				
	-Kelompok Pembudidaya ikan	Kelompok	88	100	Tercapai
	- Kelompok Unit perbenihan rakyat (UPR)	Kelompok	11	100	Tercapai
	- Kelompok pengolahan ikan	Kelompok	7	100	Tercapai
	-Kelompok Pembudidaya Ikan Hias	Kelompok	6	100	Tercapai
	4. Tingkat Konsumsi ikan per kapita				
100	Event pelatihan dalam penanggulangan bencana bagi masyarakat dan petugas	Orang	300	100	Tercapai
101	Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	100	Tercapai
102	Persentase LPM Berprestasi	Persen	25	100	Tercapai
103	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	Tercapai
104	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	Tercapai
105	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	94	100	Tercapai
106	Level Maturitas SPIP	Skor	5	100	Tercapai
107	Persentase formasi PNS dengan analisis jabatan yang tepat dengan	Persen	100	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
	memangku jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi dan profesionalitas pegawai				
108	Peningkatan kepatuhan hukum dan disiplin PNS	Persen	95	100	Tercapai
109	Nilai Adipura	Nilai	76	100	Tercapai
110	Parameter tanah yang memenuhi baku mutu	Kecamatan	5	100	Tercapai
111	Parameter air yang memenuhi baku mutu	Sektor	4	100	Tercapai
112	Parameter udara yang memenuhi baku mutu	Sektor	4	100	Tercapai
113	Hutan kota yang direhabilitasi	Lokasi	5	100	Tercapai
114	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Nilai	0,072	100	Tercapai
115	Cakupan pemakaian kontrasepsi	Persen	80	100	Tercapai
116	Persentase KB Aktif/CPR	Persen	90	100	Tercapai
117	Angka kelahiran (TFR) per PUS (15-49 tahun)	Angka Lahir Hidup	2,1	100	Tercapai
118	Angka Kelahiran Pada remaja usia 15-19 tahun	Angka Lahir Hidup	22	100	Tercapai
119	Persentase Perempuan di lembaga legislative	Persen	30	100	Tercapai
120	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standart	Persen	80	100	Tercapai
121	Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standart	Persen	80	100	Tercapai
122	Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persen	0,2	100	Tercapai
123	Persentase Penegakan Perda	Persen	75	100	Tercapai
124	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kota	Persen	85	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
	Tebing Tinggi				
125	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan supervisi atas pengelolaan arisp dinamis	OPD	6	100	Tercapai
126	Jumlah pengunjung perpustakaan (pemustaka) ke perpustakaan	Orang	210.000	100	Tercapai
127	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	21.500	100	Tercapai
128	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kategori A	3,35 kategori A	100	Tercapai
129	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Nilai	5M	100	Tercapai
130	Hearing Dialog antara Pejabat Daerah / Tokoh Masyarakat dan Agama.	Kali	8	100	Tercapai
131	Jumlah Rumah Ibadah yang menyelenggarakan palatihan bidang agama	Rumah Ibadah	220	100	Tercapai
132	Cakupan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan.	Persen	95	100	Tercapai
133	Persentase implementasi hasil kesepakatan kerjasama.	Persen	90	100	Tercapai
134	Nilai dan pemeringkatan LPPD.	Nilai	3	100	Tercapai
135	Jumlah pilar batas daerah.	Pilar	0	100	Tercapai
136	Menghadiri dan mengikuti Rakernas APEKSI	Kegiatan	1	100	Tercapai
137	Evaluasi perkembangan kelurahan	Persen	95	100	Tercapai
138	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi e-kecamatan dan e-	Persen	95	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
	kelurahan.				
139	Persentase penanganan masalah hukum	Persen	100	100	Tercapai
140	Persentase Produk hukum daerah dan kajian Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	Tercapai
141	Persentase Perda dan Perwa yang dihasilkan	Persen	85	100	Tercapai
142	Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	Persen	100	100	Tercapai
143	Persentase Produk Hukum yang dapat diakses melalui internet oleh pegawai pemerintah dan masyarakat	Persen	100	100	Tercapai
144	Tersediannya informasi kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	Persen	80	100	Tercapai
145	Tertingkatnya jumlah partisipasi media jumlah media massa yang mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	Persen	90	100	Tercapai
146	Terpublikasikannya Kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui media pemerintah, media luar ruang dan media elektronik	Persen	90	100	Tercapai
147	Terlaksananya kerjasama dengan media massa dalam rangka Public Awareness Campaign.	Persen	80	100	Tercapai
148	Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan	Persen	90	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
	keprotokolan Pemda.				
149	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan yang efisien, transparan, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi.	Persen	100	100	Tercapai
150	Jumlah dokumen SIRUP yang dipublikasi	Persen	100	100	Tercapai
151	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Pokok	Ada	ada	100	Tercapai
152	Terlaksananya Operasi Pasar	Ada	ada	100	Tercapai
153	Terlaksananya Operasional Pendistribusian RASTRA	Persen	100	100	Tercapai
154	Terlaksananya kegiatan kedinasan KDH dan WKDH	Persen	100	100	Tercapai
155	Persentase seluruh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	Persen	100	100	Tercapai
156	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP)	Persen	100	100	Tercapai
157	Tingkat Kinerja Akuntabilitas	Persen	B	100	Tercapai
158	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	33	100	Tercapai
159	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	3,80	100	Tercapai
160	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	38,00	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Status
161	Inflasi		2,00	100	Tercapai
162	Nilai Investasi	(milyar rupiah)	282.945	100	Tercapai
163	Angka Melek Huruf	Persen	99,80	100	Tercapai
164	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,52	100	Tercapai
164	Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah	Nilai	68,85	100	Tercapai
165	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,23	100	Tercapai
166	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,00	100	Tercapai
167	Rata-Rata Pendapatan Masyarakat	Rupiah	2.854.190	100	Tercapai
168	Pasar yang berkualitas		8	100	Tercapai
169	Fasilitas Umum yang Berkualitas		7	100	Tercapai
170	Presentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	68	100	Tercapai
171	Indeks Kualitas Air		80	100	Tercapai
172	Indeks Kualitas Udara		85	100	Tercapai
173	Tutupan Lahan (ha)		497,55	100	Tercapai

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 kota Tebing Tinggi dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah telah banyak tercapai.

Tabel 2.53
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan I Kota Tebing Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	S/d Triwulan I 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
A.1	FOKUS				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI				
1.	Pertumbuhan PDRB		n/a	n/a	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi %	Persen	2,50 – 5,0	-	Seluruh Perangkat Daerah
3.	Rasio Gini	Nilai	0,31	-	
A.2	FOKUS KEJAHTERAAN SOSIAL				
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,8	-	BPS
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,87	71,29	Dinas Kesehatan
3	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	10,65	Disdikbud
4	Tingkat Pengangguran Terbuka %	Persen	8,35	-	BPS
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,00	Belum Rilis	BPS
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100%	-	-
7	Angka Melek Huruf	Persen	99,47	-	-
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,55	10,65	Disdikbud
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				
B.1.1	PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
	Pendidikan Dasar				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Angka Melek Huruf	Persen	99,47	-	-
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Persen	10,55	10,65	Disdikbud
1.3	Harapan lama Sekolah	Tahun	12,75	12,91	Disdikbud
	Tingkat Partisipasi dan Mutu Pendidikan				
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun pada jenjang Sekolah Dasar	Persen	99,65%	99,99	Disdikbud
1.5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun pada jenjang Sekolah menengah pertama	Persen	99,88%	99,97	Disdikbud
1.6	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun pada jenjang PAUD	Persen	87,10%	76,70	Disdikbud
1.7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada pendidikan kesetaraan	Persen	2,50%	7,56	Disdikbud
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar				
1.8	Sekolah Dasar (SD)	Persen	58%	Tidak sesuai IKUR dari Kemdikbudristek	Disdikbud
1.9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	65%	Tidak sesuai IKUR dari Kemdikbudristek	Disdikbud
1.10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	22%	Tidak sesuai IKUR dari Kemdikbudristek	Disdikbud
1.11	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	Persen	5%	Tidak sesuai IKUR dari	Disdikbud



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kemdikbudristek	
	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum sesuai standar				
1.12	Sekolah Dasar (SD)	Persen	92,20%	Tidak sesuai IKUR dari Kemdikbudristek	Disidkbud
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	95,40%	Tidak sesuai IKUR dari Kemdikbudristek	Disidkbud
1.13	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	60%	Tidak sesuai IKUR dari Kemdikbudristek	Disidkbud
1.14	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	Persen	50%	Tidak sesuai IKUR dari Kemdikbudristek	Disidkbud
	KESEHATAN				
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH	Angka	6,6/1000KH	2,1/1000KH	Dinas Keshatan
2.1	Jumlah Kematian Ibu	orang	7 orang	1 Orang	Dinas Keshatan
2.2	Prevalensi Balita Stunting	Persen	2,2%	2,2%	Dinas Keshatan
2.3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0,05%	0%	Dinas Keshatan
2.4	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Persen	100%	34,6%	Dinas Keshatan
2.5	Persentase balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	Persen	93%	37,86%	Dinas Keshatan
2.6	Persentase pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persen	60%	26,8%	Dinas Keshatan
2..7	Persentase Penduduk miskin	Persen	90%	95%	Dinas



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yang tercakup dalam JKN				Keshatan
2..8	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100%	25,01%	Dinas Kesehatan
2..9	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TB BTA	Persen	100%	10,11%	Dinas Kesehatan
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
3.1	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	80%	53,80	Dinas PUPR
3.2	Luas wilayah Produktif	Ha	3.918	231,97	Dinas PUPR
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
4.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Persen	100%	0	Dinas Perkimtah
4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	92	88	Dinas Perkimtah
4.3	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak huni Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi Program pemerintah daerah Kota	Persen	100%	0	Dinas Perkimtah
4.4	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	Persen	97,65%	97,34%	Dinas Perkimtah
4.5	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	Persen	7,17%	7,34%	Dinas Perkimtah
4.6	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	85%	65%	Dinas Perkimtah
4.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	SATPOL PP				
4.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	77,5	80,1	Satpol PP
4.2	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	100%	25%	Satpol PP
4.3	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	100%	13%	Satpol PP
	KESBANGPOL				
4.4	Persentase penurunan Unjuk Rasa	Persen	11%	Realisasinya diukur dalam satu tahun	Kesbangpol
4.5	Persentase Konflik SARA	Persen	0%	Realisasinya diukur dalam satu tahun	Kesbangpol
4.6	Persentase LSM aktif	Persen	48%	Realisasinya diukur dalam satu tahun	Kesbangpol
4.7	Persentase Partisipasi Pemilih	Persen	-	-	Kesbangpol
	DAMKAR				
4.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85	25%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.9	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kota	Persen	85%	25%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.10	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non	Persen	85%	25%	Dinas Pemadam



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kebakaran				Kebakaran dan Penyelamatan
4.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	85%	25%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	BPBD				
4.11	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	80%	0	BPBD
4.12	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	80%	0	BPBD
5.	SOSIAL				
1.	Persentase PMKS yang ditangani	Persen	100%	100%	Dinas Sosial
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR				
1.	TENAGA KERJA				
1.1	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	200 orang	0	Dinakerin
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama / PB (%)	Persen	75%	18,75	Dinakerin
1.3	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	Persen	21%	5,25	Dinakerin
1.4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,12%	2,28	Dinakerin
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
2.1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	6,84	Realisasi didapat dari data akhir tahun	DP3APM
2.2	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Persen	88%	Realisasi didapat dari data akhir tahun	DP3APM
2.3	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persen	57,14%	Indicator ini tidak diperlukan karena sudah double fungsi dengan rasio kekerasan	DP3APM
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
3.1	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	Poin	56,42	Perhitungan IKLH di Triwulan IV	Dinas Lingkungan Hidup
4.	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
4.1	Indeks pelayanan publik	Poin	Sangat baik	Sangat Baik	Disdukcapil
4.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 Tahun	Persen	98,5%	98,67%	Disdukcapil
4.3	Persentase penerbitan kartu identitas Anak	Persen	50%	77,41%	Disdukcapil
5.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
5.1	Total Fertility Rate		2,25	Data dihitung per tahun	Dinas PPKB
5.2	Persentase Peserta KB aktif	Persen	79	49,7	Dinas PPKB



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.3	Median Usia Kawin Pertama	Usia	23,8	22	Dinas PPKB
6.	PERHUBUNGAN				
6.1	Jumlah terminal penumpang tipe c	Jumlah	2	2	Dinas Perhubungan
6.2	Load factor angkutan perkotaan	Persen	60%	25 %	Dinas Perhubungan
6.3	Persentase uji kir angkutan perkotaan yang beroperasi	Persen	87%	10 %	Dinas Perhubungan
7.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
7.1	Indeks SPBE	Poin	2,6	2,6	Dinas Kominfo
7.2	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persen	85%	85%	Dinas Kominfo
7.3	Persentase penyebarluasan informasi pemerintah daerah	Persen	95%	95%	Dinas Kominfo
7.4	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan e-government	Jumlah SKPD	18	18	Dinas Kominfo
7.5	Jumlah ketersediaan titik layanan fiber optik	Jumlah	20	20	Dinas Kominfo
7.6	Jumlah data dan metadada yang disebarluaskan pada portal SDI	Jumlah data dan metadada	5	5	Dinas Kominfo
7.7	Persentase SKPD yang telah tereduksi tentang tata kelola keamanan informasi	Persen	25%	25%	Dinas Kominfo
8	PENANAMAN MODAL				
8.1	Nilai Investasi	Milyar	169	729	DPMPPTSP
8.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85	99	DPMPPTSP



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	PEMUDA DAN OLAHRAGA				
9.1	Persentase wirausaha Muda	Persen	8,1%	0%	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.2	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan kepeloporan (orang)	Orang	100	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.3	Jumlah Atlet Prestasi Tingkat Nasional	Orang	2	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.4	Persentase Masyarakat Berolahraga	Persen	17	6%	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80	80,75	Dinas Pemuda dan Olahraga
10	PERPUSTAKAAN				
1.1	Persentase Pengunjung Perpustakaan	Persen	63	21,95%	Dinas Perpustakaan
11	ARSIP				
11.1	Nilai Evaluasi Pengawasan Arsip	Nilai	60,5	0 (Penilaian di TW IV)	Dinas Perpustakaan
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
1.	PARIWISATA				
1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	23.432	8.894	Dinas Pemuda dan



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				orang	Olahraga
1.2	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (persen)	Persen	3,9	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	PERTANIAN				
2.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar				
	Padi	Ton	68	71,6	DKPP
	Jagung	Ton	55	57,25	DKPP
	Ubi Kayu	Ton	470	537,06	DKPP
2.2	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	80,00	-	BPS
2.3	Nilai tukar Petani	Nilai	1,3	-	BPS
3	PERDAGANGAN				
3.1	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Yang Memadai	Persen	75%	0	Dinas Perdagangan
3.2	Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100%	100%	Dinas Perdagangan
4.	INDUSTRI				
4.1	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan/Manufacturing	Persen	0,5%	0,125	Dinakerin
B.3	FOKUS LAYANAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SEKRETARIS DAERAH				
1	BAGIAN KESRA				
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kesra	Poin	86	86	Bagian Kesra
2	BAGIAN ORGANISASI				
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85	96	Bagian Organisasi
2.2	Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	Penilaian Sakip Tahunan oleh Kemenpan RB	Bagian Organisasi
2.3	Jumlah SKPD yang nilai IKMnya Kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	Jumlah	60	62,5	Bagian Organisasi
3	BAGIAN HUMAS PROTOKOL				
3.1	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	Persen	90	25	Bagian Humas dan Protokol
	BAGIAN PBJ				
3.6	Persentase paket tender Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan terlaksana secara akuntabel dan transparan	Persen	100%	21.15%	Bagian PBJ Sekretariat Daerah
	BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA				
3.7	Jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada Semester I	Jumlah	30	0	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
3.8	Jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada	Jumlah	30	0	Bagian Pembangunan Sekretariat



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Semester I				Daerah
3.9	Jumlah SKPD yang nilai IKM-nya kategori Sangat Baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	Nilai	31.00	-	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
	BAGIAN PEMERINTAHAN				
3.10	Persentase Kecamatan dengan kategori baik (permen 81 th 2015)	Persen	20	-	Bagian Pemerintahan
3.11	Persentase Kelurahan dengan kategori baik	Persen	8,57	54	Bagian Pemerintahan
3.12	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	Persen	81	46	Bagian Pemerintahan
	BAGIAN HUKUM				
3.13	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persen	100%	25%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA				
3.14	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian		3.14	0	Bagian Perekonomian Dan SDA
	BAGIAN UMUM				
3.15	Terlaksanakannya kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH	Persen	100%	8.18%	Bagian Umum Sekretariat Daerah



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B.4	FOKUS LAYANAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1.	BAPPEDA				
1.1	Predikat Nilai Sakip Bappeda	Nilai	A	Penilaian dilakukan setiap Tahun oleh Inspektorat	Bappeda
1.2	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD yang mencapai target	Persen	80	20,00	Bappeda
1.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda	Indeks	85	84,75	Bappeda
1.4	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian	Persen	100%	-	Bappeda
1.5	Nilai reformasi Birokrasi	Nilai	B	Penilaian RB dilakukan Tahunan	Bappeda
2.	BPKPD				
2.1	Capaian Kinerja pelayanan Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi;	Persen	100%	25%	BPKPD
2.2	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan BIMTEK tentang Pajak Daerah;	Orang	5 Orang	-	BPKPD
2.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;	Opini	WTP	-	BPKPD
2.4	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel;	Persen	100%	25%	BPKPD



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.5	Terlaksananya pembayaran non tunai;	Persen	100%	25%	BPKPD
2.6	Peningkatan target pendapatan pajak daerah;	Miliar	34 miliar	9,6 miliar	BPKPD
2.7	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah melalui e-Barang Milik Daerah;	Persen	50%	12,5%	BPKPD
2.8	Terlaksananya e-budgeting;	Persen	100%	25%	BPKPD
2.9	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui e-Pajak;	Persen	80%	20%	BPKPD
3.	KEPEGAWAIAN				
3.1	Persentase tingkat Pendidikan Formal PNS Daerah jenjang S1 dan S2	Persen	68%	68%	BKPSDM
3.2	Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi	Orang	750 Orang	412 Orang	BKPSDM
3.3	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	Persen	75%	75%	BKPSDM
3.4	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	Persen	20%	25%	BKPSDM
3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan admisnistrasi kepegawaian	Persen	85%	98%	BKPSDM
3.6	Persentase tingkat akurasi data dan Informasi Kepegawaian	Persen	90%	90%	BKPSDM
3.7	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM	Persen	80%	80 (BB)	BKPSDM
B.5	FOKUS LAYANAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	INSPEKTORAT				
1.1	Persentase Temuan Eksternal dan Internal yg ditindaklanjuti dengan status Selesai	Persen	94%	93,49%	Inspektorat
1.2	Persentase Temuan yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan dan Aset Material	Persen	98%	Masih dalam Proses	Inspektorat
1.3	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	Persen	98%	40%	Inspektorat
1.4	Persentase SKPD dengan Nilai AKIP minimal B	Persen	93%	Kegiatan akan di laksanakan di TW III	Inspektorat
1.5	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Akan di laksanakan di TW III	Inspektorat
1.6	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Kegiatan sedang berjalan dan hasilnya akan keluar di TW IV	Inspektorat
B.6	FOKUS LAYANAN UNSUR KEWILAYAHAN				
1	KECAMATAN PADANG HULU				
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	86	Kecamatan Padang Hulu
1.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hulu
1.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hulu
1.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hulu



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi S/d Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hulu
1.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hulu
2	KECAMATAN RAMBUTAN				
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	86	Kecamatan Rambutan
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	25%	Kecamatan Rambutan
2.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	25%	Kecamatan Rambutan
2.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	25%	Kecamatan Rambutan
2.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	25%	Kecamatan Rambutan
2.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	25%	Kecamatan Rambutan
3	KECAMATAN PADANG HILIR				
3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	85	Kecamatan Padang Hilir
3.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hilir
3.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hilir
3.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hilir



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	S/d Triwulan I 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hilir
3.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	25%	Kecamatan Padang Hilir
4	KECAMATAN BAJENIS				
4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	82,75	Kecamatan Bajenis
4.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	25%	Kecamatan Bajenis
4.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	33,3%	Kecamatan Bajenis
4.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	0%	Kecamatan Bajenis
4.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	0%	Kecamatan Bajenis
4.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	25%	Kecamatan Bajenis
5	KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA				
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	94,5	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	25%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	33,3%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	S/d Triwulan I 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	0%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	0%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	0%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan I kota Tebing Tinggi masih banyak Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang belum tercapai, dan diharapkan pada akhir tahun semua target dapat dicapai.

2.3 Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Tebing Tinggi

Pokok–Pokok Pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses adalah salah satu hal yang menjadi masukan dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kota Tebing Tinggi. Pokok–pokok pikiran tersebut selanjutnya disinergikan dalam Program dan Kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah terkait. Hasil telaahan Pokir DPRD setelah dilakukan pemetaan terhadap kewenangan dirumuskan dalam permasalahan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.54

Rekap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berdasarkan kewenangan Kota Tebing Tinggi

No	Fraksi	Hasil Pokir
1	Demokrat Amanat Keadilan	55
2	Gerindra	22
3	Golkar	11
4	Nasdem	54
5	Nurani Kebangsaan	33
6	PDIP	23
Total		198

Jumlah usulan Pokok-Pokok Pikiran akan diteruskan pada perangkat daerah dan akan divalidasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada KUA PPAS dan RAPBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan Pembangunan Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan pokok Kota Tebing Tinggi adalah:

a. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- Masih kurangnya Kegiatan Penerapan e-pembelajaran
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
- Masih rendahnya tingkat Persentase Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi
- Masih rendahnya status gizi masyarakat
- Masih ada kasus Kematian Ibu
- Masih ada kasus kematian Bayi
- Meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular
- Masih rendahnya pemeliharaan jaminan Kesehatan
- Konektivitas jalan sudah mencapai 100%, namun apabila ada pembukaan jalan baru, tanahnya diharapkan sudah dihibahkan kepada PEMKO atau dengan cara pembayaran pembebasan lahan/tanah
- Persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 85% masih perlu ditingkatkan
- Gedung Pemerintahan khususnya Gedung DPRD, Kantor Kecamatan Padang Hulu dan Padang Hilir rencana di bangun/direhabilitasi
- Revisi RTRW Kota Tebing Tinggi dalam proses (KLHS, PK dan revisi dilakukan di Tahun 2021 untuk pegesahan perda revisi RTRW dan RDTR direncanakan tahun 2022
- Kondisi saluran/drainase yang belum baik
- Penanggulangan banjir harus dilakukan bersama dengan Provinsi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun serta perlu diadakannya early warning system
- Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota meliputi akses air minum dan sanitasi masih perlu ditingkatkan. Rumah Tangga pengguna air minum khususnya dengan jaringan perpipaan berkoordinasi dengan PDAM Tirta Bulian. Sementara sanitasi Rumah Tangga ditargetkan menjadi tangki septik individual sehat (kedap)



- Data base perumahan belum update
- Masih banyak rumah dengan kondisi yang tidak sesuai dengan persyaratan Rumah layak huni
- Kurang sinergi kebijakan lintas sektoral dalam hal pendataan dan penanganan RTLH dan penanganan kawasan kumuh
- Masih banyak RTLH status tanah bukan milik sendiri/ sewa sehingga capaian bantuan ke masyarakat kurang optimal
- Belum terlaksananya penyerahan PSU perumahan dari pengembang/developer ke Pemerintah Kota
- Minimnya lampu penerangannya jalan dipermukiman
- Ketidadaan armada mobil tangga ukuran kecil untuk lampu permukiman sehingga pemeliharaan untuk lampu penerangan di permukiman tidak optimal
- Pemasangan lampu penerangan di permukiman yang dilakukan oleh masyarakat tidak berkoordinasi dengan Dinas Perkim sehingga pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum dan biaya pemeliharaan menjadi besar
- Pengadaan Lampu penerangan umum di kompleks perumahan adalah menjadi tanggung jawab developer (pengembang) sebelum adanya penyerahan PSU perumahan dari pengembang ke Pemerintah Kota
- Tidak adanya peraturan yang menjadi dasar dalam penetapan pemasangan Reklame di Kota Tebing Tinggi
- Tidak adanya peraturan yang menjadi dasar dalam Penataan Pemakaman di Kota Tebing Tinggi
- Banyaknya masyarakat yang tidak merawat pohon dan meracun pohon dan meninggalkan sisa-sisa pohon yang kering sehingga diperlukan mobil untuk penebangan pohon untuk penataan pohon di permukiman
- Untuk perawatan seluruh taman yang ada agar maksimal diperlukan penambahan mobil tangki penyiram tanaman
- Masih sangat rendahnya sumberdaya manusia yang memiliki kualitas fisik dan mental yang siap dalam pelayanan tugas
- Kualitas SDM yang kurang memadai
- Unit Gerak Cepat (UGC) yang seharusnya beroperasi selama 24 jam untuk pengaduan masyarakat tidak berfungsi dengan baik
- Minimnya kesadaran masyarakat akan kesadaran untuk penegakan Perda
- Minimnya peralatan khusus yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penertiban di lapangan
- Pemilihan Umum Serentak 2024 maka perlunya Pendidikan Politik Masyarakat selama 5 tahun baru terlaksana 2 kali



- Perubahan Peraturan dan Perkembangan Ormas maka perlu dilaksanakan dialog antar Ormas, OKP, dan LSM dengan Pemerintah yang selama 5 tahun baru terlaksana 2 kali
- Masih bannyaknya kasus Narkoba di masyarakat maka perlunya Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika selama 5 tahun hanya 1 kegiatan
- Menipisnya rasa cinta tanah air maka perlunya Pelatihan Wawasan Kebangsaan / Bela negara selama 5 tahun baru terlaksana 3 kali
- Minimnya peralatan dan perlengkapan yang dimiliki untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan
- Banyaknya daerah yang tidak mempunyai hydrant dan hydrant yang sudah ada tidak berfungsi sehingga mempersulit petugas dalam melakukan pemasokan air pada saat terjadinya kebakaran
- Fasilitas mobil pemadam yang sudah tua dan tidak layak untuk dipergunakan sehingga menghambat pekerjaan petugas di lapangan
- Tidak adanya mobil komando untuk membantu membuka jalan saat terjadi kebakaran
- Tidak terpenuhinya response time sesuai standart karenajauhnya jarak tempuh ke lokasi kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran
- Belum adanya tandon air di setiap kecamatan untuk mensupply air saat pemadaman kebakaran
- Kesulitan mobil pemadam saat memadamkan api di gang-gang sempit
- Kesulitan dalam melakukan evakuasi/penyelamatan di tempat-tempat yang tinggi dan rumah bertingkat (vertical rescue)
- Kurangnya kualitas sumber daya manusia (pemadam) karena diperlukan pelatihan khusus
- Kurangnya kuantitas/jumlah personil pemadam
- Dibutuhkan tambahan insentif yang bersifat tunjangan resiko tinggi dalam menjalankan tugas
- Belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran (redcar) di setiap kelurahan
- Sikap masyarakat yang tidak memberikan akses jalan untuk mengutamakan mobil pemadam lewat dan berkerumun di tempat kejadian kebakaran
- Tidak adanya alat pemadam api ringan (APAR) di tempat-tempat umum seperti rumah ibadah sebagai penanganan awal kebakaran
- Tidak adanya jalur evakuasi jika terjadi kebakaran di tempat-tempat umum sebagai upaya penyelamatan
- Kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanganan dini kebakaran
- Masih terdapat masyarakat pra sejahtera yang tidak terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
- Kurangnya logistik, sarana dan prasarana ketika terjadi bencana alam dan bencana sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana
- Kurangnya bantuan alat untuk penyandang disabilitas
- Kurangnya bantuan sembako untuk masyarakat pra sejahtera



- Kurangnya personil siaga bencana
- Banyaknya gelandangan, anak terlantar, lansia, disabilitas terlantar dan orang dengan gangguan jiwa terlantar
- Belum tersedianya sumber data komponen PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Secara terperinci dan update sebagai dasar perencanaan
- Sulitnya menangani orang-orang yang akan dilakukan rehabilitasi lanjutan
- Masih terbatasnya sarana prasarana dalam pelayanan informasi rawan bencana (early morning system)
- Belum adanya dokumen penanggulangan bencana (rencana kontijensi (renkon), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), kajian resiko bencana yang merupakan dokumen kebencanaan yang berkeketetapan hukum)
- Belum optimalnya koordinasi antar dinas dengan BPBD dalam penanganan penanggulangan bencana
- Belum optimalnya kapasitas petugas dalam darurat bencana
- Masih terbatas sarana dan prasarana yang memadai untuk darurat bencana

b. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- Masih kurangnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
- Masih terdapatnya perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
- Masih rendahnya penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial Ketenagakerjaan
- Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi
- Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tebing Tinggi belum bisa dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan
- Belum optimalnya sinergitas dalam pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi modern
- Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga
- Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia
- Kurangnya minat masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
- Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sector terkait Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
- Minimnya kepedulian masyarakat menerapkan hidup berwawasan lingkungan



- Minimnya sarana dan prasarana dalam menangani masalah lingkungan hidup
- Meningkatnya beban pencemar
- Berkurangnya tutupan lahan (daerah bervegetasi)
- Minimnya kepedulian masyarakat menerapkan hidup berwawasan lingkungan
- Masih terdapatnya masyarakat disabilitas, orang tua jompo, dan masyarakat yang berada didaerah perbatasan kota yang belum tertib administrasi kependudukannya
- Peralatan Perekaman KTP-el yang merupakan Hibah dari Kemendagri kondisinya saat ini sudah kurang baik dalam melakukan perekaman
- Masih belum tertatanya Arsip Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dikarenakan belum adanya gedung yang khusus untuk menyimpan arsip tersebut perlunya penguatan pengelolaan data terpilah berbasis gender
- Masih rendahnya pemahaman, kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat tentang PKDRT dan upaya pencegahannya
- Masih rendahnya keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
- Masih rendahnya layanan kesehatan, layanan fasilitas umum, layanan rumah ibadah, layanan sekolah ramah anak sesuai dengan standard yang telah ditentukan
- Masih rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat tentang kekerasan terhadap anak
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak
- Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Trafficking dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Masih rendahnya pengetahuan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan anak
- Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan
- Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan inovasi TTG
- Masih rendahnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di lembaga kemasyarakatan
- Masih rendahnya SDM pengurus/Kader lembaga kemasyarakatan
- Masyarakat pengguna transportasi umum banyak yang beralih ke kendaraan pribadi terutama kendaraan roda dua Kemacatan di beberapa lokasi pada jam-jam tertentu
- Masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas
- Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya
- Kemacatan di beberapa lokasi pada jam-jam tertentu
- Masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas
- Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya



- Masih sangat rendahnya kepastian legal dan penjaminan hak-hak masyarakat mendapatkan informasi (Right To Know) dan Kewajiban Pemerintah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola server dan jaringan secara Mandiri terdapat mandiri dan tidak terintegrasi di Diskominfo
- Masih terdapat beberapa kantor yang belum difasilitasi jaringan internet
- Kurangnya tenaga ahli jaringan
- Perangkat server belum mencukupi kebutuhan penyimpanan data dan aplikasi seluruh
- OPD serta kabel jaringan Fiber Optik (FO) putus dan hilang
- Kurangnya tenaga Fotografer
- Masih belum memadainya sarana (kendaraan roda 4) dan prasarana kantor
- Kurangnya Sumber Daya Manusia di seksi persandian dan pengamanan informasi
- Kurangnya koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai badan negara yang salah satu fungsinya menaungi persandian dan pengamanan informasi di pemerintah daerah
- Belum terlaksananya survey dalam membangun Metadata Statistik Sektoral
- Kurang berpihaknya Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha / calon investor
- Belum adanya sinkronisasi penanganan permasalahan pelaku usaha
- Belum adanya kawasan ekonomi Kota Tebing Tinggi
- Kurangnya pemuda inovatif berwirausaha
- Tidak optimalnya hasil prestasi pemuda di kegiatan kepemudaan tingkat nasional, provinsi dan daerah
- Kurang updatenya Data kepemudaan
- Tidak optimalnya hasil prestasi di bidang olah raga
- Masih rendahnya tingkat kunjungan pemustaka ke perpustakaan
- Kurangnya kompetensi pustakawan
- Masih rendahnya layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai dengan layanan perpustakaan digital (e-library)
- Masih rendahnya pengelolaan tingkat ketersediaan arsip baik arsip dinamis dan statis sebagai bahan akuntabilitas kinerja
- Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal
- Belum adanya SDM yang berbasis kearsipan
- Pengembangan Kebudayaan
- Pengembangan Kesenian Tradisional
- Pembinaan Sejarah
- Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Pengelolaan Permuseuman

c. Urusan Pilihan

- Belum adanya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri, masih rendahnya pembungunan sumber daya industri dan sarana/prasarana industry
- Tingkat pengawasan dan penertiban perizinan di bidang industri masih rendah
- Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data ke SIINas masih rendah
- Kurangnya akses permodalan bagi UMKM di Tebing Tinggi
- Database UMKM yang belum update
- Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki NIB
- Kurangnya koperasi usaha yang memiliki izin usaha simpan pinjam
- Kurangnya sarana pemasaran produk UMKM
- Pemanfaatan pasar rakyat yang belum maksimal
- Kurangnya SDM dan peralatan pengujian produk tertutup
- Rendahnya kesadaran pemilik alat UTTP dalam menggunakan menggunakan alat UTTP yang bertanda tera sah dan berlaku
- Belum optimalnya pengawasan pedagang dalam mendukung tata tertib niaga di kota Tebing Tinggi
- Pengembangan pola karir jabatan fungsional SDM kemetrolagian belum optimal
- Banyaknya koperasi yang tidak aktif
- Masih kurangnya sumber daya kelompok petani, penyuluh pertanian dalam peningkatan produksi hasil pertanian serta penanganan hama dan penyakit tanaman
- Terbatasnya komoditi pertanian unggulan yang dikelola oleh para kelompok tani
- Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di kawasan yang berpotensi banjir
- Terbatasnya variasi tanaman dan kualitas tanaman hasil kultur jaringan
- Belum terintegrasinya penanganan pertanian dari hulu sampai hilir di kawasan kluster agrowisata terintegrasi
- Belum optimalnya produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- Belum terkoordinirnya manajemen pemasaran hasil pertanian/peternakan/perikanan
- Belum optimalnya penanganan permasalahan di lingkup petani karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyuluh pertanian
- Kurangnya sumber daya manusia di dalam penanganan kesehatan dan penyakit hewan ternak
- Masih terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan oleh petugas
- Kurangnya pengetahuan peternak tentang kualitas/mutu pakan ternak
- Kurangnya pengetahuan peternak dalam pengolahan dan pemasaran hasil ternak
- Kurangnya petugas kesehatan hewan dan daging, sarana dan prasarana pendukung pada Rumah Potong Hewan
- Tingginya biaya produksi budidaya ikan air tawar



- Masih rendahnya nilai ekonomis hasil produksi perikanan
- Kualitas SDM pembudidaya ikan, petugas pada bidang perikanan masih kurang
- Belum optimalnya jumlah benih ikan yang dihasilkan di BBI
- Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman
- Belum adanya keseragaman harga produk pangan pokok lokal dengan daerah hinterland
- Kurangnya atraksi (Festival budaya, serta pameran) yang unik di Kota Tebing Tinggi sebagai daya tarik Kota Tebing Tinggi
- Tidak adanya objek wisata buatan yang unggulan

d. Urusan Penunjang

- Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah
- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
- Belum optimalnya hasil-hasil penelitian
- Kurangnya capaian target Pendapatan Daerah
- Kurangnya capaian target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Belum maksimalnya pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Belum maksimalnya Disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan, dan pembiayaan dan belanja daerah
- Belum maksimal penatausahaan keuangan daerah
- Belum maksimalnya Evaluasi dan pelaporan SKPD
- Belum optimalnya penatausahaan asset
- Masih rendahnya jumlah ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan stuktural dan fungsional
- Masih rendahnya jumlah pejabat struktural yang telah memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan
- Masih adanya jabatan struktural dan fungsional yang belum terisi sesuai kompetensi jabatan
- Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional sesuai tupoksinya
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai sehingga banyak PNS yang mengajukan mutasi keluar daerah
- Belum maksimalnya pengelolaan data dan administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi kepegawaian berbasis IT
- Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah ASN sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- Standar Kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum merata
- Kurang optimalnya melakukan pemeriksaan fisik di lapangan

e. Urusan Pemerintahan

- Legalitas Penegasan Batas Lingkungan, Kelurahan, dan Kecamatan
- Penegasan Batas Wilayah antar Kabupaten/Kota
- Inventarisasi toponimi terbaru Kota Tebing Tinggi
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Selalu berkembang dan berubahnya peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, serta beragamnya latar belakang pendidikan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
- Kurangnya Sumber Daya Manusia/Perangkat di Kelurahan mengakibatkan pelayanan masyarakat tidak maksimal Fungsional Staf masih kurang
- Tidak adanya data kondisi umum dan data perkembangan kelurahan yang baik dan benar

2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Di dalam proses perencanaan, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan awal yang harus dilaksanakan. Pemahaman akan permasalahan yang terjadi didalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangat vital karena melalui rumusan masalah ini kita dapat mengidentifikasi isu-isu strategis yang kemudian akan berkembang menjadi prioritas pembangunan yang akan menjadi koridor dalam penyusunan program kerja daerah.

Permasalahan baru yang muncul sejak awal tahun 2020 adalah mewabahnya virus Covid-19 hampir di seluruh dunia. Wabah Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) turut berdampak pada berbagai sektor khususnya ekonomi dan sosial masyarakat.

Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang.

Permasalahan utama pembangunan Kota Tebing Tinggi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sumber daya manusia
2. Belum optimalnya penguatan infrastruktur
3. Belum optimalnya penguatan ekonomi
4. Belum optimalnya reformasi birokrasi

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Sumber daya manusia	<p>1. Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur</p> <p>2. Belum Optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan</p>	<p>1. Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal</p> <p>2. Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal</p> <p>1. Masih kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan Prasarana pendidikan yang memadai</p>
2.	Belum optimalnya penguatan ekonomi kreatif	<p>1. Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan</p> <p>2. Dukungan pengembangan komoditas dan produk unggulan bagi UMKM.</p>	<p>1. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi belum</p> <p>1. Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan masih kurang terhadap pelaku UMKM</p> <p>2. Peningkatan kemudahan akses permodalan dan skema pembiayaan belum optimal.</p>
3.	Belum Optimalnya Penguatan	<p>1. Belum optimalnya Sanitasi, Perumahan dan Transportasi</p>	<p>1. Pembangunan Transportasi yang berkualitas masih perlu ditingkatkan.</p> <p>2. Masih kurangnya pemerataan pembangunan sistem penyediaan air minum</p> <p>3. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum pada kawasan pemukiman</p> <p>4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan</p>

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Belum Optimalnya Pengelolaan pola ruang, Luasan Wilayah yang Kecil Sehingga Investasi tidak Optimal 3. Belum optimalnya penanganan Kebencanaan Banjir dan Kebakaran	5. Diperlukan Perluasan Wilayah 6. Pengelolaan / Pemeliharaan Sistem Drainase, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelamatan
4	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi	1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Masih rendah Penggunaan teknologi	1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal 1. Kualitas SDM yang masih rendah dibidang Teknologi. 2. Pendanaan untuk teknologi yang belum maksimal

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja.

Selain dilihat permasalahan dari sudut sasaran pembangunan daerah sehingga menjadi permasalahan yang prioritas untuk diselesaikan, perumusan masalah juga dirunut berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro serta realisasi anggaran yang ada untuk dapat dianalisis agar mengetahui kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam membiayai pembangunan.

Bab ini akan memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan dan membahas tentang perkiraan pendapatan. Selanjutnya berdasarkan gambaran kerangka ekonomi yang menggambarkan potensi daerah tersebut akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang harus ditetapkan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam hal kemampuan keuangan daerah, perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor merupakan dasar kebijakan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja secara berdayaguna dan berhasil guna.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Tebing Tinggi diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Tebing Tinggi mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting dalam penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan Laporan Nusantara yang diterbitkan oleh Bank Indonesia diterangkan bahwa perekonomian Indonesia sampai pada triwulan IV tahun 2022 mengalami perbaikan. Berlangsungnya perbaikan tersebut ditopang oleh terjaganya ekspor dan konsumsi swasta. Di sisi lain, ketegangan geopolitik Rusia- Ukraina diperkirakan berdampak pada pelemahan transaksi

perdagangan, dan terganggunya rantai pasokan dunia, akan menyebabkan melambungnya inflasi global seiring dengan kenaikan harga energi dan pangan dunia.

Prospek pemulihan ekonomi yang telah terjadi pada tahun 2022 diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2023, walaupun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berbagai strategi perlu dilakukan khususnya pada pengendalian inflasi agar perekonomian dapat tumbuh dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

Prospek pemulihan ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi covid-19 memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil dan IPM meningkat.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan

Uraian	Capaian Indikator Makro Pembangunan				
	Tahun-				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86
Inflasi	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
Tingkat Kemiskinan	9,66	9,22	10,19	10,14	9,57
Rasio Gini	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381
IPM	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS – Statistik Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan akan tetap positif, sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam RKP. Tetapi hal yang perlu diwaspadai pada tahun adalah tingginya inflasi dikarenakan belum kondusifnya situasi global. Dampak Perang Rusia-Ukraina masih menjadi hal yang harus diwaspadai karena menimbulkan potensi kenaikan harga-harga komoditas serta kelangkaan pangan dunia, dan kenaikan harga energi. Perlambatan perekonomian global, khususnya negara-negara tujuan ekspor juga akan menyebabkan kinerja ekspor Indonesia yang pada ujungnya akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu diperlukan strategi yang tepat serta sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.955,19 triliun dan PDRB per



kapita mencapai Rp 63,19 juta. Secara keseluruhan perekonomian Sumatera Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 4,76 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2,61 persen.

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 23,01 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kategori Industri Pengolahan sebesar 19,13 persen dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,99 persen. Sementara itu, kategori-kategori lainnya memberikan total kontribusi sebesar 38,87 persen terhadap perekonomian di Sumatera Utara.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 didominasi oleh Lapangan Usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (23,01 persen); Industri Pengolahan (19,13 persen); dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,99 persen).

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2018 s/d 2022 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tebing Tinggi beberapa tahun belakangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi di tahun 2020 mengalami penurunan dan tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Tebing Tinggi	5,17	5,15	-0,7	2,51	4,01
2	Provinsi Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
3	Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mencapai 4,01%. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021. Secara umum, situasi perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi



dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 24,68%, sedangkan sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 14,49%. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar lainnya adalah sektor industri pengolahan yakni sebesar 12,27%.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
a	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	70,58	1,28	74,27	1,25	78,16	1,29	79,22	1,25	86,86	1,25
b	Pertambangan dan Penggalian	7,84	0,14	8,1	0,14	8,52	0,14	8,96	0,14	9,66	0,14
c	Industri Pengolahan	706,29	12,81	726,29	12,26	724,73	11,98	776,01	12,22	850,47	12,27
d	Pengadaan Listrik dan Gas	7,72	0,14	8,30	0,14	8,72	0,14	9,12	0,14	9,71	0,14
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Limbah	13,3	0,24	13,77	0,23	13,79	0,23	13,99	0,22	14,61	0,21
f	Konstruksi	813,57	14,76	885,21	14,94	860,09	14,22	919,98	14,49	1.004,61	14,49
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.253,05	22,73	1.404,95	23,72	1.453,71	24,03	1.552,48	24,45	1.710,78	24,68
h	Transportasi dan Pergudangan	439,91	7,98	470,83	7,95	486,66	8,05	505,27	7,96	566,28	8,17
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,83	4,13	245,26	4,14	241,13	3,99	241,13	3,80	264,74	3,83
j	Informasi dan Komunikasi	104,01	1,89	113,32	1,91	122,43	2,02	133,88	2,11	150,75	2,17
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	285,76	5,18	293,24	4,95	300,38	4,97	331,4	5,22	371,30	5,36
l	Real Estat	459,4	8,33	491,46	8,30	515,02	8,51	530,97	8,36	86,86	8,10
m,n	Jasa Perusahaan	25,35	0,46	26,57	0,45	27,87	0,46	28,7	0,45	32,36	0,47



Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	639,86	11,61	671,4	11,33	697,2	11,53	698,27	11,00	737,07	10,63
p	Jasa Pendidikan	343,91	6,24	369,61	6,24	386,58	6,39	395,68	6,23	418,79	6,04
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,22	1,15	68,66	1,16	70,51	1,17	69,93	1,10	78,87	1,14
r,s,t,u	Jasa Lainnya	50,91	0,92	52,97	0,89	53,65	0,89	54,97	0,87	61,69	0,89
PDRB		5.512,51	100	5.924,20	100	6.049,16	100	6.349,95	100	6.930,27	100

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023



Berdasarkan tabel 3.3 diatas, yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu tahun 2018-2022 masih didominasi sektor yang sama. Lima sektor dominan tersebut secara berturut-turut antara lain:

1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
2. Konstruksi;
3. Industri Pengolahan;
4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan
5. Transportasi dan Pergudangan.

Besaran distribusi dari kelima sektor terhadap PDRB dari tahun ke tahun cukup stabil. Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kisaran nilai 22% hingga 24%; sektor konstruksi pada kisaran 14%; industri pengolahan pada kisaran 12%; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib pada kisaran 10% - 11% dan Transportasi dan Pergudangan pada kisaran 7% - 8%.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari Rp5.512,51 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp6.930,27 miliar pada tahun 2022.

Sementara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) setiap tahun pada periode 2018-2022 juga selalu mengalami peningkatan. PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi pada 2018 sebesar Rp3.760,50 miliar, menjadi Rp4.186,31 miliar pada tahun 2022. Secara lengkap PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi selama periode 2018- 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
a	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	53,70	4,09	55,52	3,38	56,81	2,32	57,13	0,57	59,33	3,85
b	Pertambangan dan Penggalian	6,27	3,40	6,41	2,24	6,65	3,84	6,89	3,60	7,14	3,60
c	Industri Pengolahan	484,84	2,06	493,54	1,79	492,19	-0,27	500,45	1,68	506,61	4,54
d	Pengadaan Listrik dan Gas	7,11	2,95	7,50	5,40	7,88	5,11	8,18	3,76	8,55	3,44
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Limbah	9,07	3,08	9,38	3,36	9,34	-0,42	9,40	0,59	9,72	4,10
f	Konstruksi	564,07	5,42	596,72	5,79	561,39	-5,92	585,59	4,31	598,49	9,33
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	858,97	8,76	934,32	8,77	930,67	-0,39	967,98	4,01	1.007,66	8,02
h	Transportasi dan Pergudangan	305,25	4,95	320,37	4,95	314,97	-1,69	317,77	0,89	347,42	9,35
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	169,40	6,24	180,49	6,55	176,37	-2,28	176,03	-0,19	190,15	4,16
j	Informasi dan Komunikasi	98,16	6,00	104,04	6,00	111,61	7,27	118,94	6,58	130,06	9,35
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	179,44	1,98	182,40	1,64	187,70	2,91	198,61	5,81	206,88	4,16



Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
l	Real Estat	307,57	3,53	316,51	2,91	322,81	1,99	323,90	0,34	339,06	4,68
m,n	Jasa Perusahaan	16,45	1,54	16,84	2,34	16,74	-0,60	16,77	0,21	17,76	5,88
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	384,77	4,01	399,44	3,81	397,65	-0,45	398,56	0,23	398,91	0,09
p	Jasa Pendidikan	230,48	4,99	241,99	4,99	245,91	1,62	250,91	2,03	263,25	4,92
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,25	7,35	48,65	5,19	48,17	-0,99	47,40	-1,60	51,62	8,91
r,s,t,u	Jasa Lainnya	38,69	3,21	39,93	3,21	39,54	-0,99	40,26	1,83	43,69	8,51
PDRB		3.760,50	5,17	3.954,03	5,15	3.926,39	-0,70	4.024,78	2,51	4.186,31	4,01

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK yang terdapat pada tabel 3.4 diatas, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi dan Komunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar 9,35 persen. Sementara itu lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memiliki pertumbuhan paling kecil yaitu sebesar 0,09 persen.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans sumatera untuk Wilayah Sumatera Utara yaitu Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi dan akan disusul jalan tol ruas Kuala Tanjung– Tebing Tinggi–Parapat pada Tahun 2022, maka akan terdapat tantangan bagaimana investor tetap tertarik untuk berinvestasi di Kota Tebing Tinggi, karena tentu saja dengan akses jalan tol yang yang menghubungkan Kota Tebing Tinggi dengan kawasan nasional yaitu Bandara Udara Internasional Kualanamu, Kasawasan Strategi Pariwisata Nasional Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung serta Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai tujuan bagi investor berinvestasi di wilayah Kota Tebing Tinggi. Selain tantangan, diperkirakan bahwa pada Tahun 2022 mulai terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kota Tebing Tinggi terutama terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis pada sektor perdagangan dan jasa.

Berdasarkan kondisi perekonomian di Kota Tebing Tinggi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2024 antara lain sebagai berikut.

1. Potensi kenaikan inflasi, dimana pergerakan inflasi tahunan dipengaruhi oleh perubahan harga bahan makanan;
2. Menurunkan angka kemiskinan;
3. Menurunkan angka pengangguran terbuka;
4. Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif;
5. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
7. Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Tebing Tinggi di tahun 2024 antara lain:

1. Letak Kota Tebing Tinggi yang sangat strategis untuk dikembangkan menjadi kota jasa;

2. Pengembangan sector pertanian, pariwisata berbasis pertanian dan industri untuk mendukung pariwisata;
3. Tersedianya berbagai infrastruktur penunjang bagi pertumbuhan ekonomi;
4. Pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;
5. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah;
6. Tersedianya lembaga pendidikan yang sudah dikenal luas;
7. Stabilitas keamanan yang kondusif sehingga membuat investor nyaman untuk berinvestasi.

Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Adapun target/proyeksi Indikator Makro Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Target/proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Target Tahun ke-
		2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,50 – 5,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,30
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,00
5	Rasio Gini	0,30
6	Laju Inflasi (%)	2,5
7	Penurunan Emisi GRK	-

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (money follow program priority). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.



Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan system Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau system tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan asset daerah secara professional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, BKP, Obligasi Daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari PAD;
2. Optimalisasi kerjasama dan dukungan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Pinjaman daerah untuk pembiayaan kegiatan strategis.



3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan daerah tidak terlepas dari ruang fiskal yang tersedia dari neraca pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pajak secara massive, dan optimalisasi serta ekstensifikasi retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU & DAK) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dan ; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Struktur keuangan Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2021 menggambarkan APBD Kota Tebing Tinggi terus yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, dan di Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi Pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), beberapa komponen Pendapatan dan Belanja terjadi pergeseran yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19 tersebut.

3.2.2 Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (dana



perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya sebagai berikut.

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasipajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
3. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah
4. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Transfer terutama terkait dengan dana bagi hasil (DBH).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Untuk komponen Pendapatan Daerah merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, besaran Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Berjalan 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2024
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN DAERAH	600.925.434.000,00	692.338.666.715,00	663.506.188.243,25	118.198.630.982,00	697.388.603.853,00
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	119.402.798.000,00	82.930.324.048,00	88.747.190.213,25	9.691.254.201,00	116.577.576.853,00
	Pajak daerah	30.690.000.000,00	35.233.888.044,00	38.764.728.783,00	8.727.907.860,00	39.795.000.000,00
	Retribusi daerah	5.333.790.000,00	3.677.012.713,00	3.781.967.378,00	823.509.188,00	4.465.500.000,00
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	140.000.000.000,00	10.744.586.153,00	12.619.803.620,00	-	14.891.600.000,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	69.379.008.000,00	33.274.837.138,00	33.580.690.432,25	139.837.153,00	57.425.476.853,00
2	Pendapatan Transfer	436.552.636.000,00	579.081.192.667,00	541.876.466.636,00	107.139.617.750,00	572.798.346.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	419.071.661.000,00	540.809.856.612	488.712.339.718,00	107.139.617.750,00	519.559.132.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.450.975.000,00	38.271.336.055,00	53.164.126.918,00	-	53.239.214.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	450.000.000.000,00	30.327.150.000,00	32.882.531.394,00	-	8.012.681.000,00
	Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000.000,00	30.327.150.000,00	32.882.531.394,00	-	8.012.681.000,00

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah rata-rata masih lebih besar disbanding dengan komponen Pendapatan Asli Daerah, sehingga hal ini menjadi tantangan untuk menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang ada.

3.2.3 Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan belanja daerah mencakup sebagai berikut.

- 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya;
- 3) Belanja Tidak Terduga;
- 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip money follow programme priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Berjalan 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2024
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA	638.361.960.997,00	668.884.141.841,40	680.833.700.516,90	75.265.591.330,00	762.114.583.505,00
1	Belanja Operasi	552.098.977.089,00	498.357.709.828,21	547.944.759.101,69	74.335.663.751,00	674.078.895.096,00
	Belanja Pegawai	296.481.359.092,00	280.697.164.549,00	309.669.252.569,00	54.507.892.647,00	333.755.858.457,00
	Belanja Barang dan Jasa	250.570.504.305,00	205.425.202.570,21	222.642.076.074,69	19.624.789.104,00	327.683.972.949,00
	Belanja Bunga	1.879.174.692,00	1.423.452.138,00	409.121.443,00	-	-
	Belanja Hibah	2.253.000.000,00	8.344.656.571,00	14.682.903.615,00	202.982.000,00	10.639.063.690,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	2.467.234.000,00	541.405.400,00	-	2.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	914.939.000,00	-	-	-	-
2	Belanja Modal	85.662.983.908,00	169.669.665.003,19	132.550.214.696,21	929.927.579,00	70.685.688.409,00
	Belanja Modal Tanah	9.149.996.700,00	-	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.106.928.708,00	39.966.213.330,40	20.944.774.956,00	403.442.100,00	20.747.185.863,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.353.424.000,00	54.656.156.010,04	31.422.852.136,18	-	21.286.204.746,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	35.740.076.500,00	72.229.862.211,75	75.339.862.657,00	470.457.879,00	26.655.385.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.312.558.000,00	2.660.753.451,00	4.335.877.872,03	3.911.000,00	1.331.101.900,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	156.680.000,00	506.847.075,00	52.116.600,00	663.810.900,00
3	Belanja Tidak Terduga	600.000.000,00	856.767.010,00	338.726.719,00	-	17.350.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	600.000.000,00	856.767.010,00	338.726.719,00	-	17.350.000.000,00

Pada tabel 3.7 diatas terlihat bahwa Tahun Anggaran 2020 mengalami penyesuaian terhadap alokasi Belanja Daerah yang hal ini tidak terlepas dari situasi pandemic covid-19 yang melanda sepanjang Tahun 2020.

Belanja Daerah secara umum diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasi yang kebutuhannya dalam rangka menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Belanja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut.

1. Pemenuhan Mandatory Spending, yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh Undang-undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan social dan ekonomi daerah seperti mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), besaran alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (sesuai amanat UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
2. Pencapaian Kegiatan Strategis Daerah, memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah.

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena selisih jumlah Pendapatan Daerah lebih kecil daripada Belanja Daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa perhitungan anggaran (SiLPA).

SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Berjalan 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2024
1	2	3	4	5	6	7
	PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Pembiayaan	55.727.426.997,00	27.907.359.734,47	31.682.152.855,07	-	10.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.727.426.997,00	27.907.359.734,47	31.682.152.855,07	-	10.000.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	18.290.900.000,00	19.679.731.753,00	9.240.399.986,00	-	6.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000,00	3.958.531.741,00	4.000.000.000,00	-	6.000.000.000
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.790.900.000,00	15.721.200.012,00	5.240.399.986,00	-	-

Pada tabel 3.8 diatas, penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 berada pada besaran angka Rp. 31.682.152.855,07 atau 4,65 persen terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga hal ini akan terus menjadi perhatian untuk bagaimana Belanja Daerah yang telah ditetapkan akan terserap sepenuhnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui kolaborasi pendanaan pembangunan melalui skema kerjasama KPBU, obligasi daerah, hibah dan pinjaman daerah yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan dan memperkuat peran fiscal keuangan daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah baik pada sector infrastruktur ataupun sector-sektor pembangunan lainnya.

Pinjaman Daerah merupakan alternative sumber pendanaan APBD yang diarahkan pada proyek kegiatan strategis daerah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan memiliki return of revenue untuk menutupi pinjamannya sehingga tidak terlalu membebani APBD.

Peningkatan Belanja Pembangunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah melalui pinjaman dengan Lembaga Keuangan dan Kerjasama dengan Lembaga Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomro 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu defisit anggaran.
3. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada:

- 1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD;
 - 2) Pendayaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).
4. Dengan asumsi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 707.617.737.821 dan asumsi belanja sebesar Rp 762.117.860.501, terjadi defisit sebesar Rp. 54.500.122.680 atau setara dengan 7,07%

Dengan merujuk kepada regulasi yang mengatur ambang batas yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.07/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023, defisit untuk APBD sebesar $\leq 2,2\%$ (Kota Tebing Tinggi tergolong kategori kapasitas fiskal rendah) maka disarankan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi defisit:

- 1) Efisiensi belanja operasi dan belanja modal
- 2) Peningkatan pendapatan melalui peningkatan kinerja (insentif fiskal dan pendapatan lain lain yang sah)
- 3) Pemberdayaan aset Pemerintah Kota Tebing Tinggi

3.3 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Konsep otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah berkumpul dan dicatat ke dalam system akuntansi pemerintah daerah. Berbagai jenis penerimaan daerah kemudian dikumpulkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari BUMD. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk deviden maupun pajak dan retribusi. BUMD juga berperan dalam menciptakan tambahan lapangan kerja dan menjadi salah satu stakeholder dalam mencapai target-target pembangunan daerah lainnya.

Sebagai bagian dari dunia bisnis, BUMD juga akan berhadapan dengan prinsip-prinsip pasar baik sebagai consumer maupun produser. Kondisi pasar secara umum akan mencerminkan persaingan menuju sempurna. Untuk itu, BUMD harus dikelola dengan efektif, efisien, penuh kehati-hatian dan akuntabel.

BUMD Kota Tebing Tinggi adalah PDAM Tirta Bulian. Dalam perkembangan dunia usaha, PDAM Tirta Bulian dihadapkan tantangan yang berat dan persaingan yang semakin ketat. Karena



itu, PDAM Tirta Bulian perlu melakukan penyesuaian strategi bisnisnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi.

Kebijakan BUMD sebagai salah satu mitra Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui:

1. Mengoptimalkan peranan BUMD sebagai bagian dari factor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menjadi bagian dari sumber peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dimaksud, dilaksanakan melalui strategi diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
2. Optimalisasi sumber daya pendanaan untuk pengembangan bisnis sekaligus menjadi bagian dari pencapaian target-target prioritas pembangunan daerah.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi merupakan tahun Kedua yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. Tujuan dan Sasaran RKPD tahun 2024 Kota Tebing Tinggi juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 Kota Tebing Tinggi.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Untuk mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional, maka dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, dengan Tema Pembangunan Nasional yaitu ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Untuk menjawab isu-isu strategis Tahun 2024 ditetapkan 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam merumuskan Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2024 Tebing Tinggi juga berpedoman terhadap Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu ***“Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”***.

Berdasarkan tema tersebut telah ditetapkan 4 (Empat) Prioritas Provinsi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif



Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dan 43 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara

No	Program Prioritas	Kegiatan
1.	Proritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan	Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus
		Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “SIEMAK” (Program Edukasi Perempuan dan Anak);
		Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-Library;
		Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem;
		Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut);
		Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut);
		Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;
		Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
		Optimalisasi Jangkauan lokasi dan pelayanan Kesehatan bergerak
		Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA;
		Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;
		Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);
		Penguatan Edukasi Masyarakat Sadar dan Tangguh Bencana;
2.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC);
		Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri);



No	Program Prioritas	Kegiatan
		<p>Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri);</p> <p>Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri);</p> <p>Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM);</p> <p>Travel Fair Dalam dan Luar Negeri;</p> <p>Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata;</p> <p>Pengembangan pengembangan Wellness/Healthy Tourism dan Pariwisata Minat Khusus serta Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi dan Peningkatan Kualitas Calender of Event;</p> <p>Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;</p> <p>Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif</p> <p>Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional;</p>
3.	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	<p>Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;</p> <p>Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi.</p> <p>Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;</p> <p>Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang</p> <p>Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias;</p> <p>Pengembangan SPAM Mebidang dan Pembangunan SPAM Seriti;</p> <p>Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah;</p> <p>Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu;</p> <p>Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwisata;</p> <p>Pembangunan Satu Data Digital Daerah</p> <p>Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan "SUMUT HIJAU"</p>
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	<p>Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</p> <p>Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB;</p> <p>Peningkatan kualitas SDM Aparatur</p>



No	Program Prioritas	Kegiatan
		Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri;
		Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC) dan Publikasi capaian pembangunan melalui Event North Sumatra Innovation and Achievement Summit

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah serta untuk mendukung terwujudnya Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan Tema RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi yaitu ***“Peningkatan Pembangunan Kota Tebing Tinggi melalui Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Peningkatan Infrastruktur dan penguatan Ekonomi yang Berkelanjutan”*** maka Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi sesuai RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, yaitu :

1. Peningkatan SDM
2. Peningkatan Ekonomi Kreatif
3. Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur
4. Penguatan Reformasi birokrasi

Adapun Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat
3. Meningkatkan Kompetensi ASN
4. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
5. Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor unggulan
6. Meningkatkan Investasi
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan secara merata
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
9. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
10. Pelayanan Publik yang Prima

Adapun Tujuan, Sasaran dan Strategi Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi sesuai Tahun Kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Jangkauan dan Mutu Layanan Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Peningkatan Mutu ASN
	Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup	Pemenuhan kebutuhan Dasar Sosial Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
	Meningkatnya Investasi	Mempermudah Perizinan
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

Adapun Prioritas Pembangunan, Program Prioritas dan Arah Kebijakan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dan
Program Prioritas Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan SDM	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
		Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
		Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
		Program Pemberdayaan Sosial	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Rehabilitasi Sosial	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Penanganan Bencana	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
Program Pemenuhan Hak Anak	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar		
2.	Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pengembangan Ekspor	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penggunaan Produk Lokal
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penggunaan Produk Lokal
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penggunaan Produk Lokal
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Penggunaan Produk Lokal
		Program Penyuluhan Pertanian	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengembangan sumberdaya pariwisata dan Ekonomi kreatif	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Peningkatan Daya tarik destinasi Pariwisata	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pelayanan Perizinan Terintegrasi
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Terintegrasi
		Program Promosi Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Terintegrasi
3.	Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Gedung	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Penanggulangan Bencana	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Pengelolaan Persampahan	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		Dan Beracun (Limbah B3)	ramah lingkungan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
4.	Pengoptimalan Reformasi birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
		Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel

Prioritas pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pada tahun 2024 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Sumber daya manusia	<p>1. Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur</p> <p>2. Belum Optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan</p>	<p>1. Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal dan informal bagi sumber daya aparatur</p> <p>2. Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal</p> <p>1. Masih kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan Prasarana pendidikan yang memadai</p>
2.	Belum optimalnya penguatan ekonomi kreatif	<p>1. Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha masih belum</p> <p>2. Dukungan pengembangan komoditas dan produk unggulan bagi UMKM.</p>	<p>1. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi belum merata</p> <p>1. Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan masih kurang terhadap pelaku UMKM</p> <p>2. Peningkatan kemudahan akses permodalan dan skema pembiayaan belum optimal.</p>
3.	Belum Optimalnya Penguatan infrastruktur	<p>1. Belum optimalnya Sanitasi, Perumahan dan Transportasi</p>	<p>1. Pembangunan Transportasi yang berkualitas masih perlu ditingkatkan.</p> <p>2. Masih kurangnya pemerataan pembangunan sistem penyediaan air minum</p> <p>3. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum pada kawasan pemukiman</p> <p>4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan</p>



No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none">2. Belum Optimalnya Pengelolaan pola ruang, Luasan Wilayah yang Kecil Sehingga Investasi tidak Optimal3. Belum optimalnya penanganan Kebencanaan Banjir dan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">5. Diperlukan Perluasan Wilayah6. Pengelolaan / Pemeliharaan Sistem Drainase, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelamatan
4	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju	<ul style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik2. Masih rendah Penggunaan teknologi	<ul style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal1. Kualitas SDM yang masih rendah dibidang Teknologi.2. Pendanaan untuk teknologi yang belum maksimal

Adapun penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2024 dan Prioritas Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.5

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional Tahun 2024

NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2024)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
1.	PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	PP 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2024)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
					Program Penyuluhan Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Pengembangan sumberdaya pariwisata dan Ekonomi kreatif Program Peningkatan Daya tarik destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
2.	PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2024)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
					Program Penataan Bangunan Gedung
					Program Penyelenggaraan Jalan
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi
					Program Penyelenggaraan Tata Ruang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Program Pengembangan Perumahan
					Program Kawasan Permukiman
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
					Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
					Program Pengelolaan Persampahan
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2024)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
					Program Penanggulangan Bencana
3.	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP 1 : Kualitas SDM dan Sosial Kemasyarakatan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan Arsip Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Peningkatan SDM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Kepegawaian Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2024)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
			Kesehatan Masyarakat		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		
			Program Perlindungan Perempuan		
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
			Program Pemenuhan Hak Anak		



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2024)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
			(PHA)		
4.	PN 4 : Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	PP 4 : Peningkatan Tata kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif		Pengoptimalan Reformasi birokrasi	Program Pembinaan Perpustakaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan , Pengendalian , dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.	PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.	PP 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	
6	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	
7	PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	4 : Peningkatan Tata kelola Pemerintah yang Berkualitas		Pengoptimalan Reformasi birokrasi	



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2024)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2024)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
	Pelayanan Publik	dan Inovatif			



4.3 Telaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Tebing Tinggi

Telaahan Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses adalah salah satu hal yang menjadi masukan dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kota Tebing Tinggi. Pokok – pokok pikiran tersebut selanjutnya disinergikan dalam Program dan Kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah terkait. Usulan Pokok-pokok Pikiran tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun fokus dan prioritas pembangunan daerah meliputi antara lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
1	Peningkatan SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM, PKK, Karang Taruna Kelurahan, Posyandu, Kepala Lingkungan)	Kel Rambung, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Sosialisasi / Pelatihan SaPA (Sahabat Perempuan dan Anak)	Kel Rambung, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Pembangunan Poskamling	Jl. Pelita lk 02 Kel Pasar Baru, Kota Tebing Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Rehabilitasi Jalan	Jl. T. I. Bonjol Gg. Percontohan Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Rehabilitasi Jalan	Jl. Berlian Lk. 4 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Rehabilitasi Jalan	Jl. Tembaga Lk. 3 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Mutiara Lk. 4 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Berlian Lk. 4 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Rehabilitasi Saluran Drainase	Gg. Amin Lk. 3 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Rehabilitasi Jalan	Jl. Keluarga Lk. 4 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11	Rehabilitasi Jalan	Jl. Berlian s/d Jl. Emas Lk. 4 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Pembangunan Jalan	Jl. Emas s/d Jl. Keluarga Lk. 4 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
13	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jl. Baja Lk. 4 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	Kenaikan Insentif / Gaji Linmas	Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja
15	Rehabilitasi Jalan	Jl. Kurma Lk. 4 Kel. Damar Sari Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
16	Rehabilitasi Jalan	Jl. Datuk Bandar Kajum Lk. 3 Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
17	Rehabilitasi Jalan	Jl. Tangkahan PAsir Haji Budiman Lk. 2 Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
18	Penambahan honor kepling	Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
19	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. T. I. Bonjol Lk. 2 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
20	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Swasembada lingk. I kel. berohol Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
21	Rehabilitasi Saluran Drainase	Gg. Famili II, Kelurahan Bandarsono, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
22	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl Mandailing Lk 01 Kel Mandailing, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
23	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Emas s/d Jl. Keluarga Lk.4 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
24	Rehabilitasi Saluran Drainase	jl selat sunda lk 01 kel mandailing, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
25	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
26	Pembangunan Tanggul Sungai	Jl. H.M Yamin Lk.2 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
27	Pembangunan Tanggul Sungai	Jl. T. I. Bonjol Gg. Mutiara Lk.1 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
28	Rehabilitasi Jalan	Jl. Matahri LK III, Kel. Karya Jaya, Kec. rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
29	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Matahri Lk III, Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
30	Rehabilitasi Jalan	Jl. LKMD 1 , Lk IV Kel. Karya jaya , Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
31	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. LKMD 1 LK IV, Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
32	Rehabilitasi Jalan	Jl. LKMD 2 , LK IV, Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
33	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. LKMD 2 , LK IV, Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan, Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
		Tebing Tinggi	
34	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Pulau Belitung, Gg. Masjid, Lk V, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
35	Rehabilitasi Jalan	Lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
36	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Pulau Belitung, Lk V, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
37	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan M Akub Hasibuan Gg Gunung Andon Lingkungan Iv Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
38	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl Persatuan Lk 03 Kel Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
39	Rehabilitasi Jalan	Gang Untung Kelurahan Karya Jaya Lingkungan 3, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
40	Rehabilitasi Jalan	Jalan Cahaya, Lk. 3, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
41	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Lk. 1 s/d 4 Kelurahan Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
42	Rehabilitasi Jalan	Jalan penantian lingkungan I kelurahan karya jaya kec rambutan , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
43	Rehabilitasi Jalan	Jl tenggiri Lk IV kel badak bejuang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
44	Rehabilitasi Jalan	Jl unta Lk V kel badak bejuang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
45	Rehabilitasi Jalan	Gg. damai dan Gg. Bahagia LK. VII Kel. Bandarsono Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
46	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jln Gunung Martimbang gang berdikari, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
47	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan . H. Ahmad bilal, Lk 7, Kel. T.Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
48	Pembangunan Tanggul Sungai	Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan, lingkungan 3, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
49	Rehabilitasi Jalan	Jl. tenggiri kel badak bejuang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
50	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. perak, kampung marbun ujung lk III kel tambangan kec padang hilir , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
51	Rehabilitasi Jalan	jalan pondok indah lk II kel damar sari kec padang hilir , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
52	Pembangunan Tanggul Sungai	Jl. Tenggiri lk IV Kel badak bejuang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
53	Pembangunan Tanggul Sungai	Jl tenggiri lk IV kel badak bejuang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
54	Pembangunan Tanggul Sungai	Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan, lingkungan 4, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
55	Rehabilitasi Jalan	Jl. tapian nauli, lk III, Kel damar sari, kec padang hilir , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
56	Rehabilitasi Jalan	Jln. Abdul Rahim Lubis LK. VII Kel. Tebing Tinggi Kec. Hilir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
57	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl Kuningan, lk IV, kel Tambangan Hulu, Kec Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
58	Rehabilitasi Saluran Drainase	jl.Asrama Kodim Lk II, Kel Damar Sari, Kec Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
59	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Ir. H Juanda LK II, Kel. Karya Jaya, kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
60	Rehabilitasi Saluran Drainase	jalan.kelapa sawit -jalan sei klembah lk 7 kel.durian kec. bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
61	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Karya Perjuangan LK II - Lk III, Kel. karya jaya , Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
62	Rehabilitasi Jalan	Jl. karya Perjuangan LK III, Kel. Karya Jaya , Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
63	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Karya LK III , Kel. karya Jaya, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
64	Rehabilitasi Saluran Drainase	jalan pustu, lingk 02, kel Tanjung Marulak Hilir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
65	Rehabilitasi Jalan	JLn Merpati BTN GRIYA Bulian Gg. Labersa Lk. 3 Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
66	Rehabilitasi Saluran Drainase	gang akhir lingkungan 4, kelurahan lalang , kecamatan rambutan , Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
67	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jln Merpati BTN GRIYA Bulian Lk 3 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
68	Pembangunan Tanggul Sungai	Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
69	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jln. Jambu LK. I	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
		Kel. Pelita, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi	
70	Rehabilitasi Saluran Drainase	gang amal, lingkungan 2 , kelurahan mekar sentosa, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
71	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Pulau Samosir Lk I, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
72	Rehabilitasi Saluran Drainase	jalan prof dr hamka lingkungan 1 kel bulian kec bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
73	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Pulau Irian Lk IV, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
74	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Karya LK IV, Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
75	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan LKMD, gang Jepara, lingk 01, kel Lalang, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
76	Rehabilitasi Jalan	Jl. Pulau Samosir Gg Kesatuan Lk I, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
77	Rehabilitasi Jalan	Jl. Pulau Samosir Gg Sonduk Lk I, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
78	Rehabilitasi Jalan	Jl. Pulau Samosir Lk I, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
79	Rehabilitasi Saluran Drainase	gang sirom lingkungan 4, kelurahan lalang, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
80	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan I s/d VI Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
81	Rehabilitasi Saluran Drainase	jalan bukit bundar, lingk 03, kelurahan lalang, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
82	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan M.Yamin sampai jalan kebun lingkungan III Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
83	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Gg Mesjid Lk I, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
84	Penyediaan Prasarana, Sarana dan	Gg Bakti Lk VI, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
	Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		
85	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Tengku Hasyim Gg Famili Lk I, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
86	Rehabilitasi Saluran Drainase	Gg Rukun Lk IV, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
87	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Batu Ganjang Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
88	Rehabilitasi Saluran Drainase	Gg Belitung Lk III, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
89	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Karya Lingkungan III Kota Tebing Tinggi, Rambutan Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
90	Pembangunan Jalan	Jalan Karya Lingkungan III, Kota Tebing Tinggi, Rambutan Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
91	Rehabilitasi Saluran Drainase	Gg Dame Lk VIII, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
92	Pembangunan Tanggul Sungai	Jl. SM Raja Lk IX Gereja Advent, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
93	Rehabilitasi Jalan	Gg Bahagia Lk VII, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
94	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jln. Damar Sari Lk. V Gang Mesjid Kelurahan Damar Sari Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
95	Diperlukan adanya Penambahan Insentif Kader Posyandu	Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
96	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jln Pala Lk III Kelurahan Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
97	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jalan P. Irian, gg. Famili, Lk IV, Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
98	Penyediaan Prasarana, Sarana dan	Jalan Pulau Belitung, gg. Madrasah, Lk V, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
	Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		
99	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	jalan kf tandean lingkungan 3 kel bandar sakti kec bajenis , Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
100	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jl Bukit Bundar Kelurahan lalang Gang Keluarga Kecamatan Rambutan , lingkungan 3, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
101	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jl Toba Kelurahan lalang Kecamatan Rambutan , lingkungan 3, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
102	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jalan Pustu 1 Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir , Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
103	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jalan Pustu 2 Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir , Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
104	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	gang akhir lingkungan 4, kelurahan lalang , kecamatan rambutan , Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
	menunjang Fungsi Hunian		
105	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang amal, lingkungan 2 , kelurahan mekar sentosa, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
106	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Gg. Mushollah Marahalim Lk.3 Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
107	Rehabilitasi Saluran Drainase	jalan k.f tandean lingkungan III, kelurahan bandar sakti, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
108	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	jalan gunung martimbang , gang berdikari , kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
109	Pembangunan Tanggul Sungai	Jalan Gatot Subroto, Lk I, Kelurahan Lubuk Baru, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
110	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	jalan kulkas, lingkungan 2, kelurahan, Mekar sentosa, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
111	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang singa , lingkungan 4, kelurahan lalang, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
112	Rehabilitasi Jalan	Jalan Samosir, Lk I, Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
113	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jalan bukit ikhlas, lingkungan 02, kelurahan Rantau laban, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
114	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Gg. Keluarga Deblod Sundoro, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
115	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jalan LKMD, gang Jepara, lingk 01, kel Lalang, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
116	Rehabilitasi Saluran Drainase	jl rao lk 1 kel pasar baru, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
117	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Soekarno Hatta Lk.3 Kel. Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
118	Rehabilitasi Saluran Drainase	jl pelita gg amal lk 2 kel pasar baru, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
119	Rehabilitasi Saluran Drainase	jl mandailing lk 01 kel mandailing, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
120	Rehabilitasi Jalan	jalan KF Tandean lingkungan III kelurahan Bandar sakti Kecamatan Bajenis , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
121	Pembangunan Tanggul Sungai	jl iskandar muda lk 05 kel pasar gambir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
122	Rehabilitasi Jalan	lk.IV gg cendana, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
123	Rehabilitasi Saluran Drainase	pasar sakti, jalan KF tandean kelurahan bandar sakti, kecamatan bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
124	Rehabilitasi Jalan	jl tenggiri Lk IV kel pasar gambir , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
125	Rehabilitasi Saluran Drainase	jl beruang lk VII kel pasar gambir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
126	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Perbatasan Lingkungan 3 (Tiga) Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
127	Rehabilitasi Jalan	Jl Unta Lkv Kel Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
128	Rehabilitasi Jalan	Jalan Bagelen LK 2, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
129	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jl. Pulau Belitung Gg E, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
130	Rehabilitasi Saluran Drainase	jalan merpati lingkungan 3 (tiga) kelurahan Teluk karang kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
131	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Gg Akur Lk II, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
132	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan I s/d VI Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
133	Rehabilitasi Jalan	jalan danau toba gang sehati kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
134	Rehabilitasi Jalan	Jalan Tusam IV LK 1, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
135	Pembangunan Tanggul Sungai	Gg Akur Lk II , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
136	Rehabilitasi Jalan	Jalan Ibnu Hajar LK. 5 , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
137	Rehabilitasi Jalan	Jalan Kenari LK 5, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
138	Rehabilitasi Jalan	Jalan Kenari Gg Bustami LK 5, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
139	Rehabilitasi Jalan	Jalan Danau Ranau Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
140	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Lintas LK 3 , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
141	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang	Jalan Syech Beringin, gg. Ikhlas, Lk 3, Kelurahan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
	Fungsi Hunian		
142	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Lintas Gg Buntu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
143	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Puri I LK 6, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
144	Rehabilitasi Saluran Drainase	jalan danau ranau kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
145	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Kenari Lk 5, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
146	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Gang Saudara Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
147	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Ibnu Hajar LK 5, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
148	Rehabilitasi Saluran Drainase	Gang Aan Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
149	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Purnawirawan, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
150	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Pasar Kebun, Gang Muhroni , Lingkungan 1, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
151	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jalan Bukit Bahagia , Lingkungan 3 Kelurahan Lalang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
152	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jln Iklas Gg Abdul Kadir , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
153	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Pasar Kebung, Gang Bambu , Lingkungan 4 Kelurahan Lalang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
154	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	jalan danau tondano kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
155	Rehabilitasi Jalan	Jalan Cahaya 2, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
156	Rehabilitasi Jalan	Jalan sehat, kelurahan Teluk Karang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
157	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Sehat, Lk III, Kelurahan Teluk Karang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
158	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jalan Lintas Gg Amal LK 3, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
159	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jln Soekarno Hatta LK 3 , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
160	Rehabilitasi Saluran Drainase	JLN Mutiara LK 4 , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
161	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Berlian LK 4 , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
162	Rehabilitasi Saluran Drainase	GG Amin LK 3 , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
163	Rehabilitasi Saluran Drainase	JL T.I . BONJOL LK 2, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
164	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	JLN T.I. Bonjol GG TPA LK 1 , Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
165	Rehabilitasi Saluran Drainase	Kelurahan Rantau Laban lingkungan III , Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
166	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jl. Bukit Suling Lk III Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
167	Rehabilitasi Saluran Drainase	jalan pandan kelurahan tambangan kecamatan padang hilir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
168	Rehabilitasi Saluran Drainase	jalan abdul rahim gang keluarga kelurahan tambangan kecamatan padang hilir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
169	Rehabilitasi Jalan	Jalan Bani Hasyim, gg. Peringgian, Lk I, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
170	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang kliwon kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
171	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang alfamart kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
172	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang tembok di kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
173	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang puskesmas kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
174	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Gunung Papan Dayan, Blok A3 Lingkungan 2 Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
175	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Gunung Krakatau Lingkungan 4 Kelurahan Lalang, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
176	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang buntu di kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
177	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Selamat Lingkungan 1 Kelurahan Mekar Sentosa, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
178	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Danau Meninjau, Gang Lido Lingkungan 5 Kelurahan Padang Merbau, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
179	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jl. Setia Budi Kelurahan Berohol, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
180	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang keluarga kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
181	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jl. K.F Tandean Lk III depan rumah Hendra Gunawan ,SE Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
182	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Danau Meninjau, Gang Sentosa, Lingkungan 5 Kelurahan Mekar Sentosa Kelurahan Padang Merbau, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
183	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang rusun kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
184	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Bersama Tembus, Jalan Karya Harjo Lingkungan 4 Kelurahan Padang Merbau, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
185	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang rel tamer kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
186	Rehabilitasi Saluran Drainase	Jalan Sori Merapi, Lingkungan 3 Kelurahan Mekar Sentosa, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
187	Penyediaan Prasarana, Sarana dan	gang panjang tamer kelurahan lubuk raya kecamatan padang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
	Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	hulu, Kota Tebing Tinggi	
188	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang becek tamer, kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
189	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	gang masjid mushlihin , kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
190	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	jalan Kutilang, BTN Purnawirawan, LK IV, Kelurahan Bulian, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
191	Rehabilitasi Jalan	gang sehati kelurahan lubuk raya kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
192	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jalan Pala Lk.III Kelurahan Bandar Utama Kec.Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
193	Pembangunan Tanggul Sungai	jl veteran Lk IV kel tebing tinggi lama, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
194	Pembangunan Tanggul Sungai	jl tenggiri lk IV kel pasar gambir,, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
195	Rehabilitasi Saluran Drainase	lk V kel pasar gambir,, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
196	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	jl sm raja lk 02 kel pasar gambir, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
197	Penyediaan Prasarana, Sarana dan	gg lk.III Kelurahan Bandar Utama, Kota Tebing Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
	Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		
198	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jln. Kutilang BTN Purnawirawan LK. IV Kel. Bulian Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

4.4 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Perumusan isu strategis Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, Kondisi Tahun 2024 arah kebijakan dari RPD Tahun 2023 -2026 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis Global dan Nasional seperti masih tingginya tingkat kemiskinan dan tingginya angka stunting.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan percepatan pengurangan tingginya angka stunting dengan membuat program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam penurunan angka stunting, misalnya pemberian makanan tambahan, peningkatan kualitas sanitasi dan rumah layak huni, gerakan masyarakat sehat.

Kaitan dengan isu pembangunan infrastruktur jalan Tol yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota, Pemerintah kota Tebing Tinggi melakukan perubahan cara berpikir bahwa pembangunan jalan Tol adalah untuk memperlancar akses transportasi komoditas perdagangan dengan menyuarakan "Sudah ada jalan tol ke Kota Tebing Tinggi".

Tahun 2024 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah daerah. Pemulihan ekonomi di arahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha, juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor- sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar instansi perangkat daerah / lembaga / pemangku kepentingan dan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023-2024 di Kota Tebing Tinggi, dilaksanakan secara tepat sasaran melalui program dan kegiatan pendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem, sebagai berikut : (1) Program perlindungan sosial dan subsidi secara terpadu kepada masyarakat miskin ekstrem., berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk pengurangan beban pengeluaran, pemenuhan hak dasar, dan perbaikan kualitas hidup kelompok miskin ekstrem; (2) Program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem., yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok miskin ekstrim. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi terlebih dahulu melakukan kegiatan : (1) Pendataan dan menetapkan Data Keluarga Miskin Ekstrem 2023-2026 Kota Tebing Tinggi berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah kelurahan; (2) Penyusunan program dan kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 Kota Tebing Tinggi, beserta alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 Kota Tebing Tinggi, dalam rangka

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address); (3) Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat (keluarga miskin ekstrem) yang memerlukan rumah layak huni; dan (4) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada bulan Juni tahun 2023, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 telah memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan dukungan sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 74,00 persen.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dari periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan tahun kedepan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat. Adapun Arah kebijakan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 sesuai RPD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi
5. Penggunaan Produk Lokal
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu
10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
11. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar

4.5 Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan Daya saing komoditi unggulan daerah dan berkreatifitas serta berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah Daerah. Hal ini dapat dicapai melalui suatu sistem inovasi Daerah berkaitan dengan keseluruhan proses pengembangan inovasi antar institusi pemerintah, lembaga penelitian, Badan usaha serta masyarakat yang mengedapkan ilmu pengetahuan.

Kota Tebing Tinggi telah ikut dalam perlombaan Inovasi tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh BALITBANG Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 dan telah meraih gelar juara 3 untuk Kategori tingkat Kota se Sumatera utara. Adapun Inovasi daerah yang dipertandingkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Inovasi Daerah

No	Inovasi Tahun 2021	Keterangan
1	Aplikasi GEMPITA (Gerakan Masyarakat Pencipta Agribisnis)	Juara 3 Tingkat Provinsi Sumatera Utara
2	Sentuhan dukcapil Tebing Tinggi	Nominasi Provinsi Sumatera Utara
3	Ayoo... Ke Dukcapil	Nominasi Provinsi Sumatera Utara
4	Empati Untuk Rakyat Tebing Tinggi	Nominasi Provinsi Sumatera Utara
5	SitalabajakunReb	Nominasi Provinsi Sumatera Utara

a. Aplikasi GEMPITA (Gerakan Masyarakat Pencipta Agribisnis)

Aplikasi Gerakan Masyarakat Pencinta Agribisnis (GEMPITA) Kota Tebing Tinggi tercantum dapat surat Keputusan walikota Kota Tebing Tinggi No 500/2554/ Tahun 2019, merupakan gerakan bersama dari segenap pemangku kepentingan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang berorientasi agribisnis sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan daya saing serta daya beli masyarakat dan petani melalui penambahan aktivitas agribisnis berbasis teknologi dan informasi, dengan melibatkan stakeholder dan integrasi multi sektor serta pelaku bisnis dan pelaku usaha. GEMPITA Kota Tebing Tinggi dilaksanakan dengan membangun klaster-klaster agribisnis yang terdiri dari:

- 1 . Klaster Kampung Horti Organik Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan
2. Klaster Kebun Ubi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir
3. Klaster Kampung Wisata Terintegrasi Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu
4. Klaster Supersehat (Sentra Usaha Pertanian Sehati Terpadu) Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis
5. Klaster Padi Organik Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu.

Tujuan dari pembuatan Aplikasi GEMPITA ini adalah :

- a) Menciptakan wadah penjualan online produk-produk pertanian/peternakan /perikanan dan turunannya.
- b) Menciptakan wadah penjualan online produk-produk UMKM bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dan produk olahan turunannya.
- c) Menjadi sarana media pembayaran restribusi RPH (Rumah Potong Hewan) secara online, guna meningkatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

d) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa aplikasi organik yang bersumber dari transaksi penjualan kode unik.

b. Aplikasi AYOO... KE DUKCAPIL

Ayoo...ke dukcapil Suatu bentuk terobosan atau inovasi layanan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat mengurus kebutuhannya secara langsung ke dukcapil.

Ayoo...ke dukcapil dilatarbelakangi adanya persepsi masyarakat bahwa berurusan ke kantor pemerintahan selama ini berhadapan dengan birokrasi yang berbelit-belit, tidak ramah, lambat, dan dikenakan biaya sehingga sebagian masyarakat enggan bahkan "takut" untuk datang langsung mengurus dokumen ke dukcapil.

Ayoo...ke dukcapil ingin mengubah persepsi masyarakat, bahwa berurusan ke Dukcapil saat ini akan memberikan pengalaman yang menyenangkan karena konsep layanan seperti berada di cafe dan menghapus konsep kantor yang kaku, bersekat-sekat dan membosankan.

Ayoo...ke dukcapil memberikan kemudahan dalam pelayanan serta bebas calo, tersedia ruang tunggu yang nyaman dengan full AC, ruang bermain anak, ruang laktasi, petugas yang ramah, sarapan gratis untuk pengunjung, dan Dokumen siap cetak saat itu juga.

Ayoo...ke dukcapil sudah diterapkan sejak Juli 2020 dan mendapat respon yang baik dari segenap masyarakat Tebing Tinggi. Adapun Tujuan Aplikasi Ayoo...ke dukcapil untuk memberikan kemudahan dalam layanan dan suasana yang nyaman. - Meningkatkan animo masyarakat untuk berurusan langsung ke Dukcapil dan menghindari calo. - Meningkatnya persepsi kepuasan masyarakat dan naik nya Nilai IKM.

c. Aplikasi EMPATI UNTUK RAKYAT TEBING TINGGI

Memperhatikan permasalahan pelaporan dan pencatatan peristiwa kematian penduduk yang tidak optimal dan tidak sesuai ketentuan dalam waktu pelaporannya, maka area proyek perubahannya adalah dengan membangun suatu sistem atau aplikasi elektronik berbasis Android khusus untuk pelayanan Akta Kematian atau disingkat "EMPATI" dengan melibatkan Lurah dan Kepala Lingkungan sebagai operator pencatat peristiwa kematian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya.

Adapun tujuan dari Terobosan/Inovasi ini terwujudnya peningkatan kinerja pelaporan dan pencatatan peristiwa kematian penduduk melalui penerbitan Akta Kematian yang optimal dan tepat waktu melaporkan sesuai ketentuan Undang – Undang dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Aplikasi EMPATI (Elektronik Mobile Pelayanan Akta Kematian).

d. Aplikasi SENTUHAN DUKCAPIL TEBING TINGGI

Pelayanan Kependudukan yang belum optimal dan tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja pelayanan kependudukan yang rendah sehingga perlu diciptakan strategi terbaik untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap permasalahan tersebut antara lain :

1. Penduduk belum sepenuhnya memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan
2. Mindset sebagian besar penduduk bahwa mengurus ke Dukcapil itu sulit dan berbelitbelit.
3. Masih ada penduduk yang belum tahu prosedur, syarat dan tata cara pengurusan dokumen kependudukan.
4. Perjalanan yang jauh untuk mengurus dokumen kependudukan dan adanya biaya dalam pengurusan.

Adapun tujuan dari Terobosan/Inovasi ini terwujudnya peningkatan kinerja Pelayanan Kependudukan melalui penerbitan Akta Kelahiran, KTP-el, Kartu Keluarga, KIA, Perpindahan Keluar, dan Kedatangan yang optimal dan tepat waktu melaporkan sesuai ketentuan Undang – Undang dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Aplikasi SentuhanDukcapil.

e. Aplikasi SITALAKBAJAKUNREB

Portal Aplikasi SITALAKBAJAKUNREB (Sistem Informasi Tatalaksana, Analisis Jabatan Beban Kerja, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi) merupakan Kumpulan aplikasi yang dibangun dan diterapkan dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi berbasis web yang memuat akses ke berbagai aplikasi penunjang tatakelola pemerintahan diantaranya:

1. e-SAKIP (Aplikasi SAKIP)
2. e-Anjab dan ABK
3. e-Evaluasi Akuntabilitas (EVATAS)
4. SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)
5. E- Reformasi Birokrasi.

Dari kelima Aplikasi tersebut, semua telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi terutama di jajaran SKPD Pemerintah Kota untuk kelancaran pelaksanaan tugas, sedangkan untuk peningkatan layanan Pemerintah Kota kepada Masyarakatnya dapat dirasakan di SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti : Dinas Dukcapil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen tahunan berupa program, kegiatan dan sub-kegiatan dari pejabaran RPD Tahun 2023-2026 Tebing Tinggi. RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 yang berisi rencanan Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun 2023 dan target yang akan dicapai di Tahun 2024 dalam bentuk kerangka pendanaan dan sekaligus menjawab isu-isu strategis yang ada dan menjawab aspirasi masyarakat. RKPD dan Pendapatan Tahun 2024 untuk mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, Pemerintah Standar Pelayanan minimal, maupun untuk perubahan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi memuat dokumen rencana tahunan yang berisi Program, Kegiatan, sub kegiatan yang merupakan penjabaran RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Rencana program prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja perangkat daerah.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi /CSR/Hibah

Untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan di Kota Tebing Tinggi, perlu dukungan Pendanaan dari berbagai pihak swasta maupun Nasional. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing - masing Kota, melalui kerja sama pendanaan untuk berbagi Kegiatan menurut sektor-sektor pembangunan yang berpedoman kepada fokus pembangunan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu tetap diupayakan penggalian dan pengalokasian sumber-sumber

pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Kota Tebing Tinggi seperti sektor Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

5.2 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tebing Tinggi

Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi merupakan Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat guna mencapai target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD pada Tahun 2024. Selain itu kegiatan pembangunan di sinkronisasikan berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan Kelurahan, Kecamatan, dan Kota, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Adapun pagu indikatif masing-masing SKPD berdasarkan Anggaran Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi dapat diproyeksikan seperti berikut ini :

Tabel 5.1
Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	191.169.535.700
2	Bidang Kesehatan	
	➤ Kesehatan	115.292.968.039
	➤ RSUD dr. Kumpulan Pane	65.617.114.821
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.409.131.240
4	Bidang Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	32.223.782.305
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	➤ Satpol PP	6.728.539.432
	➤ BPBD	5.947.030.139
	➤ Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.207.776.624
6	Bidang Sosial	5.530.360.153
	JUMLAH	496.126.238.453

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Bidang Tenaga kerja	4.324.910.250
2	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.016.142.062
3	Bidang Lingkungan Hidup	21.121.073.160
4	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.741.249.373
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	5.329.953.219



6	Bidang Perhubungan	7.153.074.064
7	Bidang Komunikasi dan Informatika	11.458.698.660
8	Bidang Penanaman Modal	4.577.478.084
9	Bidang Pemuda dan Olahraga	7.956.939.375
10	Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.700.728.108
JUMLAH		78.380.246.355

Urusan Pemerintahan Pilihan

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Bidang Pertanian	10.075.165.829
2	Perdagangan	7.764.250.916
JUMLAH		17.839.416.745

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Sekretariat Daerah	33.811.981.472
2	Sekretariat DPRD	24.042.651.214
JUMLAH		57.854.632.686

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Perencanaan	8.046.609.143
2	Keuangan	32.903.877.398
3	Kepegawaian	6.350.482.853
JUMLAH		47.300.969.394

Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Inspektorat Daerah	12.842.136.466
JUMLAH		12.842.136.466

Unsur Kewilayahan

NO	BIDANG	DAU
1	Kecamatan	
	➤ Kecamatan Bajenis	7.730.133.428
	➤ Kecamatan Padang Hilir	7.803.604.842
	➤ Kecamatan Padang Hulu	8.073.477.085
	➤ Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8.211.146.136
	➤ Kecamatan Rambutan	7.873.181.057

	JUMLAH	39.691.542.548
--	---------------	-----------------------

Unsur Pemerintahan Umum

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Kesbang Linmas	12.079.400.867
	JUMLAH	12.079.400.867

Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi

No	Sumber Dana	NOMINAL	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah sub Kegiatan
1	DAU	762.114.583.505	169	466	743

Alokasi Pagu Indikatif pagu indikatif seluruh program Perangkat Daerah pada Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2024, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah dan RPD Tahun 2024. Adapun jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut (Jumlah Program pada tabel dengan menyertakan Program Urusan Penunjang Pemerintah daerah Provinsi)

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	10	22	203
2	Bidang Kesehatan	5	20	61
	➤ Kesehatan			
	➤ RSUD dr. Kumpulan Pane	2	4	6
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	73
4	Bidang Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	5	15	36
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			



NO	BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	Masyarakat			
	▶ Satpol PP	2	7	21
	▶ BPBD	2	11	23
	▶ Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	11	25
6	Bidang Sosial	6	17	112
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
7	Bidang Tenaga kerja dan Perindustrian	4	8	17
8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	14	55
9	Bidang Lingkungan Hidup	10	16	39
10	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	10	18
11	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	9	22	44
12	Bidang Perhubungan	2	16	32
13	Bidang Komunikasi dan Informatika	4	11	37
14	Bidang Penanaman Modal	6	14	33
15	Bidang Pemuda dan Olahraga	6	14	25
16	Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah	4	13	31
Urusan Pemerintahan Pilihan				
17	Bidang Pertanian	11	23	39
18	Perdagangan	15	31	53
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
19	Sekretariat Daerah	3	17	56
20	Sekretariat DPRD	2	15	39

NO	BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
Unsur Penunjang Urusan Pmerintahan				
21	Perencanaan	4	13	42
22	Keuangan	4	12	57
23	Kepegawaian	2	10	24
Unsur Pengawasan Urusan Pmerintahan				
24	Inspektorat Daerah	3	10	29
Unsur Kewilayahan				
	Kecamatan			
25	➤ Kecamatan Bajenis	5	14	28
25	➤ Kecamatan Padang Hilir	5	14	26
27	➤ Kecamatan Padang Hulu	4	11	23
28	➤ Kecamatan TebingTinggi Kota	4	10	16
29	➤ Kecamatan Rambutan	4	11	19
Unsur Pemerintahan Umum				
30	Kesbang Linmas	6	11	28
Total				

5.3 Sinergitas Program/kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi

Adapun Sinergitas program/kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 5.3
Sinergitas program/kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus	-	-	-	-	-	-
		Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama	-	-	-	-	-	-
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "SIEMAK" (Program Edukasi	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Perempuan dan Anak);	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	83.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
		Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e-Library;	-	-	-	-	-	-
		Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem;	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.125.000.000,00	DINAS KESEHATAN	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut);						
		Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	-
		Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	-
		Optimalisasi Jangkauan lokasi dan pelayanan Kesehatan bergerak	-	-	-	-	-	-
		Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga	-	-	-	-	-	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		SUMUT JUARA;						
		Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.914.938.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	124.054.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.446.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
		Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	43.573.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	138.067.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
		Penguatan Edukasi Masyarakat Sadar dan Tangguh Bencana;						



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	Dinas Sosial	-	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.098.845,00	Dinas Sosial	-	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.773.863,00	Dinas Sosial	-	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	99.085.690,00	Dinas Sosial	-	
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0,00	Dinas Sosial	-	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	570.762.980,00	Dinas Sosial	-	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	54.207.197,00	Dinas Sosial	-	
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	630.572.839,00	Dinas Sosial	-	
2.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		Pembangunan North Sumatra Skill Development	-	-	-	-	-	-



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Center (NS-SDC)						
		Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitas kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	-	-	-	-	-	-
		Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM)	-	-	-	-	-	-
		Travel Fair Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-
		Pengembangan Wellness/Healthy Tourism dan Pariwisata Minat Khusus serta Pola Kunjungan Wisata	-	-	-	-	-	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Terintegrasi dan Peningkatan Kualitas Calender						
		Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-
		Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-
		Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan						



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Pameran Agro Industri Nasional;						
3.	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Jalan	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Rekonstruksi Jalan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Rehabilitasi Jalan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Berkala Jalan	9.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Rutin Jalan	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Jembatan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Rehabilitasi Jembatan	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan	
		Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	
						Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1.210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	6.735.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
					Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Pembangunan Tanggul Sungai	3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
							RUANG	
					Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Normalisasi/Restorasi Sungai	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
		Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan	-	-	-	-	-	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Regional Medan - Deli Serdang						
		Pengembangan SPAM Mebidang dan Pembangunan SPAM Seriti	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM				200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	
	Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu	-	-	-	-	-	-	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwisata	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Satu Data Digital Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	152.424.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-
		Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan "SUMUT HIJAU"	-	-	-	-	-	-
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	16.522.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.137.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	246.888.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	256.145.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	2.730.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	2.730.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	55.835.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	77.720.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24.469.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2.321.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penatausahaan Pembiayaan Daerah	97.285.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	28.509.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	194.062.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	25.867.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	26.541.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7.934.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	75.923.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15.988.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	104.649.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	63.445.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.368.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.756.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.710.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10.948.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	18.850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	122.897.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	16.966.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	82.142.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	153.287.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Pengamanan Barang Milik Daerah	201.311.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penilaian Barang Milik Daerah	19.068.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	37.160.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.072.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
		Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81.799.793,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), guna bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator kinerja makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Makro Pembangunan
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023 (sampai bulan Maret)	Target Tahun ke-	
				2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,01		2,50 – 5,00	2,50 – 5,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,59		9,5	9,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,39	6,30	6,30	6,10
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,17		77,00	77,50
5	Rasio Gini	0,33		0,30	0,30
6	Laju Inflasi (%)	6,16	-0,30	2,5	-
7	Penurunan Emisi GRK	-		-	-

Indikator Makro Pembangunan Kota Tebing Tinggi telah mendukung dengan Indikator Makro pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :



- a) Perbaikan ekonomi pasca pandemi menghasilkan tren yang positif pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,73 persen dan 5,31 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tidak lebih tinggi.
- b) Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,59 persen pada Tahun 2022. Hal ini diakibatkan karena mulai pulihnya kembali perekonomian pasca pandemi covid-19. Persentase penduduk miskin tersebut masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 8,42 persen dan persentase penduduk miskin Nasional yaitu sebesar 9,54 persen.
- c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,39 persen, lebih tinggi dari persentase Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 6,16 persen dan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,86 persen.
- d) Pada tahun 2022 IPM Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 76,17 poin sedangkan IPM Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 72,71 poin dan IPM Nasional sebesar 72,91 poin. IPM Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 0,75 poin atau 0,99 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 75,42 poin
- e) Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2022 mencapai angka 0,334 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,312. Pada Tahun 2022 Gini ratio Kota Tebing Tinggi lebih baik dari Gino Ratio Nasional yaitu sebesar 0,384.

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2023-2026, berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 yang tersaji pada tabel berikut

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun ke-	
			2024	2025
1	Prevalensi Stunting	19,6%	13%	11%
2	Angka Kesakitan	N/a	11,50	10,35
3	Angka Harapan Hidup	71,29	72,80	73.75
4	Rata – Rata Lama Sekolah	10,65	10,90	11,21
5	Indeks Profesionalitas ASN	49,15	70	75
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100%	100%
7	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	N/a	70,50	70,65
8	Pengeluaran rill per kapita (Ribu/kapita)	13.144	13.455	13.746
9	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	282,94	170	175
10	Indeks Rasa Aman	75,12	73,05	74,05
11	Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	N/a	72,60%	75,45%
12	Persentase cakupan Sanitasi yang Layak	83	87,10%	88,20%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,76	57,49	57,50
14	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	N/a	85%	90%
15	Nilai SAKIP	B	BB	BB
16	Indeks Pelayanan Publik	Prima	Prima	Prima
17	Indeks SPBE	2,04	2,7	2,8
18	Nilai reformasi Birokrasi	CC	B	BB
19	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP

Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi ditargetkan dapat terealisasi dengan menggunakan baseline data Tahun 2022 dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun berjalan 2023 yang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Perangkat daerah (RENJA) dan RKPD Tahun 2024, Hal ini dapat kita lihat pada contoh tabel berikut :

Tabel 6.3
Keselarasan IKU, IKD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Tebing Tinggi

NO	IKU	IKD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN BELANJA	KET
1	Prevalensi Stunting	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberian Bibit cabai ke kelompok petani sebesar Rp. 8.654.200	Sesuai

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memberikan gambaran terkait ukuran pencapaian keberhasilan Tahun 2023-2026 target capaian indikator kinerja di Kota Tebing Tinggi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.4
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kota Tebing Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
A.1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi %	4,01	2,50 – 5,0	2,50 – 5,0



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Rasio Gini	0,33	0,30	0,30
A.2 FOKUS KEJAHTERAAN SOSIAL				
1	Tingkat Kemiskinan	9,59	9,5	9,0
2	Angka Harapan Hidup	71,29	72,80	73,75
3	Rata – Rata Lama Sekolah	10,65	10,90	11,21
4	Tingkat Pengangguran Terbuka %	6,39	8,30	8,10
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,17	77,00	77,50
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100%	100%
7	Angka Melek Huruf	99,80	99,57	99,67
B. ASPEK PELAYANAN UMUM				
B.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				
B.1.1 PELAYANAN DASAR				
1 PENDIDIKAN				
Pendidikan Dasar				
1.1	Angka Melek Huruf	99,80	99,57	99,67
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,65	10,65	10,75
1.3	Harapan lama Sekolah	12,91	12,77	12,79
Tingkat Partisipasi dan Mutu Pendidikan				
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun pada jenjang Sekolah Dasar	114,94%	99,70%	99,75%
1.5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun pada jenjang Sekolah menengah pertama	101,13%	99,89%	99,90%
1.6	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun pada jenjang PAUD	53,59%	89,15%	91,20%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada pendidikan kesetaraan	0,66%	2,75%	3,00%
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar			
1.8	Sekolah Dasar (SD)	86,48%	63%	68%
1.9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	89,84%	70%	75%
1.10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	54,20%	24%	26%
1.11	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	36,36%	10%	15%
	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum sesuai standar			
1.12	Sekolah Dasar (SD)	100%	93,40%	94,60%
1.13	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100%	96,60%	97,80%
1.14	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	65%	70%
1.15	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	100%	55%	60%
2.	KESEHATAN			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH	4,8/1000KH	6,1/1000KH	5,6/1000KH
2.2	Jumlah Kematian Ibu	2	6 orang	5 orang
2.3	Prevalensi Balita Stunting	2,16 %	2%	1,8%
2.4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,05	0,1%	0,15%
2.5	Cakupan yang ditangani	100	100%	100%
2.6	Persentase balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	100	94%	95%
2..7	Persentase pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	70%	75%
2..8	Persentase Penduduk miskin yang tercakup dalam JKN	90	95%	95%
2..9	Persentase Pelayanan	100	100%	100%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kesehatan penderita Hipertensi			
2.10	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TB BTA	100	100%	100%
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
3.1	Ketaatan terhadap RTRW	53,80%	80%	80%
3.2	Luas wilayah Produktif	231,97 Ha	3.918	3.918
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
4.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	100%	100%	100%
4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	93	94
4.3	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak huni Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi Program pemerintah daerah Kota	100%	100%	100%
4.4	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	46,57	97,78%	97,92%
4.5	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	7,36	6,77%	6,37%
4.6	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	64,74	90%	95%
4.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	SATPOL PP			
4.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	78,5	80	82,5
4.2	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	100%	100%
4.3	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	90%	100%	100%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KESBANGPOL			
4.4	Persentase penurunan Unjuk Rasa	16	12%	13%
4.5	Persentase Konflik SARA	0	0%	0%
4.6	Persentase LSM aktif	25	49%	50%
4.7	Persentase Partisipasi Pemilih	-	70%	-
	DAMKAR			
4.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	90	95
4.9	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kota	100	90%	95%
4.10	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	600 Org	90%	95%
4.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	90%	95%
	BPBD			
4.11	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,38%	85%	90%
4.12	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	38,47%	85%	90%
5.	SOSIAL			
1.	Persentase PMKS yang ditangani	100	100%	100%
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR			
1.	TENAGA KERJA			
1.1	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	144	200 orang	200 orang
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama / PB (%)	0%	80%	85%
1.3	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	85,09	23%	25%
1.4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,39	8.93%	8,77%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
2.1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,6	6,52	6,03
2.2	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	91,42	89%	90%
2.3	Persentase Kelurahan Layak Anak	93,32	71,43%	85,71%
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
3.1	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	61,76	57,50	57,52
4.	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL			
4.1	Indeks pelayanan publik	Prima	Prima	Prima
4.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 Tahun	97	99%	99%
4.3	Persentase penerbitan kartu identitas Anak	94	60%	65%
5.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
3.1	Total Fertility Rate	2,1	2,22	2,20
3.2	Persentase Peserta KB aktif	90	79,5	80
3.3	Median Usia Kawin Pertama	100	23,6	23,4
6.	PERHUBUNGAN			
6.1	Jumlah terminal penumpang tipe c	2	2	2
6.2	Load factor angkutan perkotaan	58	63%	67%
6.3	Persentase uji kir angkutan perkotaan yang beroperasi	90	88%	89%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
7.1	Indeks SPBE	2,04	2,7	2,8
7.2	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	N/A	86%	87%
7.3	Persentase penyebaran informasi pemerintah daerah	N/A	95%	95%
7.4	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan e-government	N/A	22	26
7.5	Jumlah ketersediaan titik layanan fiber optik	N/A	44	57
7.6	Jumlah data dan metadada yang disebarluaskan pada portal SDI	N/A	7	8
7.7	Persentase SKPD yang telah tereduksi tentang tata kelola keamanan informasi	N/A	25%	25%
8	PENANAMAN MODAL			
8.1	Nilai Investasi	282,945	170	175
8.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	90%	95
9	PEMUDA DAN OLAHRAGA			
9.1	Persentase wirausaha Muda	11,06%	8,1%	8,1%
9.2	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan kepeloporan (orang)	72	100	100
9.3	Jumlah Atlet Prestasi Tingkat Nasional	12	2	2
9.4	Persentase Masyarakat Berolahraga	5	18	19
9.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,56	81	82
10	PERPUSTAKAAN			
10.1	Persentase Pengunjung Perpustakaan	60,44%	64%	65
11	ARSIP			



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.1	Nilai Evaluasi Pengawasan Arsip	51,55	61	61,5
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
1.	PARIWISATA			
1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	10.000	26.947	29.642
1.2	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (persen)	5,12%	4,0	4,1
2.	PERTANIAN			
2.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			
	Padi	69	68	68
	Jagung	55	55	55
	Ubi Kayu	600	471	472
2.2	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	86,86	81%	81,50%
3	PERDAGANGAN			
3.1	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Yang Memadai	100%	76%	77%
3.2	Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100%	100%	100%
4.	INDUSTRI			
4.1	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan/Manufacturing	1,23%	0,75%	1,00 %
B.3	FOKUS LAYANAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIS DAERAH			
1	BAGIAN KESRA			
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kesra	92,25	86,50	87
2	BAGIAN ORGANISASI			
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,25	86	87



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2	Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65,76	100	100
2.3	Jumlah SKPD yang nilai IKMnya Kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	30	65	70
3	BAGIAN HUMAS PROTOKOL			
3.1	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	100%	95%	100%
4	BAGIAN PBJ			
4.1	Persentase paket tender Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan terlaksana secara akuntabel dan transparan	54%	100%	100%
5	BAGIAN PEMBANGUNAN			
5.1	Jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada Semester I	68,75	30%	30
5.2	Jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada Semester I	46,87	30	30
6	BAGIAN PEMERINTAHAN			
6.1	Persentase Kecamatan dengan kategori baik (permen 81 th 2015)	1	20	20
6.2	Persentase Kelurahan dengan kategori baik	1	8,57	8,57
6.3	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	N/A	82	83
7	BAGIAN HUKUM			
7.1	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	100%	100%	100%
8	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA			



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.1	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	N/A	3.14	3.14
9	BAGIAN UMUM			
9.1	Terlaksanakannya kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH	100	100%	100%
B.4	FOKUS LAYANAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1.	BAPPEDA			
1.1	Predikat Nilai Sakip Bappeda	BB	A	A
1.2	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD yang mencapai target	80	80	80
1.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda	90	86	87
1.4	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian	100%	100%	100%
1.5	Nilai Reformasi Birokrasi	B	B	BB
2.	BPKPD			
2.1	Capaian Kinerja pelayanan Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi;	100 %	100 %	100 %
2.2	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan BIMTEK tentang Pajak Daerah;	6 orang	5 orang	5 orang
2.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;	WTP	WTP	WTP
2.4	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel;	100%	100%	100%
2.5	Terlaksananya pembayaran non tunai;	100%	100%	100%
2.6	Peningkatan target pendapatan pajak daerah;	37 miliar	34 miliar	36 miliar
2.7	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah	75%	75%	80%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	melalui e-Barang Milik Daerah;			
2.8	Terlaksananya e-budgeting;	100%	100%	100%
2.9	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui e-Pajak;	100%	100%	100%
3.	KEPEGAWAIAN			
3.1	Persentase tingkat Pendidikan Formal PNS Daerah jenjang S1 dan S2	70,64%	68,50%	69%
3.2	Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi	928 Orang	750 Orang	750 Orang
3.3	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	85,94%	78%	80%
3.4	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	90%	25%	30%
3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan admisnistrasi kepegawaian	90,25%	86%	87%
3.6	Persentase tingkat akurasi data dan Informasi Kepegawaian	95%	95%	100%
3.7	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM	80%	85%	90%
B.5	FOKUS LAYANAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
1	INSPEKTORAT			
1.1	Persentase Temuan Eksternal dan Internal yg ditindaklanjuti dengan status Selesai	95,76%	95%	95%
1.2	Persentase Temuan yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan dan Aset Material	100%	98%	100%
1.3	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	100%	98%	100%
1.4	Persentase SKPD dengan Nilai AKIP minimal B	100%	95%	97%
1.5	Level Maturitas SPIP	Level 5	Level 3	Level 3



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.6	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
B.6	FOKUS LAYANAN UNSUR KEWILAYAHAN			
1	KECAMATAN			
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88
1.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100%
1.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%
1.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	100%	100%	100%
1.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
1.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	100%	100%	100%

Bahwa target pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024 sudah menjadi pedoman untuk menyusun Program, Kegiatan, Sub kegiatan di masing-masing SKPD yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi.



BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi merupakan tahapan akhir penyusunan RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi yang memuat rencana kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024, rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi serta rencana kerja dan pendanaan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2024.

RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi merupakan lanjutan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi di Tahun Kedua berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Perangkat Daerah dan menjadi pedoman Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.